

Menanjaknya dan Prospek KAWASAN PASIFIK



NTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,

J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO, B. SUNARIO, Harry TJAN SILALAHI

dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana: Kirdi DIPOYUDO, B. SUNARIO

STT: S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978 ISSN 0126 - 222X

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,

Telepon 356532-5

Tata Usaha: Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,

Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI	842
MUNCULNYA KAWASAN PASIFIK SEBAGAI PUSAT DINAMISME DUNIA	845
ANALISA MENGENAI PASIFIK BARAT DALAM TAHUN 1980-AN	
Jusuf WANANDI	869
INTERDEPENDENSI EKONOMI DI ASIA-PASIFIK DALAM TAHUN 1980-AN	
Hadi SOESASTRO	892
PAPUA NEW GUINEA DAN PROSPEK PENING- KATAN HUBUNGAN DENGAN INDONESIA	
R. Slamet ROOSMAN	920
KETURUNAN INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN	
R. Slamet ROOSMAN	929

PENGANTAR REDAKSI

Setelah di masa lampau Cina, Timur Tengah, Kawasan Laut Tengah, Inggeris, Kawasan Laut Utara dan Kawasan Atlantik Utara secara berturut-turut menjadi pusat dinamisme dunia, dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an adalah giliran Kawasan Pasifik untuk berkembang menjadi pusat serupa itu. Sejauh ini belum ada sepakat kata mengenai luasnya kawasan ini. Akan tetapi seperti dikemukakan dalam buku Endel-Jakob Kolde, The Pacific Quest (Lexington — Toronto, 1976), kiranya kita dapat membatasinya sebagai meliputi seluruh Samudera Pasifik dan semua negeri pantainya. Lebih dari separuh perdagangan dan investasi negara-negara itu dilakukan di kawasan dan proporsi itu semakin meningkat.

Hanya waktu belakangan ini tampak dengan jelas besarnya perkembangan yang terjadi di kawasan ini, tetapi perkembangan itu telah mulai lama sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang mantab bukanlah soal baru di Asia Timur, tetapi kemungkinan-kemungkinan jangka jauhnya yang luar biasa tidak segera kelihatan. Oleh sebab pertumbuhan itu mulai dari suatu dasar yang rendah, baru setelah dicapai banyak kemajuan orang dapat melihatnya dengan jelas. Lagi pula kemajuan itu sering terhenti untuk sementara waktu akibat kekakuan sistem-sistem sosial, pergolakan kekerasan menyusul runtuhnya struktur-struktur tradisional dan kolonial atau akibat Perang Dunia II. Hal itu bisa berulang kembali, tetapi kemungkinannya tidaklah besar. Runtuhnya sistem-sistem lama sebagian besar telah terjadi dan perang yang luas kiranya tidak akan berkobar lagi, khususnya karena tersedianya senjata-senjata nuklir.

Salah satu unsur pokok perkembangan itu ialah semakin intensifnya interaksi ekonomi antara negara-negara tersebut yang tercermin dalam pola hubungan perdagangan, yang pada gilirannya mengungkapkan perkembangan ekonomi mereka. Dalam periode 1961-1978 ini perdagangan (ekspor dan impor) intrakawasan menjadi semakin intensif. Artinya, bagi setiap negara di kawasan ini bagian dari keseluruhan ekspor dan impornya dengan dunia yang dilakukan dengan sesama negara kawasan menjadi semakin besar. Demikianpun investasi di sesama negara kawasan. Sejalan dengan itu meningkat pula hubungan transpasifik. Bersamaan dengan itu semua kawasan mulai mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Strategi geopolitik, penempatan kekuatan militer, perdagangan internasional, pasaran dan sumber-sumber daya alam semuanya itu mencerminkan meningkatnya pengaruh itu.

Bukanlah suatu keharusan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan ini akan berlangsung terus, tetapi hal ini kiranya akan terjadi berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan negara-negara besar yang cukup kompeten. Setelah Jepang berhasil mencapai GNP yang terbesar ketiga di dunia (sesudah Amerika Serikat dan Uni Soviet) dan pendapatan per jiwa Singapura mencapai sekitar US\$ 3.000 setahun, kemungkinan-kemungkinan take off regional yang luar biasa mulai kelihatan.

Kemungkinan-kemungkinan itu, seperti perkembangan yang terjadi selama ini, berlandaskan hal-hal berikut: (1) mengalirnya investasi dan bantuan ke kawasan dari Eropa, Amerika Serikat dan Jepang (2) kemampuan sistem ekonomi sosial Jepang yang luar biasa untuk berkembang; (3) ketrampilan dan kerajinan ekonomi bangsa-bangsa kebudayaan Cina di seluruh Asia Timur; (4) interaksi ekonomi-ekonomi dinamis yang baru itu berupa perdagangan dan investasi intra-kawasan; (5) efisiensi teknologi komunikasi modern dan pengangkutan samudera; (6) terus berlangsungnya perdamaian regional, biarpun di sana sini terjadi peperangan lokal; dan (7) meningkatnya dayaguna pemerintah-pemerintah dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan pelaksanaannya.

Di antara faktor-faktor itu yang utama ialah akses ke pasaran modal internasional di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Kredit perbankan internasional untuk waktu mendatang ini akan tetap tersedia untuk negara-negara berkembang di kawasan. Beberapa negara menetapkan batas pinjaman secara komersial. Di negara-negara berkembang ini sektor negara memainkan peranan yang penting. Hal ini menjadi mungkin berkat mudahnya akses ke pasaran modal internasional dan meningkatnya arus bantuan luar negeri secara bilateral maupun multilateral. Faktor penting lain ialah perkembangan teknologi, khususnya teknologi pengangkutan samudera. Sebagai akibatnya, Samudera Pasifik bukan lagi rintangan tetapi integrator karena pengangkutan samudera menjadi lebih murah daripada pengangkutan darat dan cukup cepat sehingga menjadi efisien. Demikianpun komunikasi tilpun menjadi lebih murah dengan tersedianya komunikasi lewat satelit. Kemajuan teknologi ini adalah di belakang gejala ekonomi dan politik yang membuat kita melihat Kawasan Pasifik sebagai suatu kesatuan.

Kawasan Pasifik yang berkembang dengan cepat itulah tema Analisa bulan Oktober 1979 ini. Sehubungan dengan itu diturunkan lima karangan yang membahasnya dari berbagai sudut. Karangan yang pertama membicarakan muncul dan menanjaknya Kawasan Pasifik sebagai pusat dinamisme ekonomi dunia. Karangan yang kedua membahas arah perkembangan politiknya dalam dasawarsa 1980-an, sedangkan karangan yang ketiga mengulas prospek meningkatnya interdependensi ekonomi yang bisa menunjang timbulnya kesadaran politik bersama. Karangan yang keempat membicarakan tempat Papua New Guinea dan prospek peningkatan hubungannya dengan Indonesia. Akhirnya karangan yang kelima mengulas masyarakat-masyarakat keturunan Indonesia yang sejak lama menetap di Pasifik Selatan, khususnya di Kaledoni Perancis dan di Rabaul, Papua New Guinea.

Oktober 1979

REDAKSI

MUNCULNYA KAWASAN PASIFIK SEBAGAI PUSAT DINAMISME DUNIA*

Dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an kawasan Pasifik kiranya akan muncul sebagai pusat dinamisme dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam proses itu negara-negara kawasan ini bisa terpecah-belah secara dramatis dan secara demikian membatasi laju pertumbuhannya atau menjadi sangat bergantung satu sama lain dan bahkan mengembangkan suatu kesadaran politik bersama tertentu. Hanya waktu belakangan ini kelihatan dengan jelas besarnya apa yang sedang terjadi di kawasan Pasifik, tetapi perkembangannya telah lama berlangsung.

I. PERKEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PASIFIK

Dalam sejarah berbagai kawasan telah menjadi fokus dinamisme ekonomi dunia: Cina, Timur Tengah, Kawasan Laut Tengah, Inggeris, Laut Utara dan Kawasan Atlantik Utara. Pada abad-abad belakangan ini perkembangan ekonomi yang menentukan meliputi: pelembagaan laju pertumbuhan 2% di Inggeris selama abad kedelapan belas; pelembagaan laju pertumbuhan 3-5% berikutnya di Amerika Serikat, Uni Soviet dan beberapa bagian Eropa; dan yang terakhir pelembagaan laju pertumbuhan

^{*} Diambil dari karangan William H. Overholt, "The Rise of the Pacific Basin", dalam Pacific Community, Juli 1974, oleh B. Wiroguno

yang bahkan lebih tinggi di Jepang dan beberapa negara tetangganya. Dalam kasus masing-masing akselerasi ekonomi ini sangat mempengaruhi sejarah politik dan budaya. Demikianpun menanjaknya Kawasan Pasifik — yang mencakup Amerika Utara maupun Selatan dan Asia Timur Laut maupun Tenggara — barangkali merupakan gejala yang paling menyolok dari abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu.

Pertumbuhan ekonomi yang mantab dan kadang-kadang menyolok bukanlah suatu gejala baru di Asia Timur, tetapi kemungkinan-kemungkinan jangka jauh yang luar biasa dari pertumbuhan yang mantab ini tidak segera tampak. Karena pertumbuhannya mulai dari suatu dasar yang begitu rendah, harus terjadi banyak kemajuan sebelum mata Barat dapat melihatnya. Mata Barat kerap kali melihat gubug-gubug tahap perkembangan Asia yang paling primitif sebagai panorama yang indah, dan menganggap rumah-rumah yang beratap seng yang menyertai peralihan yang berhasil ke tahap yang lebih tinggi sebagai sangat buruk. Kemajuan juga kerap kali dihentikan sementara oleh kekakuan struktur-struktur sosial atau oleh pergolakan kekerasan akibat runtuhnya struktur-struktur tradisional atau kolonial atau akibat Perang Dunia II. Penghentian-penghentian sementara serupa itu juga mungkin di masa mendatang, tetapi sebagian besar runtuhnya sistem-sistem lama telah terjadi dan jaman nuklir mencegah timbulnya perang yang luas.

Terus berlangsungnya pertumbuhan yang dramatis bukanlah suatu keharusan, tetapi kiranya akan terjadi berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan negara-negara besar yang relatif kompeten. Kini, setelah Jepang mencapai GNP yang terbesar ketiga di dunia dan pendapatan per jiwa Singapura melampaui US\$ 1000 setahun, kemungkinan-kemungkinan take off regional yang luar biasa mulai kelihatan.

Kemungkinan-kemungkinan ini tetap berlandaskan: (1) mengalirnya investasi ke kawasan, mula-mula dari negara-negara Eropa, kemudian pertama-tama dari Amerika Serikat, dan kini pertama-tama dari Amerika Serikat dan Jepang; (2) kemampuan

luar biasa sistem ekonomi sosial Jepang untuk berkembang; (3) ketrampilan dan kerajinan ekonomi yang dibawa oleh kebudayaan Cina ke seluruh Asia Timur; (4) meningkatnya interaksi ekonomi intra-kawasan; (5) efisiensi teknologi komunikasi modern dan pengangkutan samudera; (6) perdamaian regional, biarpun terjadi peperangan lokal; dan (7) meningkatnya dayaguna pemerintah dalam perencanaan dan kebijaksanaan ekonomi.

Tahap Pertama: Menanjaknya Amerika Serikat dan Jepang

Tahap pertama menanjaknya Kawasan Pasifik adalah suatu tanggapan atas intrusi Eropa. Di seluruh Kawasan Pasifik, di Asia Timur Laut maupun Tenggara dan Amerika Selatan, pedagang-pedagang, misionaris-misionaris, tentara dan birokrat-birokrat Eropa secara sistematis menghancurkan struktur-struktur sosial, yang betapa baiknyapun tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dan kerap kali menghambatnya. Secara kebetulan pada jaman penetrasi Eropa ke Kawasan Pasifik masyarakat-masyarakat kawasan adalah primitif atau terpecah belah seperti halnya dengan Amerika dan Asia Tenggara, atau mengalami kemunduran politik seperti halnya dengan Cina dan Jepang.

Di Amerika Selatan dan Asia Tenggara orang-orang Eropa menganut suatu strategi memecah belah untuk merebut, tetapi mereka menciptakan pasaran-pasaran yang lebih luas yang lebih menunjang pertumbuhan. Jalan-jalan, komunikasi, keahlian administrasi dan orientasi filosofis yang merupakan syarat pertumbuhan ekonomi menumpuk.

Kalau masalah-masalah Asia Tenggara bersumber pada kecilnya negara-negara dan perpecahan, masalah-masalah Cina berakar pada terlalu besarnya dan bersatunya. Pada hakikatnya besarnya Cina menghambat perubahan. Birokrasinya yang sangat berkuasa, inkorporasi kaum cendekiawannya dalam ortodaksi birokrasi, dan bakat-bakat diplomasi kunonya,

semuanya ini membantu Cina untuk melawan perubahan. Dan dekadensi lembaga-lembaga dan keahlian-keahlian ini membuat Cina tidak mampu mengadakan perubahan. Tetapi seperti di kawasan-kawasan lain, akumulasi prasarana dan pemilihan gagasan-gagasan serta lembaga-lembaga baru berlangsung terus.

Perkembangan ekonomi Jepang dan Amerika Utara yang dramatis, dan persiapan perkembangan di negara-negara lain merupakan tahap pertama menanjaknya Kawasan Pasifik. Dinamisme, perdagangan yang saling menguntungkan dan persaingan mereka terus mendorong perkembangan mereka. Tetapi keberhasilan mereka itu sendiri mengubah konteks operasi mereka dan menciptakan suatu konteks baru yang merupakan tahap kedua menanjaknya Kawasan Pasifik.

Tahap Kedua: Menanjaknya Kawasan Kebudayaan Cina

Pada abad kesembilan belas bagian pertama abad kedua puluh pengaruh ekonomi Eropa yang dominan secara berangsurangsur diimbangi pengaruh Amerika di Amerika Selatan dan pengaruh Amerika serta Jepang di Asia Tenggara. Perang Dunia II menghancurkan dominasi pengaruh Eropa dan Jepang di kedua kawasan itu, dan selama seperempat abad berikutnya perdagangan, investasi, bantuan dan pemeliharaan stabilitas terutama merupakan tanggung jawab Amerika.

Akan tetapi dalam keadaan damai perekonomian Jepang mendapatkan kembali kemampuan luar biasanya untuk berkembang dan mengalami pertumbuhan yang bahkan lebih cepat berkat kebutuhan militer Amerika selama perang Korea dan Vietnam. Pada awal 1970-an Jepang melampaui perdagangan Amerika dengan setiap negara Asia Tenggara di luar Indocina waktu perang, dan mulai mengimbangi pengaruh ekonomi Amerika di Amerika Selatan. Secara ekonomis "Abad Amerika" di Asia hanya berlangsung selama 25 tahun. Investasi Amerika di kawasan masih melebihi investasi negara-negara lain, dan investasi Amerika akan tetap merupakan salah satu

kekuatan utama di kawasan untuk masa mendatang, tetapi dinamisme kawasan kini bersumber pada Jepang dan negaranegara tetangganya yang kecil di Asia Timur Laut.

Menurut segala kriteria pengalaman ekonomi Barat Jepang seharusnya tidak mampu mencapai perkembangan ekonomi yang cepat. Penempatan tenaga kerja selama hidup seharusnya memperlambat pertumbuhan dengan mengurangi mobilitas tenaga kerja. Kekurangan bahan mentah seharusnya membuat pertumbuhan tidak mantab dengan memaksakan ketergantungan pada sumber-sumber asing yang tidak dapat diandalkan. Konglomerat-konglomerat oligopolistis yang bekerja sama dengan pemerintah seharusnya mempersulit alokasi sumbersumber daya yang efisien yang dijamin oleh persaingan yang lebih besar. Kekurangan tenaga kerja seharusnya meningkatkan biaya sehingga daya saing di pasaran-pasaran dunia menjadi berkurang. Tetapi berulang kali "hambatan-hambatan" ini ternyata dapat diterobos, dan bahkan dijadikan faktor penunjang dengan digunakannya semangat kerja, keahlian organisasi dan semangat kerja sama untuk merangsang laju pertumbuhan yang tinggi. Ini pada gilirannya menjamin tersedianya pekerjaan untuk tenaga-tenaga kerja yang ditempatkan selama hidup; memungkinkan diversifikasi sumber-sumber bahan mentah secara cepat; dan menciptakan tekanan untuk mempertahankan mutu yang tinggi dan mempercepat produktivitas tenaga kerja. Bagi Jepang "hambatan-hambatan" pertumbuhan cepat selama ini berfungsi sebagai tantangan yang harus diatasi oleh lembagalembaga sosial yang dimaksud untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi. Tantangan-tantangan untuk masa depan adalah besar, tetapi tidak lebih besar daripada tantangantantangan masa lampau; bahaya-bahaya utamanya adalah kehilangan keberanian, kekurangan energi yang berlarut-larut, dan antagonisme dengan Amerika Serikat.

Pada dasarnya Jepang adalah suatu pusat pemrosesan tanpa bahań-bahan mentah lokal yang berarti dan oleh sebab itu bergantung pada perdagangan internasional. Akan tetapi kerawanan akibat ketergantungan semacam itu kerap kali dibesar-besarkan. Jepang mengadakan diversifikasi sumbersumber suplainya dengan cepat. Dia tetap sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, tetapi hal ini dapat dikurangi pada tahun 1980-an dan 1990-an kalau sumber-sumber suplai lain di Siberia, di landas kontinen Asia dan di lain-lain tempat dikembangkan dengan cepat. Pada pertengahan dasawarsa 1980-an energi nuklir seharusnya mempercepat diversifikasi ini secara dramatis. 1 Suplai Jepang akan sumber-sumber primer rawan terhadap gangguan militer, tetapi ini akan berarti suatu pernyataan perang dan dapat menggerakkan aliansi Jepang dengan Amerika Serikat. Akhirnya kerawanan ekonomi Jepang terhadap perubahan-perubahan dalam pola-pola perdagangan dunia yang telah diakui harus dibatasi oleh besarnya dan menguntungkannya pasaran dalam negeri Jepang. Kebutuhankebutuhan pasaran dalam negerinya yang besar sekali mengandung penyelesaian bagi pergesekan-pergesekannya dengan negara-negara lain maupun kunci bagi terus menanjaknya Kawasan Pasifik. Argumen-argumen bahwa perekonomian Jepang adalah suatu bunga yang mudah rusak harus dilihat di bawah sinar ketahanan luar biasa yang terungkap dalam tanggapan terhadap kekacauan moneter baru-baru ini maupun di bawah sinar kerawanan Jepang terhadap kekurangan energi.

Pemimpin-pemimpin Jepang di masa lampau menekankan ekspor sebagai suatu kewajiban patriotik dan melalaikan pembangunan prasarana sosial domestik dan fasilitas-fasilitas dasar bagi rakyat Jepang. Dua dasawarsa mendatang ini Jepang akan menekankan prasarana-prasarana dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan ini dan mengurangi tekanannya atas ekspor. Sejauh dia melakukannya, dia akan meningkatkan stabilitasnya sendiri dan sekaligus mengurangi antagonisme internasional dengan berkurangnya agresivitas dalam ekspor. Seperti begitu sering terjadi di masa lampau, Jepang menghadapi suatu tan-

Untuk proyeksi yang lebih terperinci lihat U.S. Atomic Energy Commission, "Forecast of Growth of Nuclear Power", WASH-1139 (Januari 1971), hal. 11

Sejauh mana ini dapat terjadi bergantung pada penyelesaian kekurangan energi dan harga tinggi energi secara cermat, dan pada hasil usaha mengamankan masalah-masalah moneter. Masalah-masalah Jepang dalam hal ini adalah serius tetapi dialami juga oleh negara-negara lain sehingga terdapat banyak tekanan menuju penyelesaian parsial — atau menuju suatu tragedi di seluruh dunia

tangan yang oleh orang-orang Barat mungkin akan dilihat sebagai memaksakan suatu laju pertumbuhan yang lebih rendah, tetapi kenyataannya dapat diatasi secara yang lebih baik dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Kesejahteraan dalam negeri dapat paling baik ditingkatkan dengan tekanan yang berlanjut atas pertumbuhan. Pengotoran paling baik dikurangi artinya dengan pengeluaran-pengeluaran besar pemerintah yang dibiayai lewat pertumbuhan dengan mengembangkan industri-industri yang lebih modern yang mengakibatkan lebih sedikit pengotoran, dan dengan mengekspor industri-industri sesuai dengan tekanan-tekanan lain untuk pertumbuhan yang tinggi. Ketergantungan akan minyak paling baik dikurangi dengan investasi besar-besaran dalam eksplorasi minyak dan tenaga nuklir.

Mungkin Jepang akan kehilangan keberanian dan menganut suatu kebijaksanaan pertumbuhan yang lebih rendah, atau pergolakan politik intern akan mencegah implementasi rencanarencana yang ambisius, atau Jepang dan Amerika akan menangani hubungan mereka secara salah sehingga pertumbuhan menjadi lebih lamban; tetapi asal dianut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang cukup baik ¹ di Amerika Serikat dan Jepang, pertumbuhan ekonomi 7 sampai 10% dapat berlangsung terus.

Jepang menghadapi biaya tenaga kerja yang meningkat, kekurangan tenaga kerja, semakin besarnya rasa tidak senang dengan pengotoran akibat industri-industri manufakturnya, dan meningkatnya tekanan atas sektor-sektor yang kurang menguntungkan dalam perekonomiannya. Kurangnya tenaga kerja dan biayanya memaksanya untuk memperlambat pertumbuhannya, mengimpor tenaga kerja murah. atau mengekspor industrinya, Untuk rakyat yang taraf hidupnya tetap sangat rendah, pertumbuhan yang secara sengaja dan dramatis diperlambat tidak dapat dipertahankan secara politik. Karena ingin mempertahankan sifat homogin masyarakatnya, Jepang tidak akan mengimpor tenaga kerja murah dari luar negeri seperti dilakukan oleh

¹ Kebijaksanaan yang baik akan menghindari semua kesalahan serius, sesuatu yang mustahil. Kebijaksanaan bodoh misalnya akan menanggapi persaingan biasa dengan permusuhan. Kebijaksanaan cukup baik tidak akan banyak lebih baik atau lebih buruk daripada kebijaksanaan tahun-tahun terakhir — tetapi mudah-mudahan sedikit lebih baik

Amerika Serikat pada abad kesembilan belas. Tetapi di negaranegara tetangganya terdapat sangat banyak tenaga kerja murah, dan negara-negara itu sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak begitu memikirkan masalah-masalah pengotoran. Di Korea sering didengar "Berilah kami pengotoranmu". Dengan demikian masalah-masalah Jepang menciptakan tekanan-tekanan agar banyak modalnya disalurkan ke negara-negara tetangganya. Bersama-sama dengan modal itu akan pindah juga teknologi, organisasi, dan suatu jaringan manager serta komunikasi yang akan banyak menunjang integrasi ekonomi Asia bagian Timur.

Ekspor industri Amerika melengkapi dan mempercepat pengembangan Kawasan Pasifik oleh Jepang. Perusahaan-perusahaan Amerika, yang tidak dapat bersaing dengan produktivitas tenaga kerja Jepang yang lebih tinggi, merasa mampu mendapatkan kembali daya saing mereka dengan beroperasi di negara-negara kebudayaan Cina yang kurang berkembang tetapi kaya akan tenaga kerja yang lebih murah dan lebih rajin. Sebaliknya perusahaan-perusahaan Jepang merasa tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional Amerika dan pindah dari Jepang ke negara-negara kebudayaan Cina lain.

Kekuatan-kekuatan lain juga menunjang investasi Jepang di luar negeri. Meningkatnya kebutuhan akan bahan mentah bersama-sama dengan kebijaksanaan mendapatkan 30% pemilikan seluruh sumber bahan mentah di luar negeri, akan banyak mempercepat investasi luar negerinya. Kekurangan ruang dan tenaga kerja serta pengendalian pengotoran memaksa banyak industri besi dan baja pindah ke luar negeri. Perlakuan preferensi terhadap hasil-hasil negara-negara berkembang merangsang banyak investasi di luar negeri. Dan pemerintah memberikan pinjaman-pinjaman untuk membantu investasi luar negeri. Pada tahun 1980 Jepang sudah akan menanamkan lebih dari US\$ 8.000 juta di Asia. 1

Lihat Charles Sebestyen, *The Outward Urge: Japanese Investment World-wide* (London: Economist Intelligence Unit, 1972), hal. 20

Ekspor industri itu dilakukan ke negara-negara yang kebudayaannya berasal dari Cina. Negara-negara kebudayaan Cina mempunyai ciri-ciri bersama seperti kerajinan luar biasa. ketrampilan mekanis yang tinggi, keahlian berusaha, kecakapan organisasi dan kemampuan menabung (kurang teratur). Keahlian-keahlian organisasi dan berusaha bersumber pada kebudayaan Cina, yang organisasi-organisasinya, dari tingkat nasional ke tingkat lokal, adalah lebih tinggi dari organisasiorganisasi kawasan-kawasan lain selama sebagian besar dua ribu tahun. Kerajinan rupanya berakar pada faktor-faktor budaya dan tekanan penduduk. Semangat menabung bisa berakar pada asal mula di daerah-daerah di mana orang harus mempertahankan hidupnya dalam musim dingin, dan pada perasaan waktu yang merangsang perhatian untuk generasi-generasi mendatang maupun pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang tegas dan innovatif. Ketrampilan mekanis juga berasal dari masa lampau Konfusius; mesin-mesin praindustri Cina selalu mengesankan para pengunjung. Apapun asal mulanya, kawasan kebudayaan Cina ini mempunyai bakat-bakat yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat industrial.

Administrasi dan perencanaan pemerintah yang kuat dan kompeten juga merupakan faktor kunci laju pertumbuhan tinggi di negara-negara kebudayaan Cina. Di Jepang, Korea, Taiwan, Singapura dan Hong Kong pemerintah mampu mengumpulkan pendapat-pendapat kompeten, tepat pada waktunya membuat keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah delikat, melaksanakan kebijaksanaan yang konvensional (seperti suku bunga yang tinggi), dan menegakkan keputusan-keputusan mereka tanpa keresahan yang disruptif. Mereka berhasil mencegah persaingan kelompok kepentingan mengakibatkan inflasi yang mengganas. Mereka bersedia turun tangan secara tegas dalam perekonomian, tetapi melakukannya secara tidak dogmatis. Kebanyakan berhasil menciptakan staf perencana yang dapat meramalkan kemacetan-kemacetan dan memberikan perspektif-perspektif jangka panjang untuk keputusan-

keputusan yang diambil, tetapi juga mengerti perlunya melepaskan rencana-rencana bila keadaan berubah. Taiwan misalnya mempunyai suatu rencana tahunan, suatu rencana empat tahun, suatu rencana sepuluh tahun dan suatu rencana dua puluh tahun, tetapi menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendadak secara luwes. Kompetensi administratif ini adalah kunci sukses-sukses lampau dan prospek-prospek mendatang.

Kawasan kebudayaan Cina itu meliputi Cina, Jepang, kedua Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Vietnam dan secara terbatas juga Muangthai. Di mana keadaan khusus tidak menghambat pertumbuhan cepat, negara-negara itu waktu belakangan ini mengalami pertumbuhan sekitar 10% setahun. Kekecualian utama adalah Cina, di mana tangan besi birokrasi dan pergolakan politik menekan pertumbuhan; Vietnam di mana pertumbuhan lamban akibat perang; dan Muangthai di mana hanya di Bangkok dan sekitarnya kebudayaan Cina menguasai perekonomian. Hasil ekonomi Cina adalah lumayan biarpun dibebani besarnya negara, birokratisasi, pergolakan politik dan ideologi. 1 Kecuali Cina sampai meninggalnya Mao, kawasan kebudayaan Cina ini lapar akan modal dan keahlian managerial Jepang dan mengalami pertumbuhan 10% selama satu dasawarsa. Mujizat ekonomi Jepang menjadi mujizat ekonomi kebudayaan Cina. Para penarik riksha sepuluh tahun berselang kini mengemudikan mobil-mobil mereka sendiri.

Pertumbuhan ekonomi kebudayaan Cina itu akan mempercepat pertumbuhan di Australia dan Selandia Baru, lagi pula akan menunjang perkembangan Brasilia, dan sampai batas-batas tertentu Kanada serta Siberia, di mana terdapat cadangan bahan mentah yang besar untuk menggerakkan pertumbuhan kebudayaan Cina.

Untuk evaluasi baru lihat Dwight Perkins, "Looking Inside China: An Economic Appraisal", Problems of Communism, Mei-Juni 1973. Laju pertumbuhan Cina adalah separuh laju pertumbuhan negara-negara kebudayaan Cina lain, tetapi masih lumayan

Sejak periode yang paling awal, menanjaknya Kawasan Pasifik bergantung pada perkembangan teknologi, khususnya teknologi pengangkutan samudera. Pengangkutan samudera ini selalu lebih murah daripada pengangkutan darat, tetapi sampai periode sebelum perang, Samudera Pasifik, yang merupakan 75% permukaan air dunia dan lebih dari separuh bumi, adalah rintangan dan pengasing Jepang dan negara-negara kepulauan lain. Kini dia adalah integrator karena pengangkutan samudera menjadi lebih murah daripada pengangkutan darat dan cukup cepat sehingga menjadi efisien. Sekarang adalah lebih murah mengirimkan mobil dari Yokohama ke San Fransisko dari pada dari Detroit, lebih murah mengirimkan batu bara dari pantai Barat Amerika Serikat ke Jepang daripada ke pantai Timur Amerika Serikat, lebih murah mengangkut batu bara dari Hampton Road ke Tokio daripada Osaka ke Tokio. Pengangkutan lewat Samudera Pasifik biayanya dapat dibandingkan dengan pengangkutan lewat Samudera Atlantik. Demikianpun komunikasi tilpun menjadi lebih murah dengan tersedianya komunikasi lewat satelit. Kawat lewat Samudera Atlantik adalah lebih murah daripada lewat Samudera Pasifik, yang terlalu besar. Komunikasi satelit membuat sama murahnya menilpun Bogota dari Tokio seperti menilpun Osakadari Tokio. Pengangkutan supersonis kiranya tidak membuat banyak perbedaan dalam pengangkutan di Atlantik Utara, tetapi sangat banyak perbedaan di Pasifik dengan mengurangi separuh waktu terbang. Perubahan teknologi ini adalah di belakang geiala ekonomi dan politik yang membuat kita melihat Kawasan Pasifik sebagai suatu kesatuan.

Tahap Ketiga: Perkembangan Asia Tenggara dan Amerika Latin

Menanjaknya kawasan kebudayaan Cina adalah sejalan dengan menanjaknya Jepang sebagai suatu kekuatan ekonomi yang besar, dan merupakan rekapitulasi sebagian besar sejarah perkembangan ekonomi Jepang. Transistor-transistor hasil Taiwan semakin menggeser transistor-transistor buatan Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea telah menjadi pembangun kapal

yang penting. Tekstil Taiwan dan Korea membanjiri pasaran dunia. Apabila proses ini mencapai puncaknya, seluruh kawasan akan menghadapi masalah-masalah seperti yang dihadapi Jepang dewasa ini — termasuk surplus perdagangan yang sangat besar dengan Amerika Serikat, perubahan sosial yang cepat, pengotoran dan kekurangan tenaga kerja. Kawasan kekurangan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja akan meningkat dengan cepat. Kenyataannya biaya tenaga kerja telah mulai meningkat secara cukup dramatis di Singapura dan Hong Kong, sedangkan Korea menghadapi tuntutan yang meningkat akan kenaikan upah. Seluruh kawasan akan menghadapi pilihan tiga arah: memperlambat pertumbuhan, mengimpor tenaga kerja asing yang murah, atau mengekspor industri ke tenaga kerja asing yang murah. Mereka kiranya tidak akan memilih pertumbuhan yang lebih lamban. Seperti Jepang akan mengimpor tenaga kerja dari Korea dan negara-negara lain (paling tidak untuk sementara waktu), demikianpun sementara negara kebudayaan Cina yang kecil mungkin akan mengimpor tenaga kerja Asia Tenggara. Singapura telah mengimpor tenaga kerja Malayu. Tetapi karena alasan-alasan perdamaian sosial, stabilitas politik dan efisiensi ekonomi, pilihan yang dominan ialah mengekspor industri ke Asia Tenggara dan Amerika Latin.

Tahap ekspor ini tidak akan seantusias ekspor industri Jepang ke kawasan kebudayaan Cina, karena tenaga kerja Asia Tenggara dan Amerika Latin tidak sekompeten dan serajin ataupun setenang secara politik tenaga kerja kawasan kebudayaan Cina. Karena alasan-alasan kebudayaan dan politik ekspor industri ini juga tidak akan disambut se-entusias. Kebudayaan Asia Tenggara tidak semudah menyesuaikan diri dengan organisasi, disiplin dan ketrampilan yang dibutuhkan industrialisasi seperti lawan kebudayaan Cinanya. Masyarakat-masyarakat Asia Tenggara dan Amerika Latin tidak mempunyai conditioning organisasi hirarkis maupun keuletan politik kebudayaan Cina.

Mereka juga kurang senang menyambut investasi asing. Mereka lebih cepat menghubungkan investasi dengan pemerasan. Mereka tidak senang dengan kekuatan ekonomi orang-orang Cina perantauan di negara-negara mereka dan di Singapura. Mereka lebih tidak senang dengan pengotoran. Karena kurang percaya diri dan kerap kali kurang mantab, mereka takut akan manipulasi politik sebagai akibat pengaruh ekonomi asing. Secara demikian mereka menerima lebih sedikit investasi. Apabila menerima investasi, mereka lebih mudah membiarkan ketakutan politik dan rasa tidak senang mendorong mereka untuk melakukan nasionalisasi atau menjebak perusahaan-perusahaan dengan pita merah.

Akan tetapi kekuatan-kekuatan lain menjadi semakin besar melawan hambatan-hambatan arus investasi itu. Meningkatnya kesatuan nasional dan percaya diri di kawasan pada waktunya akan mengurangi ketakutan akan manipulasi politik secara berangsur-angsur. Munculnya suatu generasi teknokrat yang kompeten akan merasionalisasi proses pengambilan keputusan dan boleh jadi mengurangi pita merah. Selain itu, suatu pembangunan yang berhasil telah menciptakan suatu elan yang mempermudah perkembangan cepat. Di Taiwan frustrasi diplomasi sangat ditekan dengan menekankan laju pertumbuhan yang luar biasa. Di Pilipina, suatu negara Katolik dimana sampai berapa tahun yang lalu pengaturan kelahiran hampir secara umum dianggap sebagai tak terpikirkan, konstitusi baru menetapkan sebagai suatu tanggung jawab pemerintah yang penting mempertahankan suatu tingkat penduduk yang optimal. Di Korea Utara suatu reorganisasi pemerintahan mengurangi jumlah kementerian dari tiga puluh satu menjadi lima belas, tetapi menambahkan dua kementerian ekonomi baru. Di Singapura orang-orang Melayu tiba-tiba mulai mengikuti kurikula bahasa Inggeris karena keinginan mereka untuk ikut dalam take off ekonomi meningkat. Di seluruh kawasan keberhasilan menghasilkan moral tinggi, yang pada gilirannya mendatangkan sukses.

Keberhasilan ekonomi melestarikan dirinya sendiri, karena negara-negara dinamis merupakan pasar satu sama lain, saling meniru kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang berhasil, dan mengembangkan komunikasi serta organisasi regional. Sebagai akibat dinamisme kebudayaan Cina, perdagangan dan investasi negara-negara Kawasan Pasifik menjadi semakin terarah pada negara-negara di kawasan, dan secara demikian kawasan menjadi suatu kesatuan ekonomi yang semakin terpadu. Amerika Utara dan Selatan, dan Asia Timur Laut maupun Tenggara nonkomunis, mau tak mau menjadi semakin terjalin satu sama lain.

Uni Soviet dan RRC (selama Mao berkuasa) hanya secara terbatas ikut dalam proses ini, biarpun tenaga kerja Cina, sumber-sumber daya Siberia dan organisasi serta modal Jepang sangat saling melengkapi. Kalau RRC atau Uni Soviet ikut serta secara penuh dalam Kawasan Pasifik, perkembangan politik kawasan akan berubah secara dramatis, dan arus modal yang merangsang perkembangan Korea, Taiwan dan Asia Tenggara akan beralih ke Cina. Akan tetapi ketakutan keamanan nasional, kebutuhan-kebutuhan pengawasan politik dalam negeri, dan nilai-nilai ekonomi yang berlainan (selama Mao berkuasa) membatasi partisipasi Cina maupun Uni Soviet. Akan tetapi partisipasi mereka-kiranya akan meningkat, dan dapat dibayangkan bahwa mereka akan terpaksa bersaing mengembangkan Siberia dan Manchuria. I

II. SERI-SERI POLITIK KAWASAN PASIFIK

Perkembangan ekonomi Kawasan Pasifik itu untuk sebagian besar bergantung pada persyaratan-persyaratan politik kunci dan pemecahan masalah-masalah politik yang timbul akibat perkembangannya. Masalah-masalah timbul di negara masing-masing, di antara negara-negara kecil, di antara negara-negara besar, dan antara negara-negara besar dan kecil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, kita dapat membatasi Kawasan Pasifik sebagai suatu kelompok negara dengan ekonomi terbuka, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan kebanyakan negara Asia Tenggara serta Amerika Latin. Lebih dari separuh perdagangan dan investasi negara-negara itu dilakukan satu sama lain.

Masing-masing jenis masalah ini dapat menjadi serius, tetapi juga dapat diperbaiki dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang cukup kompeten.

Pertumbuhan dan Stabilitas

Suatu proses ekonomi yang begitu dinamis seperti perkembangan Kawasan Pasifik itu akan mendatangkan perubahan-perubahan sosial yang mendalam, yang pada gilirannya akan mempengaruhi politik di negara-negara kawasan dan antara mereka. Sifat akibat-akibat politik ini sama sekali tidaklah jelas. Dua dasawarsa berselang orang mengira bahwa perkembangan ekonomi dengan sendirinya akan meningkatkan stabilitas. Kemudian para ahli menyadari bahwa perubahan sosial fisruptif akibat perkembangan ekonomi yang cepat menimbulkan tekanan-tekanan politik dalam masyarakat dan memberikan sumber-sumber daya baru kepada kelompok-kelompok yang tidak puas. Akan tetapi pemerintah yang luwes seharusnya dapat memanfaatkan perbaikan komunikasi, kepemimpinan dan lain sebagainya, yang juga digunakan oleh kelompok-kelompok pembangkang.

Masyarakat-masyarakat yang mempunyai (1) birokrasi pemerintah pusat yang kuat, dan (2) sistem-sistem partai yang menjalin pemerintah dengan rakyat kiranya mampu memanfaatkan sumber-sumber daya tambahan hasil pembangunan dan tetap lebih kuat daripada calon-calon kelompok pembangkang. Secara yang berbeda negara-negara demokrasi maupun komunis yang matang mempunyai persyaratan-persyaratan stabilitas ini. Diktatur dan rezim militer kerap kali tidak mempunyainya. Akan tetapi di seluruh Asia bagian Timur efisiensi pemerintah pusat terus meningkat dan garis-garis komunikasi antara pusat dan daerah semakin banyak. Kedua, sementara negara mempunyai daya tahan yang lebih besar terhadap disrupsi-disrupsi pembangunan daripada negara-negara lain. Negara-negara kebudayaan Cina boleh jadi lebih terbuka untuk masalah-masalah semacam ini, yang mempunyai contohnya dalam per-

tumbuhan cepat dan gerak-gerak liar pendulum politik yang melibatkan Jepang dalam Perang Dunia II. Gejala ini hanya dapat menjadi masalah di beberapa negara, yang kebanyakan kecil, tetapi pencegahannya dan penyelesaian akibat-akibat internasionalnya pada suatu saat bisa menjadi sasaran utama negara-negara kawasan, khususnya negara-negara besar.

Neo-Imperialisme

Negara-negara kecil sudah barang tentu tidak senang dengan ketergantungan yang nyata atau persepsinya akibat dominasi perdagangan dan investasi mereka oleh satu negara besar atau suatu kombinasi beberapa negara besar, biarpun perdagangan dan investasi itu mempercepat perkembangannya mereka sendiri. Setelah perdagangan Jepang melebihi perdagangan Amerika, masalah ini menjadi sangat akut karena perusahaan-perusahaan Jepang melakukan permainan ekonomi secara kejam. Cerita-cerita taktik Jepang yang menakutkan muncul sebagai jamur di seluruh Asia Tenggara. Dilaporkan bahwa orang-orang Jepang sangat murah dengan sogokan. Kadang-kadang mereka membangun proyek-proyek nasional yang penting di salah satu negara Asia Tenggara dengan material yang begitu jelek sehingga dilarang di Jepang. Mereka membiarkan pengusaha-pengusaha mengembangkan pasaran lokal untuk barang-barang jadi Jepang dan kemudian merebut pasaran itu secara yang mengakibatkan bangkrutnya pengusahapengusaha lokal. Mereka mendirikan perusahaan-perusahaan patungan dan kemudian memanipulasi pasaran untuk membangkrutkannya dan mengambil alih seluruh pemilikan. Tidak semua perusahaan Jepang bertindak secara itu, tetapi bahkan beberapa saja memancing suatu reaksi yang keras. Reaksi ini memperbesar reaksi yang telah penting akibat besarnya perusahaan-perusahaan itu. Bahwa reaksi serupa itu, yang di masa lampau pertama-tama diarahkan terhadap orang-orang Amerika, kini diarahkan pada Jepang bukanlah suatu hiburan bagi Amerika Serikat. Perkembangan Kawasan Pasifik dan

prospek stabilitasnya begitu penting bagi Amerika Serikat dan begitu dipengaruhi oleh sengketa itu, sehingga Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk mengurangi sengketa ini.

Bermacam-macam kekuatan memperlunak pergesekan itu. Kekuatan negara-negara kecil di Asia dan Amerika Latin adalah lebih besar daripada di masa lampau sehingga manipulasi asing hanya dapat terjadi secara terbatas. Nasionalisasi adalah begitu mudah, nasionalisme memberikan banyak dukungan kepada pemimpin-pemimpin yang menantang manipulasi asing, dan sikap moral internasional begitu menentang intervensi yang keras, sehingga manipulasi dan reaksi lokalnya pada hakikatnya terbatas.

Regionalisme meningkatkan kekuatan negara masingmasing. Perkembangan ekonomi Kawasan Pasifik akan meningkatkan interdependensi kawasan, dan secara demikian merangsang organisasi regional. Kontak-kontak politik dan bisnis akan semakin banyak, dan pariwisata akan sangat menambah interaksi dan pergesekan kebudayaan di antara negara-negara kawasan. Dasawarsa 1970-an dikuasai persoalanpersoalan ekonomi, tetapi pada akhir dasawarsa ini dan awal 1980-an kiranya akan timbul kesadaran politik regional tertentu. Kelompok-kelompok seminar dan studi telah mulai berkembang, termasuk komite-komite regional Hudson Institute dan kelompok-kelompok seperti Komite Ekonomi Kawasan Pasifik. Pada tahap kedua bisa muncul kelompok-kelompok koordinasi perdagangan dan investasi yang tidak resmi; mengingat adanya perpecahan antara daerah perdagangan dan investasi Kawasan Pasifik di satu pihak dan daerah perdagangan serta investasi Eropa di lain pihak, kelompok-kelompok yang keanggotaannya mengungkapkan perpecahan-perpecahan antara kedua daerah itu kiranya akan muncul dan melebihi kelompok-kelompok seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang berusaha menghimpun seluruh dunia non komunis yang maju. Ketiga, kelompok-kelompok koordinasi tidak resmi itu akhirnya bisa dijadikan resmi dan dilembagakan secara yang mengungkapkan garis-garis pokok celah antara

negara-negara Kawasan Pasifik. Suatu dewan koordinasi investasi dan perdagangan yang resmi serupa itu bisa dipecah menjadi satu kelompok negara besar dan satu kelompok negara kecil yang berunding satu sama lain. Pada tahap keempat integrasi bisa diciptakan 'aturan-aturan permainan' untuk menyusun dan mewasiti persaingan ekonomi dan persoalan-persoalan ekologi. Akhirnya adalah mungkin bahwa sebagian besar Kawasan Pasifik akhirnya menjadi suatu masyarakat perdagangan dan investasi tertentu seperti zone perdagangan bebas, uni bea cukai atau pasaran bersama. Kemungkinan besar pada tahun 1980-an negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara akan merasa mempunyai suatu hubungan bersama serangkaian masalah bersama terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian regionalisme kiranya akan berkembang menurut garis-garis fungsional, bukan garis-garis geografis semata-mata.

Dari berbagai bentuk kerja sama regional — ekonomi, politik, militer dan kultural — kerja sama ekonomi ternyata yang paling mudah diwujudkan. Proyek-proyek pembangunan regional, standar-standar investasi regional, standar-standar ekologi regional dan seterusnya dapat sangat memperkuat tangan negara-negara kecil dan sangat memantabkan hubungan-hubungan politik ekonomi regional demi keuntungan negara-negara besar maupun kecil. Akan tetapi pandangan prospek regionalisme yang membesarkan hati ini harus diimbangi dengan pengakuan bahwa regionalisme akan berkembang secara berangsur-angsur, bahwa dia di masa mendatang ini tidak akan mempunyai arti militer, dan bahwa meningkatnya interaksi dan interdependensi regional dapat merangsang sengketa maupun kerja sama.

Secara paradoksal, adanya dua kekuatan ekonomi di kawasan, yaitu Amerika Serikat dan Jepang, dan bukannya satu, seharusnya juga memperkuat kedudukan negara-negara kecil. Persaingan intensif antara perusahaan-perusahaan Amerika dan Jepang akan memberi peluang kepada negara-negara kecil untuk memainkan yang satu melawan yang lain. Persaingan Amerika

akan membiarkan Jepang berpijak di Asia Tenggara, dan Jepang akan menjadi suatu kekuatan besar di Amerika Latin. Pada tahun 1980-an investasi Jepang di Brasilia seharusnya melebihi investasi Amerika Serikat.

Sikap negara-negara besar juga bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan pergesekan. Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang awal 1973 berjanji akan mengembangkan kode etik bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di luar negeri. Meningkatnya tekanantekanan politik di Amerika Serikat dan unsur-unsur simpatik birokrasi-birokrasi kunci bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan Amerika. Akhirnya, rasa takut irasional di Asia Tenggara, bahwa investasi Jepang pasti akan disusul oleh tekanan-tekanan militer, bisa dikurangi dengan dipertahankannya beberapa pangkalan Amerika Serikat di Asia Tenggara biarpun pangkalan-pangkalan itu tidak mempunyai peranan anti Jepang.

Sengketa-sengketa Politik Negara Kecil Kawasan

Kini maupun di masa lampau kita mudah membuat skenario-skenario kesulitan serius di hampir setiap negara Asia Tenggara. Yang telah berubah sejak banyak tahun ialah luasnya pengaruh kejadian-kejadian serupa itu atas seluruh kawasan. Pada tahun 1950 orang bisa menulis suatu teori domino yang dapat dipercaya, mengingat sangat melemahnya pemerintah-pemerintah dan kohesi sosial dalam waktu perang di hampir setiap negara. Pada tahun 1965 teori serupa itu hanya dapat dipercaya untuk daratan Asia Tenggara, biarpun sampai 1965 orang masih bisa percaya akan kemungkinan transformasi yang cukup mendadak dalam sifat politik kawasan — mengingat adanya kemungkinan tahun itu bahwa akan sekaligus terjadi kemenangan Vietnam Utara di Indocina dan kemenangan PKI di Indonesia. Kini teori-teori domino yang megah tampak tak masuk akal, dan krisis-krisis tahun 1965 kiranya tidak akan terulang biarpun mungkin. Dengan demikian mendidihnya

keadaan politik di Asia Tenggara kiranya tidak akan menghentikan pertumbuhan kawasan. Demikianpun di Amerika Latin orang dapat membayangkan suatu trend ke arah pemerintah-pemerintah kiri atau nasionalis ekstrim, tetapi tidak pada tingkat yang akan menghentikan perkembangan yang menyeluruh di kawasan.

Kesulitan-kesulitan di Jepang

Bahwa perkembangan Kawasan Pasifik bisa sangat dihambat oleh kejadian-kejadian politik dalam negeri Jepang tidak dapat dianggap sepi. Sesuatu seperti rencana Perdana Menteri Tanaka (waktu berkuasa) harus dilaksanakan untuk menjamin agar perkembangan Jepang berjalan terus tanpa disrupsi sosial. Tetapi berbagai keadaan menghambat pelaksanaan rencana raksasa itu. Kebanyakan cendekiawan menerima pendapat bahwa, karena pertumbuhan yang cepat menimbulkan masalahdan ekologi, satu-satunya masalah sosial cara memecahkan masalah-masalah itu ialah memperlambat pertumbuhan; dalam kenyataan kebalikannya adalah benar, tetapi keputusan-keputusan lebih bergantung pada kepercayaan daripada kenyataan. Publikasi rencana itu dikaitkan dengan inflasi harga tanah besar-besaran dan dengan berita-berita profiteering, yang keduanya merangsang oposisi masyarakat terhadapnya. Kecurigaan terhadap pemerintah dan cepat melemahnya kedudukan Tanaka menimbulkan keragu-raguan apakah dia dan bahkan partainya bisa mengumpulkan kekuasaan dan kemauan untuk melaksanakan rencana sebesar itu. Lagi pula, mengingat bahwa oposisi berhasil mendapatkan jabatan-jabatan dan mematikan prakarsa-prakarsa politik yang penting, orang tidak dapat menganggap sepi kemungkinan tibanya suatu periode ketidakstabilan politik atau munculnya suatu koalisi yang tidak menekankan pertumbuhan atau begitu mengganggu hubungan-hubungan dengan Amerika Serikat sehingga perkembangan kawasan menghadapi disrupsi. Di lain pihak orang bisa membayangkan bahwa bahkan suatu pemerintah non LDP berhasil melaksanakan bagian-bagian kunci kesejahteraan, prasarana dan anti pengotoran dari rencana Tanaka. Dan laju pertumbuhan yang tinggi di antara negaranegara lain kiranya akan dirangsang dan didukung ekspor modal Jepang bahkan kalau pertumbuhan dalam negeri Jepang sangat menurun.

Krisis Energi yang Berlarut-larut

Suatu krisis energi serius yang berlatur-larut bisa memperlambat atau menghentikan pertumbuhan Jepang dan negaranegara kebudayaan Cina tetangganya. Kenyataannya, kalau suplai minyak Jepang dikurangi untuk waktu lama, Jepang hampir pasti akan memberikan prioritas pertama kepada kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dan menghentikan suplai bahan-bahan petrokimia kunci bagi negara-negara tetangganya. Akibat penghentian itu atas Taiwan dan Korea, yang telah membangun industri petrokimia dan kapal secara besar-besaran, akan benarbenar mengalami bencana. Dalam kenyataan, skenario Kawasan Pasifik akan mundur dan pergolakan politik akan menyusul bencana ekonomi itu. Akan tetapi terlalu pagi untuk mengandaikan bahwa bencana itu akan terjadi.

Sengketa-sengketa Negara Besar

Suatu peperangan serius antara negara-negara besar jelas akan menghambat perkembangan kawasan. Di masa lampau kemungkinan yang paling besar ialah bentrokan antara Amerika Serikat melawan RRC atau Uni Soviet. Akan tetapi dewasa ini semua negara besar menganut politik seperti doktrin Nixon, yaitu politik dukungan moral, ekonomi dan teknologi bagi teman-teman mereka di kawasan sambil menghindari keterlibatan militer yang langsung. Sebagai hasilnya kemungkinan konfrontasi menjadi kecil. Kini kemungkinan konfrontasi negara besar yang paling besar adalah perang Cina Soviet, dan kita tidak dapat menganggap sepi kemungkinan ini, tetapi dalam proses eskalasi ini konflik rupanya menjadi kurang volatil.

Tidaklah sulit membayangkan sengketa negara besar lain di hari depan. Usaha Jepang untuk mencapai hegemoni ekonomi di Asia Tenggara bentrok dengan ambisi-ambisi politik Cina di Kawasan. Antara Jepang dan RRC maupun Uni Soviet terdapat sengketa teritorial dan lain-lain yang telah lama tetapi dewasa ini laten. Cepat menanjaknya Jepang, seperti cepat menanjaknya Prusia seabad berselang, hampir dengan sendirinya dapat memancing tanggapan bermusuhan dari Cina dan Uni Soviet, khususnya karena sukses ekonomi biasanya secara berangsurangsur menterjemahkan dirinya dalam kekuatan politik dan militer. Persaingan untuk mendapatkan pengaruh atas Korea menjadikan negeri ini titik bakar abadi di segitiga kekuasaan Asia Timur Laut, dan volatilitas situasi Korea akan sangat meningkat kalau Amerika Serikat menarik kekuatan militernya dari Kawasan. Secara lebih umum, kemungkinan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Asia Timur akan membuat masing-masing dari ketiga negara besar di kawasan kurang aman dan menjadikan sengketa-sengketa lebih volatil. Akan tetapi kalau kita harus menempatkan taruhan, kita akan menduga bahwa dalam dasawarsa mendatang ini tidak akan terjadi perang besar-besaran di Kawasan Pasifik.

Hubungan Jepang-Amerika

Persahabatan dan kerja sama politik-militer-ekonomi Jepang-Amerika sudah tidak bisa dianggap soal biasa. Ketidaksabaran Amerika dengan lambannya penyingkiran hambatan-hambatan perdagangan dan investasi dan revaluasi Yen kerap kali bersama-sama dengan tiadanya perhatian untuk kepentingan-kepentingan Jepang¹ merugikan persahabatan Jepang-Amerika. Demikianpun orang-orang Jepang sangat lamban menyadari tanggung jawab yang mereka dapat ketika Jepang berubah dari negara kecil menjadi negara besar. Yang dimaksud ialah tanggung jawab untuk stabilitas moneter internasional, ekologi, bantuan pembangunan, dan untuk mengurangi kekerasan taktik ekonomi mereka di negara-negara kecil.

¹ Lebih lanjut lihat W. Overholt, "President Nixon's Trip to China and Its Consequences", Asia Survey, Juli 1973

Ketidaksamaan

Akhirnya, perkembangan kawasan sangat bergantung pada meningkatnya ketidaksamaan ekonomi antara negara-negara. Ekspor industri, yang merangsang perkembangan cepat di daerah-daerah baru, terjadi karena negara-negara tertentu jauh lebih berhasil dalam pembangunan mereka daripada negara-negara lain sehingga biaya tenaga kerja meningkat di luar proporsi.

Sayang bahwa meningkatnya ketidaksamaan itu hampir pasti tidak dapat dihindari kecuali dengan mengorbankan suatu periode perkembangan ekonomi yang akan memungkinkan sebagian besar umat manusia mencapai taraf hidup yang wajar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Biaya itu tidak akan dapat diterima oleh orang-orang yang lebih miskin di kawasan. Apabila seluruh kawasan mengalami modernisasi, mudah dibayangkan bahwa ketidaksamaan akan berkurang. Kenyataannya kebudayaan-kebudayaan Asia Tenggara dan bentuk-bentuk organisasinya mungkin lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan post-industri daripada kebudayaan Cina dan Amerika Utara. Akan tetapi itu masih sangat jauh. Sementara itu ketidaksamaan bisa diperlunak tetapi tidak dapat dilenyapkan. Ini tidak menyenangkan tetapi tidak begitu tak menyenangkan untuk menghapus hasil-hasil positif perkembangan kawasan vang luar biasa.

Ketidaksamaan serupa itu kiranya tidak akan menimbulkan ketidakstabilan regional. Dia akan menimbulkan pergesekan sebagai akibat protes kaum cendekiawan dan kelompok-kelompok politik kelas menengah. Dia pasti akan mempercepat munculnya huru-hara anti Jepang dan Anti Cina. Akan tetapi sebagai keseluruhan dicapainya keberhasilan sedikit banyak akan mengurangi rasa tidak senang dengan sukses lain-lain yang lebih besar, dan paling tidak di Asia Timur kiranya akan selalu diakui bahwa sukses Jepang dan kebudayaan Cina yang lebih besar adalah hasil kerajinan dan kompetensi yang lebih besar. Yang paling penting ialah bahwa ketidaksamaan internasional terlalu

jauh dari perhatian kebanyakan orang untuk merangsang rasa tidak puas di luar kelompok-kelompok elite kecil tertentu.

Semua hubungan politik ini cukup delikat sehingga membutuhkan perhatian terus menerus. Menanjaknya Kawasan Pasifik sangat menguntungkan Amerika Serikat, negara-negara kawasan lainnya, dan akhirnya seluruh dunia. Kawasan ini mempunyai momentumnya sendiri, tetapi momentum itu dapat berubah menjadi bencana akibat keputusan-keputusan yang picik. Yang paling penting dan delikat dari semua persoalan politik adalah hubungan Amerika dengan Jepang. Kerja sama politik militer Jepang-Amerika dapat memelihara perdamaian di kawasan. Sebaliknya salah paham dapat memancing permusuhan dan ketidakstabilan di seluruh dunia. Amerika Serikat telah melakukan kesalahan-kesalahan serius dalam hubungan mereka. Harapan utama untuk Kawasan Pasifik ialah bahwa berkat kerja sama adalah begitu luar biasa dan biaya permusuhan juga begitu luar biasa sehingga menjadi jelas bahwa orang harus bekerja sama.

Menggariskan berkat-berkat kerja sama dan biaya-biaya kegagalannya itu adalah motif utama ulasan ini. Sebagian cerita Kawasan Pasifik adalah sejarah, tetapi ketidakpastian-ketidakpastian dan hambatan-hambatan mendatang menjadikan ramalan-ramalan riskan. Soalnya ialah bahwa hambatan-hambatan itu bisa diatasi dengan keputusan yang cukup baik. Mudah-mudahan disadarinya kemungkinan-kemungkinan perkembangan Kawasan Pasifik yang baik paling tidak sebagian merupakan suatu ramalan yang menjadi kenyataan, dan disadarinya biaya-biaya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kurang kooperatif akan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sempit dan picik kurang menarik dan secara demikian memperkecil kemungkinan terwujudnya skenario-skenario bencana yang disinggung di atas.

ANALISA MENGENAI PASIFIK BARAT DALAM TAHUN 1980-AN

Jusuf WANANDI

PENDAHULUAN

Walaupun situasi Kawasan Pasifik Barat pada saat ini masih belum menentu, tetapi beberapa perkembangan terakhir bisa dijadikan dasar untuk membuat perkiraan tentang arah gerak dari kawasan ini. Dalam tulisan ini dicoba untuk menilai arah perkembangan Kawasan Pasifik Barat menuju dasawarsa yang akan datang, yaitu dalam tahun 1980-an. Penulis berpendapat bahwa tanda-tanda (indikator) serta alur perkembangan (trend) yang dapat diamati sekarang ini akan cukup berarti bagi keadaan di masa depan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masih akan terjadi perubahan-perubahan, terutama karena cepatnya perkembangan-perkembangan di kawasan ini.

Dalam menilai arah perkembangan Kawasan Pasifik Barat terdapat beberapa gejala baru yang dapat dijadikan titik tolaknya. Gejala baru yang pertama menyangkut masalah hubungan ekonomi dalam kawasan ini, baik hubungan ekonomi antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang maupun hubungan ekonomi antara negara-negara di bagian Utara Kawasan Pasifik Barat dengan negara-negara di bagian Selatan kawasan tersebut. Dalam masalah ini perlu diteliti peranan ekonomi yang akan dimainkan oleh RRC. Demikian pula pengaruh dan peranan ASEAN sebagai suatu kerja sama regional. Salah satu persoalan utama ialah sejauh mana

kebijaksanaan-kebijaksanaan negara-negara Pasifik Barat akan menghasilkan hubungan ekonomi yang membawa kegoncangan dan bukannya menghasilkan suatu kerangka kerja sama yang mendorong kestabilan dan perdamaian di kawasan tersebut. Kawasan Pasifik Barat pada saat ini merupakan kawasan yang berada dalam perkembangan yang paling cepat dan dinamis dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari laju pembangunan masing-masing negara kawasan tetapi juga dalam bidang perdagangan antar negara.

Gejala baru yang kedua menyangkut perkembanganperkembangan di dalam negeri negara-negara Pasifik Barat, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah ini berkenaan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta nilai-nilainya sebagai akibat logis dari proses modernisasi dan pembangunan. Selain itu terdapat beberapa masalah pokok, seperti persoalan kelangsungan dan peralihan (transfer) pimpinan nasional mengingat institusi sosial-politik yang belum mantap, persoalan kesatuan bangsa mengingat adanya masalah minoritas yang berbagai ragam (minoritas suku, minoritas agama, dan sebagainya). Kesemuanya ini akan mempengaruhi perkembangan Kawasan Pasifik Barat. Selama dasawarsa tahun 1970-an ini persoalan-persoalan di atas tidak mendapat perhatian utama. Tetapi setelah pengalaman di Iran menjadi semakin jelas dan konkrit bahwa secara potensial, pergolakan di dalam negeri mengakibatkan gejolak dalam hubungan internasional, dan bahwa pengaruh ini bisa cukup dahsyat.

Gejala baru yang ketiga berkaitan dengan timbulnya "aliansi-aliansi" (persekutuan-persekutuan) baru yang bisa mendukung stabilitas kawasan dalam tahun 1980-an tetapi tidak dapat ditutup kemungkinan bahwa perkembangan ini dapat menghasilkan pertentangan-pertentangan baru yang membawa ketidakstabilan bagi kawasan ini. Persekutuan Amerika Serikat dengan Jepang dan RRC di satu pihak dan Uni Soviet di pihak lain cenderung untuk menghasilkan ketidakstabilan apabila Uni Soviet merasa terpojok atau dipojokkan. Menghadapi keadaan ini Uni Soviet bisa memberikan beberapa jawaban, misalnya (a) dengan meningkatkan kekuatan militernya; atau, (b) dengan

mengadakan aliansi-aliansi baru dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Yang terakhir disebutkan ini misalnya telah dilakukan dengan Vietnam, melalui mana Uni Soviet berusaha mempertahankan dan memperbesar pengaruhnya di kawasan tersebut, dan yang telah memberikan kepadanya kemungkinan untuk melakukan tekanan-tekanan militer terhadap wilayah sekitarnya atau untuk mematahkan jalur vital logistik negaranegara tertentu, seperti Jepang, dan mencoba menghapuskan pengaruh kekuatan Armada Ketujuh Amerika Serikat.

Pada saat ini Amerika Serikat mengambil sikap yang cukup berhati-hati, khususnya agar hubungannya yang baru dengan RRC tidak dilihat sebagai suatu aliansi yang ditujukan untuk menghadapi Uni Soviet. Tampaknya hal ini sukar diyakini oleh Uni Soviet. Bagi ASEAN perkembangan baru ini akan menimbulkan pertanyaan, yaitu dalam bentuk apa dan di mana ASEAN akan melibatkan dirinya dalam berbagai kemungkinan aliansi di hari yang akan datang. Pada prinsipnya kiranya sudah jelas bahwa ASEAN akan berusaha menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga tidak terlibat dalam pertentanganpertentangan yang mungkin timbul antara kekuatan-kekuatan tersebut di atas. Salah satu persoalan, dan hal ini harus diakui, adalah bahwa bila kita berbicara mengenai hubungan ekonomi, maka dengan sendirinya ASEAN mempunyai hubungan yang jauh lebih besar dengan Amerika Serikat dan Jepang dibandingkan dengan Uni Soviet, sehingga tidak dapat dihindarkan tafsiran bahwa ASEAN lebih condong kepada aliansi segi tiga di atas.

Gejala baru yang keempat adalah meningkatnya kompleksitas hubungan antara negara. Dengan perkembangan ini semakin menjadi jelas bahwa hubungan antar negara tidak seluruhnya dapat lagi diandalkan dalam bidang sekuriti seperti yang terjadi dalam tahun 1960-an. Dewasa ini semakin jelas terlihat kaitan antara bidang sekuriti dengan bidang ekonomi dan sosial, dan malahan dengan masalah-masalah nilai-nilai budaya. Namun demikian, dalam perkembangan sekarang ini bidang sekuriti tidak dapat dikecilkan artinya, karena pada

akhirnya masalah keamanan merupakan faktor dasar dalam mengatur hubungan-hubungan yang memungkinkan perkembangan kawasan terjamin stabilitas dan pembangunannya. Tidak dapat diingkari bahwa perkembangan politik dan ekonomi yang teratur hanya bisa dilaksanakan dengan suatu landasan kuat, yaitu keamanan. Mengenai situasi keamanan di kawasan ini, walaupun semakin jelas terlihat adanya pertentangan antara Uni Soviet dengan RRC, pertentangan RRC dengan Vietnam, dan pertentangan antara Vietnam dengan Kamboja, tetapi situasi ini tetap tidak jelas, dan tetap berbeda daripada situasi keamanan yang terdapat di medan Eropa. Perbedaan yang utama terletak dalam ketidakpastian mengenai pihak-pihak yang berhadapan. Perkembangan-perkembangan di Kawasan Pasifik Barat dalam bidang ini sukar diduga, faktor militer tidak konkrit seperti di medan Eropa, dan perkembangan sangat pesat, terutama setelah invasi Vietnam ke Kamboja. Dalam hal ini masalah utama adalah menjaga agar setiap situasi yang berkembang tidak berubah menjadi situasi yang gawat atau situasi krisis.

Faktor lain yang menambah kompleksitas hubunganhubungan di Kawasan Pasifik Barat ini adalah kenyataan bahwa Amerika Serikat bukan lagi merupakan kekuatan satu-satunya di kawasan ini, baik dalam bidang militer dan sekuriti maupun dalam bidang ekonomi. Dalam bidang militer kedudukan Amerika Serikat telah diimbangi oleh kekuatan militer Uni Soviet, sedangkan dalam bidang ekonomi kedudukan Amerika Serikat telah disaingi oleh Jepang dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan tumbuhnya ASEAN sebagai kekuatan ekonomi yang potensial.

I. HAKIKAT ANCAMAN DAN KETIDAKPASTIAN DI PASIFIK BARAT DALAM TAHUN 1980-AN.

Masalah pertama yang menimbulkan ketidakpastian adalah pertentangan antara Uni Soviet dengan RRC, dan bentuk-bentuk ancaman yang akan dihasilkannya. Pertentangan ini diperkirakan tidak akan mereda dalam beberapa tahun yang

akan datang dan ada kecenderungan bahwa pertentangan itu pada saat sekarang ini sedang mencapai suatu titik puncak yang setiap saat dapat meletus. Pertentangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, secara kumulatif sekarang telah mencapai suatu pertentangan yang kiranya akan dipertarungkan di Asia Tenggara.

Pertentangan ini tidak bisa dilepaskan dari konflik antara Vietnam dan Kamboja di mana Kamboja mendapat dukungan RRC dan Vietnam mendapat dukungan Uni Soviet. Selain atas alasan sejarah, yaitu untuk mempersatukan Indocina di bawah kekuasaannya, dengan adanya perjanjian dengan Uni Soviet (sejak Nopember 1978) itu Vietnam merasa tiba saatnya untuk menyelesaikan persoalan Kamboja secara tuntas, dan dengan demikian mengakhiri gangguan-gangguan yang secara terusmenerus di perbatasannya dengan Kamboja. Di pihak lain, dukungan RRC diberikan kepada Kamboja karena merasa bahwa Vietnam telah masuk ke dalam lingkungan pengaruh Uni Soviet dan mengambil peranan dalam pengepungan RRC oleh dan atas nama Uni Soviet. Oleh karenanya, dan ditambah oleh perlakuan Vietnam terhadap Cina perantauan, RRC meningkatkan tekanan terhadap Vietnam dengan cara memperbesar bantuannya kepada Kamboja, walaupun sebenarnya RRC kurang simpati terhadap rezim Pol Pot.

Serangan RRC terhadap Vietnam, menyusul invasi Vietnam ke Kamboja, antara lain dimaksudkan untuk tidak kehilangan muka dan bahwa RRC dianggap sebagai kekuatan yang tidak berarti di kawasan ini. Selain itu RRC juga beranggapan bahwa Vietnam harus diberi pelajaran agar tidak menjadi Kuba di kawasan ini yang bisa merajalela di masa yang akan datang. Menurut penilaian RRC, Kuba saat ini bisa merajalela karena dalam tahun 1962 dahulu tidak dihajar oleh Amerika Serikat. Dengan serangan ini RRC mungkin juga bermaksud menghindarkan bahwa di hari yang akan datang Vietnam akan menyediakan pangkalan-pangkalan bagi Uni Soviet guna melancarkan pengepungan terhadap RRC. Dalam kerangka ini, serangan tersebut dilihat sebagai suatu tindakan politik. Yang

menjadi masalah sekarang adalah sejauh mana tindakan RRC ini menyudutkan Vietnam sedemikian sehingga menjadi semakin tergantung dari Uni Soviet.

Masalah kedua yang menimbulkan ketidakpastian adalah jawaban Uni Soviet menghadapi perkembangan baru ini. Secara khusus perlu diperhitungkan apakah Uni Soviet pada saat ini merasa kehilangan muka. Jelas bahwa Uni Soviet tidak akan membiarkan RRC secara terus-menerus dan semakin jauh ke dalam wilayah Vietnam melakukan serangan-serangannya, apalagi bila Hanoi menjadi target. Bagi Uni Soviet memang tidak mudah untuk memamerkan realisasi dari perjanjiannya dengan Vietnam, tetapi tetap tersedia beberapa pilihan. Uni Soviet dapat melanjutkan dan meningkatkan bantuan persenjataan dan mengirimkan penasehat-penasehat militernya, dilengkapi dengan pengintaian-pengintaian melalui armadanya di lepas pantai Vietnam maupun melalui pesawat-pesawat udaranya. Uni Soviet juga dapat membantu Vietnam dengan jalan mengadakan tekanantekanan terhadap RRC di perbatasannya dengan Uni Soviet. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk menciptakan insiden-insiden perbatasan seperti di sepanjang Sungai Usuri (tahun 1969) ataupun menduduki atau membom pusat-pusat industri, pusatpusat tenaga nuklirnya seperti di Lop Nor (Sinkiang) ataupun pusat-pusat produksi minyaknya seperti di Taching (Manchuria). Serangan-serangan ini bisa juga ditingkatkan skalanya. Tampaknya Uni Soviet sangat berhati-hati membuat pilihan tindakan. Di samping itu, dengan menahan dirinya, Uni Soviet membiarkan opini dunia internasional berkembang sedemikian sehingga RRC dipersalahkan. Dengan demikian opini internasional yang sudah berakibat pada terisolirnya Vietnam akan diimbangi oleh kelakuan RRC akhir-akhir ini.

Menilai kemungkinan-kemungkinan yang ada, kiranya usaha yang utama dari negara-negara di kawasan ini adalah agar Uni Soviet tidak sampai merasa perlu untuk melibatkan dirinya secara besar-besaran dalam persengketaan ini. Keterlibatan Uni Soviet yang demikian dengan sendirinya akan menimbulkan tuntutan untuk memperoleh pangkalan-pangkalan, seperti di Cam

Rahn dan Bien Hua, yang sulit ditolak oleh Vietnam. Bila hal ini terjadi maka dominasi Amerika Serikat, dengan Armada Ketujuh dan pangkalan-pangkalan di Subic dan Clark Field, akan dinetralisasikan oleh Uni Soviet. Dengan perkataan lain, kekuatan Uni Soviet di Asia Tenggara akan berubah dari kekuatan kelas dua menjadi kekuatan utama. Perubahan ini lebih memungkinkan Uni Soviet melakukan tekanan-tekanan terhadap negara-negara Asia Tenggara dan memberikan angin kepada pihak-pihak di dalam negara-negara tersebut untuk berontak. Selain itu, melalui gangguan terhadap jalur hidup dan jalur logistik negara-negara Barat dan Jepang, Uni Soviet dapat memproyeksikan kekuatan militernya ke dalam bentuk politik yang lebih konkrit artinya daripada usaha-usaha yang selama ini dapat dilakukannya di Asia Tenggara.

Berdasarkan penilaian ini kiranya ASEAN telah mengambil sikap netral, baik dalam pertentangan antara Vietnam dan Kamboja maupun dalam pertentangan antara RRC dan Vietnam. Netralitas ASEAN ini dimaksudkan untuk tidak mengundang negara-negara besar untuk melibatkan diri. Di satu pihak, sikap netral ini dimaksudkan untuk menghindarkan agar Vietnam tidak merasa tersudutkan sedemikian sehingga masuk jauh ke dalam lingkungan pengaruh Uni Soviet, hal mana akan memperbesar kehadiran Uni Soviet di Asia Tenggara. Di pihak lain, terdapat kekuatiran terhadap maksud-maksud RRC yang belum jelas dan belum menentu, apalagi dalam jangka panjang, sehingga jalan yang terbaik adalah menghindarkan keterlibatan RRC.

Selain atas alasan menghindarkan keterlibatan dua negara besar yang sedang bertentangan itu, ASEAN berusaha menghindarkan timbulnya persoalan-persoalan yang akan berlarut-larut tanpa dapat diselesaikan di kemudian hari. Beberapa persoalan yang dihadapi ASEAN dengan Vietnam harus dapat diselesaikan dalam waktu dekat bila tidak dikehendaki implikasi yang dapat mengganggu kestabilan wilayah di masa yang akan datang, misalnya dalam hal pelarian-pelarian dari Vietnam dan masalah penetapan batas-batas wilayah. Dalam mengatur hubungan

dengan Vietnam, ASEAN masih menaruh harapan bahwa semangat nasionalisme Vietnam pada dasarnya masih kuat, dan apabila tidak terlalu disudutkan Vietnam tidak akan mau bergantung kepada siapapun, termasuk Uni Soviet.

Masalah ketiga menyangkut pertentangan jangka panjang antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di Kawasan Asia Pasifik. Pertentangan antara kedua negara ini pada dasarnya merupakan pertentangan yang bersifat global, tetapi karena sifatnya yang demikian, setiap saat pertentangan ini dapat dipertarungkan dalam wilayah yang satu atau lainnya, dengan akibat yang tidak menguntungkan terhadap usaha-usaha regional yang bersangkutan untuk menjaga kestabilan.

Dengan perkembangan yang terjadi belakangan ini Kawasan Pasifik Barat (Asia Pasifik) semakin sukar dipisahkan dari pertarungan global antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Salah satu sebabnya adalah faktor RRC. Dalam hubungannya dengan RRC, mau tidak mau Amerika Serikat selalu harus memperhitungkan perimbangannya dengan Uni Soviet. Persetujuan yang dapat dicapai oleh Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam rangka SALT II juga akan banyak bergantung dari perkembangan pola hubungan antara Amerika Serikat dengan RRC. Karena kaitan-kaitan inilah maka Amerika Serikat berada dalam kedudukan yang cukup pelik untuk setiap saat dapat mempertahankan suatu keseimbangan, keseimbangan tidak saja dalam pandangannya, tetapi juga dalam pandangan Uni Soviet, RRC, dan negara-negara lainnya. Menjaga keseimbangan ini tidak mudah, dan tidak selalu dapat ditangani secara konkrit seperti dalam kasus embargo penjualan senjata baik ke Uni Soviet maupun ke RRC.

Dalam penilaian (persepsi) tentang keseimbangan itu mungkin Uni Soviet di kemudian hari akan menuntut supaya persenjataan nuklir RRC diperhitungkan sebagai bagian dari arsenal strategis Amerika Serikat. Masalah keseimbangan ini juga dinilai oleh pihak-pihak lain. Apa arti, misalnya, dari peningkatan Armada Pasifik Uni Soviet? Andaikan terjadi

peperangan di Eropa, maka sebagian dari kekuatan darat dan udara Uni Soviet akan dialihkan dari perbatasannya dengan RRC ke Eropa, tetapi hal ini mungkin akan dikompensasikan oleh kekuatan Armada Pasifik tersebut. Tetapi Armada Pasifik itu bukan lawan kapal selam strategis (SLBM) Amerika Serikat, dan mungkin tidak hanya dihadapkan pada Armada Ketujuh Amerika Serikat, tetapi akan diberi peranan politis. Peranan politis ini bisa berbentuk tekanan-tekanan terhadap negaranegara di Kawasan Pasifik Barat, termasuk Jepang.

Masalah keempat berkenaan dengan ketidakpastian arah perkembangan RRC. Normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dengan RRC dan perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Jepang dengan RRC, keduanya masih merupakan taruhan, baik bagi Amerika Serikat dan Jepang maupun bagi Kawasan Pasifik Barat secara keseluruhan. Ketidakpastian ini untuk sebagian besar bersumber pada dinamika perkembangan dalam negeri RRC. Arah perkembangan dalam negeri RRC belum dapat dipastikan, dan dari kejadian-kejadian di waktu lalu dapat dilihat beberapa kali telah terjadi perubahan yang drastis sebanyak tiga kali, dari radikalisme kemudian mengambil sikap lebih moderat dan berubah lagi menjadi radikal. Kedudukan Deng Xiaoping dengan kawan-kawannya yang mengambil garis kebijaksanaan yang cukup moderat kelihatannya memang cukup mantap saat ini, tetapi yang banyak dipertanyakan orang adalah masalah kesinambungannya. Generasi yang akan mengambil alih pimpinan di masa yang akan datang ini merupakan kelompok yang mendapatkan pendidikan dalam alam pikiran Mao dan belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Karena kelompok ini secara politis lahir dari revolusi kebudayaan, ada kemungkinan mereka sukar menerima garis kebijaksanaan yang dirasakan terlalu jauh berubah dari garis kebijaksanaan Mao. Ketidakpastian lainnya menyangkut kemampuan Deng Xiaoping untuk melaksanakan program modernisasinya mengingat keterbatasanketerbatasan riil yang dihadapinya. Kelangkaan akan tenagatenaga terlatih, institusi-institusi ekonomi dan finansial, serta prasarana fisik, akan sangat membatasi kemampuan menyerap (kapasitas absorpsi) RRC terhadap impor teknologi dan modal. Sementara itu prospek untuk membiayai impor dan membayar kembali hutang-hutang luar negerinya juga belum jelas.

Walaupun program modernisasi itu sendiri dapat dilaksanakan, tetapi modernisasi yang berlangsung dengan cepat dalam waktu yang singkat juga akan membawa persoalan-persoalannya sendiri. Masyarakat RRC dengan jumlah penduduk yang demikian besar dan perbedaan (keanekaragaman) kedaerahan meminta suatu proses modernisasi yang dapat menjamin keharmonisan dan keseimbangan dalam pertumbuhan antara bagian-bagian dalam masyarakat serta pembagian yang berimbang antara mereka. Program modernisasi yang didorong dengan memasukkan berbagai jenis barang dari luar, dari Coca Cola hingga ke satelit-satelit mungkin cenderung untuk menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.

Politik luar negeri RRC saat ini cukup jelas, yaitu secara khusus ditujukan untuk menghadapi Uni Soviet serta untuk merealisasikan usaha modernisasi dalam negerinya. Garis kebijaksanaan politik luar negeri ini telah membawa RRC ke arah peningkatan hubungan dengan negara-negara Barat. Yang menjadi masalah di sini adalah sejauh mana RRC dapat mempertahankan garis politik luar negeri yang moderat, dalam arti keterbukaan terhadap negara-negara Barat? Di RRC sendiri masih terdapat berbagai kelompok yang pro Uni Soviet, dan karenanya menginginkan normalisasi hubungan dengan Uni Soviet, dan sementara itu kelompok-kelompok lainnya kurang dapat menerima hubungan yang terlalu erat dengan negaranegara Barat. Apabila di hari yang akan datang tekanan-tekanan Uni Soviet dianggap terlalu besar untuk dapat dihadapinya, ada kemungkinan politik luar negeri RRC terpaksa diubah kembali menuju ke arah persekutuan antara RRC dengan Uni Soviet. Perubahan ini tentu akan membawa akibat yang besar terhadap Kawasan Pasifik Barat, terutama apabila kedua negara itu secara bersama-sama ingin menjadikan kawasan ini sebagai daerah pengaruh mereka. Adanya kemungkinan ini merupakan salah satu alasan bagi Amerika Serikat dan Jepang untuk membuat

taruhannya, yaitu memperkuat kedudukan Deng Xiaoping sedemikian sehingga garis moderat yang dianutnya akan dapat bertahan biarpun Deng tidak ada lagi. Tetapi taruhan ini sendiri mempunyai risiko yang besar. Bila karena alasan tertentu RRC di kelak kemudian hari akan mengubah garis kebijaksanaannya, maka akan dihadapi suatu RRC yang berkekuatan jauh lebih besar daripada sekarang, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun militer, yang diperolehnya dari negara-negara Barat.

Persoalan lain yang juga belum dapat dipastikan menyangkut penyelesaian Taiwan serta wilayah-wilayah lain yang diklaim RRC (Chinese Irredenta). Untuk saat ini belum jelas apakah RRC akan mengambil cara damai atau cara kekerasan. Seperti yang telah diperlihatkan di waktu lalu dengan kasus Kepulauan Paracel, dan kini dengan serbuannya ke Vietnam, apabila dikehendaki RRC tidak akan segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Kasus yang terakhir ini kiranya telah memberikan peringatan kepada Amerika Serikat, bahwa keamanan Taiwan perlu dijamin dengan sungguh-sungguh, tidak saja dalam bidang ekonomi tetapi lebih-lebih dalam bidang militer. Bahwasanya di kawasan ini masih banyak terdapat sumber-sumber persengketaan mengenai batas wilayah merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan.

Masalah ketidakpastian kelima menyangkut peranan Jepang di masa yang akan datang. Persoalan pokok di sini adalah (a) perubahan pandangan masyarakat (public opinion) Jepang mengenai masalah pertahanan dan keamanan; dan (b) peranan pasukan bela diri (self-defense forces) Jepang menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman di masa depan. Dalam waktu-waktu yang lalu membicarakan masalah pertahanan dan keamanan Jepang berarti membicarakan perjanjian pertahanannya dengan Amerika Serikat. Pasukan bela diri tidak diberi peranan yang berarti, dan anggaran pertahanannya harus ditekan di bawah 1% dari GNP. Pada saat sekarang ini pandangan masyarakat Jepang sudah berubah. Pasukan bela diri mulai dianggap penting dan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui peningkatan kuantitas pasukan dan perlengkapannya. Bersamaan dengan itu, perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat semakin banyak dipertanyakan kredibilitasnya,

walaupun kritik-kritik terbuka hanya dilontarkan oleh partai komunis. Masyarakat dan pemerintah Jepang juga secara terbuka sudah berani menunjuk Uni Soviet sebagai ancaman yang riil. Hal ini terlihat dalam Buku Putih Pertahanan Jepang sejak tahun 1976.

Masalah ketidakpastian keenam menyangkut persoalan Korea. Persoalan Korea yang utama yang akan dihadapi dalam tahun 1980-an adalah menyangkut peralihan kekuatan, baik ekonomi maupun militer, dari bagian Utara ke bagian Selatan. Di waktu lalu, kekuatan tersebut berada di bagian Utara dan secara lambat laun beralih ke Selatan. Menghadapi ini, yaitu kemunduran Korea Utara dalam menyaingi Korea Selatan, ada kemungkinan bahwa Korea Utara akan meningkatkan gangguangangguannya dan malah mungkin berusaha menghancurkan dominasi Korea Selatan dengan jalan penyerbuan.

Oleh karena prospek ini, keputusan Presiden Carter, yang diambil secara unilateral tanpa berdialog dahulu, untuk menarik pasukan darat Amerika Serikat dari Korea Selatan telah dicela karena dapat menimbulkan kesalah-pahaman di pihak Utara: penyerbuan ke Selatan akan bisa dilakukan dalam waktu dekat karena kredibilitas kehadiran dan jaminan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan sudah tidak bisa diandalkan. Implikasi keputusan Carter ini tidak hanya dirasakan di Korea tetapi juga telah menimbulkan ketidakpastian mengenai peranan Amerika Serikat di seluruh Kawasan Pasifik Barat.

Hingga saat ini memang Korea Utara tidak mendapat dukungan dari Uni Soviet maupun RRC untuk melakukan penyerbuan ke Selatan. Keseimbangan politik antara ketiga kekuatan besar Amerika Serikat, RRC dan Uni Soviet juga diuji di Korea. Dengan mengadakan normalisasi dengan RRC, Presiden Carter juga berharap bahwa RRC dapat menekan Kim Il Sung untuk tidak melakukan penyerbuan ke Selatan, tetapi RRC tidak dapat menyatakan hal ini secara terbuka karena kuatir bahwa Korea Utara akan terdorong untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Soviet.

Pada saat ini kekuatan Korea Utara di udara maupun di laut masih lebih unggul daripada Korea Selatan, tetapi diperkirakan dalam lima tahun mendatang akan dapat menjadi berimbang bila dilakukan persiapan-persiapan yang baik oleh Korea Selatan. Perkembangan ekonomi Korea Selatan jauh lebih pesat daripada Korea Utara, tetapi sebagian besar pusat industri Korea Selatan masih terletak di dekat perbatasannya dengan Korea Utara, hal mana membuat industri-industri tersebut sangat rawan terhadap serangan dari Utara.

Bahwa tindakan-tindakan yang kurang matang dipersiapkan akan dapat menimbulkan kesalahpahaman telah disadari oleh Presiden Carter yang telah bersedia menunda penarikan mundur pasukan daratnya dari Korea Selatan. Walaupun pada prinsipnya tetap akan dilaksanakan penarikan mundur ini tetapi tidak ditetapkan tanggal-tanggal penarikan dengan pasti seperti yang dilakukan semula.

Untuk saat ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Park Chung Hee untuk memulai pendekatan kembali dengan Korea Utara merupakan satu titik awal dari suatu proses yang diperkirakan akan memakan waktu yang lama. Tetapi kiranya yang perlu dipertahankan adalah status quo, sesedikitnya selama keadaan dalam negeri Korea Utara masih penuh ketidakpastian. Masalah yang dihadapi di Korea Utara saat ini adalah masalah peralihan kekuasaan karena Kim Il Sung sudah sangat menurun kesehatannya, dan terdapat banyak perkiraan bahwa realisasi penyatuan Korea dengan kekerasan masih akan dapat dilaksanakan dalam masa hidupnya.

Masalah ketidakpastian yang ketujuh berkisar pada masalah hubungan ekonomi antara negara-negara di Kawasan Pasifik Barat. Persoalan-persoalan yang akan dihadapi sebenarnya bersumber pada kemantapan yang dapat dicapai dalam membina kelembagaan-kelembagaan ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Hal ini berkaitan erat dengan tendensi proteksionisme antara Amerika Serikat di satu pihak dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan di pihak lain. Bila masalah "harmonisasi"

ekonomi ini tidak segera dapat diatasi, dalam waktu yang akan datang pasti akan ditimbulkan kegoncangan-kegoncangan yang akan mempengaruhi hubungan politik dan stabilitas di kawasan ini.

Demikian pula apabila persoalan-persoalan dalam rangka Dialog Utara-Selatan dibiarkan berlarut-larut pada akhirnya akan mendorong negara-negara berkembang untuk menjadi radikal. Semua masalah di atas bersumber pada kebijaksanaan ekonomi dalam negeri negara-negara industri dan pandangan masyarakatnya mengenai keharusan mereka untuk melaksanakan perubahan struktur ekonominya. Penyelesaian masalah-masalah ekonomi dalam negeri tidak bisa dilakukan secara "artificial" melalui proteksi tarif dan nontarif. Hal ini berlaku baik untuk Amerika Serikat, Jepang, maupun Australia.

Masalah lain menyangkut peranan ekonomi RRC di kawasan ini. Dalam usaha membantu pembangunan RRC banyak dipertanyakan apakah sebagai akibatnya negara-negara industri, seperti Jepang dan Amerika Serikat, akan mengalihkan arus perpindahan teknologi dan modal dari negara-negara berkembang lainnya ke RRC. Hingga sekarang belum ada kejelasan tentang bentuk partisipasi RRC dalam ekonomi kawasan, khususnya hubungan ekonomi antara RRC dengan negara-negara berkembang di kawasan ini. Dalam persoalan ini, bagaimana persaingan yang akan timbul mendapat saluran yang sehat. Selain itu kiranya perlu mulai dipikirkan pengaturan hubungan antara negara-negara yang sudah maju dalam proses industrialisasinya, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong, dengan negara-negara ASEAN. Tetapi masalah ini juga tergantung dari bagaimana potensi ASEAN dapat dikembangkan secara riil, dan dengan demikian menjadi faktor yang ikut diperhitungkan dalam pengaturan ekonomi, termasuk kerja sama ekonomi, di Kawasan Pasifik Barat.

Masalah ketidakpastian yang terakhir menyangkut perkembangan di dalam negeri negara-negara yang berkembang di Kawasan Pasifik Barat dan pengaruhnya terhadap perkem-

bangan hubungan antar negara. Ternyata masalah ini kurang mendapatkan perhatian, dan mulai disadari setelah kejadian di Iran. Dalam hal ini masalah utama berkisar pada pengaturan program pembangunan dan modernisasi ekonomi dalam masyarakat yang belum memperoleh kelembagaan sosial politik. Juga ternyata belum diperoleh bentuk harmonisasi antara nilainilai budaya setempat dengan pengaruh-pengaruh yang datang bersama-sama dengan proses modernisasi. Selain itu dengan kemajuan pembangunan ekonomi juga timbul harapan-harapan yang semakin meningkat yang bukan saja sulit dapat dipenuhi tetapi bersamaan dengan itu terjadi proses pelebaran jurang dan dalam pembagian hasil-hasil pembangunan. ketimpangan Keresahan yang ditimbulkan dalam banyak hal juga tidak dapat disalurkan dengan wajar karena mekanisme partisipasi rakyat yang belum sempurna, yang akhirnya tertuang dalam gerakangerakan yang menyatukan diri untuk menumbangkan pemerintahan. Kombinasi dari faktor-faktor di atas, apalagi bila ditanggapi secara opresif oleh penguasa, cenderung membangkitkan perlawanan dari kelas menengah yang sewaktuwaktu dapat meledak.

Ketidakpastian lainnya menyangkut masalah peralihan kekuasaan dan pimpinan nasional, terutama oleh karena di hampir semua negara-negara berkembang belum tercipta mekanisme dan kelembagaan untuk mengalihkan kekuasaan tersebut, tanpa menimbulkan kejutan (shock) yang besar. Sebab kejutan yang demikian dengan akibat-akibatnya semata-mata akan mengakibatkan kemunduran-kemunduran, dan sering kali malahan kehancuran dalam masyarakat, dan pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap kawasan secara keseluruhan.

Masalah dalam negeri lainnya yang juga meminta penyelesaian berhubungan dengan masalah persatuan bangsa dan peranan berbagai kelompok minoritas di dalamnya. Persoalan kedaerahan, komunalisme, dan agama masih cenderung menimbulkan gejolak-gejolak politik dan sosial. Secara keseluruhan, masalah-masalah dalam negeri di atas merupakan masalah yang serius. Perubahan-perubahan bukanlah hal yang

negatif, tetapi perubahan-perubahan itu harus terjadi dalam suatu kesinambungan. Hubungan antar negara yang stabil tidak hanya terjamin oleh hubungan antara pejabat-pejabat negara yang pada waktu-waktu tertentu akan berganti, tetapi harus diberi dasar yang lebih kuat, yaitu hubungan yang melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.

II. PERANAN AMERIKA SERIKAT DI PASIFIK BARAT

Amerika Serikat perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kekuatan besar yang secara strategis dapat mengimbangi peranan kekuatan-kekuatan besar lainnya yang beraliran komunis. Tetapi saat ini Amerika Serikat sendiri belum memperoleh kejelasan mengenai peranannya di Pasifik Barat. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hambatan. Hambatan pertama ialah politik dalam negeri. Seperti yang terlihat dari pandangan masyarakat dan juga tercermin dalam Kongres, orientasi politik luar negeri Amerika Serikat masih berpusat pada Eropa. Hal ini disebabkan karena kebudayaan Eropa dikenal, sistem pemerintahannya dikenal dan pemikiran-pemikiran masyarakatnya dimengerti. Selain alasan ini, trauma akibat keterlibatan di Vietnam, telah semakin mendorong mereka untuk lebih banyak memusatkan perhatiannya ke Eropa. Padahal kenyataan dalam bidang ekonomi sudah jauh berbeda. Dalam bidang perdagangan, Kawasan Pasifik Barat sudah menjadi lebih penting daripada Eropa, tetapi investasi Amerika Serikat di Eropa berjumlah sekitar tiga kali jumlah investasinya di kawasan ini.

Trauma Vietnam sedikit demi sedikit sudah berhasil diatasi, tetapi gambaran yang jelas tentang peranan baru Amerika Serikat di kawasan ini belum dipunyai. Di Kongres misalnya terlihat munculnya kembali perhatian kepada Kawasan Asia Pasifik, dan secara umum telah ada pengakuan bahwa kawasan ini tidak dapat diabaikan. Salah satu alasan adalah persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mempunyai dimensi global, di mana Kawasan Asia Pasifik mempunyai arti yang besar. Ditambah pula bahwa sebagai suatu medan per-

saingan, Asia Pasifik belum jelas situasinya. Ketidakjelasan ini ada ditafsirkan sebagai akibat dari berubahnya kedudukan Amerika Serikat dalam kawasan itu. Apabila di waktu lalu Amerika Serikat menduduki tempat yang unggul, terutama dalam bidang sekuriti dan militer, kedudukan ini sudah diimbangi oleh kekuatan Pasifik dari Uni Soviet. Uni Soviet sekarang menempatkan sepertiga dari armadanya di Pasifik, dan menempatkan seperempat dari tentara daratnya di Asia Pasifik.

Di samping perkembangan di atas, terdapat persoalan yang menyangkut perumusan kebijaksanaan yang bersifat jangka panjang. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan yang dirumuskan setiap kali terpengaruh oleh pemilihan umum yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali untuk Kongres, dan setiap empat tahun sekali untuk Presiden yang paling lama hanya bisa menjabat dua kali. Sebagai akibatnya sukar diharapkan suatu kebijaksanaan yang sinambung.

Hambatan-hambatan di atas menyebabkan tidak adanya suatu kebijaksanaan yang komprehensif untuk Kawasan Asia Pasifik. Memang kebijaksanaan serupa ini tidak perlu merupakan kebijaksanaan yang bersifat tunggal dan diberlakukan untuk seluruh kawasan, karena kondisi masingmasing negara dalam kawasan ini berbeda, tetapi kebijaksanaan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya.

Selain alasan di atas, Amerika Serikat menghadapi situasi internasional yang lebih kompleks, sehingga perhatiannya sering terpecah-belah, dan karenanya pandangan masyarakat dan Kongres hanya bisa diarahkan kepada situasi-situasi yang kritis saja, yaitu krisis-krisis. Sebagai suatu kesimpulan dapat dikatakan bahwa hambatan utama dalam merumuskan suatu kebijaksanaan jangka panjang yang komprehensif adalah tiadanya dukungan yang cukup dari masyarakat dan Kongres. Pihak administrasi dari pihaknya telah mulai menyadari pentingnya perumusan kebijaksanaan seperti di atas, dan sebenarnya mempunyai waktu untuk itu sebab pada saat ini Amerika Serikat tidak terlibat dalam peperangan ataupun konflik-konflik yang

besar. Masalahnya adalah bahwa untuk saat ini keadaan internasional sudah dianggap menguntungkan, di mana kedua kekuatan besar komunis sedang bersengketa sendiri dan telah terjadi normalisasi hubungan dengan RRC dan hubungan dengan Jepang mulai dapat dimantapkan kembali. Sementara kalangan beranggapan bahwa yang sering kali kurang diperhatikan oleh pihak administrasi adalah bahwa Uni Soviet tetap berada dalam proses mengembangkan kekuatan militernya yang telah memperoleh momentum beberapa tahun yang lalu. Oleh karena keadaan ini telah ditimbulkan persepsi di kalangan banyak pengamat di negara-negara di Kawasan Pasifik Barat (dan Eropa) bahwa kekuatan Amerika Serikat relatif telah menurun. Persepsi serupa inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Dan hal ini masih ditambah dengan pengamatan mengenai cara-cara administrasi merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaannya, sementara harus berhadapan dengan suatu Kongres yang tidak selalu kooperatif. Kasus penarikan mundur tentara Amerika Serikat dari Korea Selatan merupakan contoh vang jelas.

Di pihak lain dapat dilihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapinya sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik, misalnya dalam kasus pangkalan-pangkalan di Subic dan Clark Field. Tetapi Amerika Serikat masih perlu membuktikan kembali kredibilitas dari komitmen-komitmennya, dan harus dapat dipercaya kembali oleh teman-temannya. Dalam hal ini kasus Taiwan akan menjadi batu ujiannya.

Kebijaksanaan Amerika Serikat dalam tahun 1980-an ini akan banyak bergantung dari hal-hal yang disebutkan di atas, tetapi secara teoretis Amerika Serikat mempunyai beberapa pilihan. Seperti yang diajukan oleh Robert Scalapino, Amerika Serikat mempunyai tiga pilihan. Pilihan pertama adalah "keterlibatan secara terbatas" (limited involvement), yang berarti bahwa Amerika Serikat hanya akan melibatkan diri di Kawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, dan juga dalam bidang politik, tetapi dalam bidang sekuriti akan mengundurkan diri hingga ke Hawaii, dan hanya menempatkan

kekuatan yang mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan (power projection), misalnya kapal selam strategisnya (SLBM). Pilihan kedua berupa apa yang dinamakan "front bersama" (united front), di mana secara sadar Amerika Serikat membentuk satu kesatuan dengan Jepang dan RRC serta negaranegara lain untuk menghadapi Uni Soviet. Pilihan ketiga ialah apa yang dinamakan kebijaksanaan "mempertahankan keseimbangan" (maintenance of equilibrium), yang tidak berbeda jauh dari kebijaksanaannya sekarang, yaitu hubungan dengan Jepang sebagai inti dan menciptakan hubungan yang seimbang dengan RRC dan Uni Soviet. Dalam pilihan ketiga ini Uni Soviet dianggap mempunyai hak untuk hadir di Asia Pasifik secara wajar, untuk menciptakan suatu keseimbangan antara negaranegara besar, dan melalui ini dapat dijamin stabilitas kawasan.

Menilai pilihan-pilihan tersebut, kiranya pilihan pertama, yaitu kehadiran secara terbatas, sukar dilakukan karena dengan demikian Amerika Serikat akan kehilangan kredibilitas (kepercayaan) yang diperlukannya dalam menghadapi kekuatan militer Uni Soviet yang semakin meningkat di Pasifik. Hanya Amerika Serikat yang dapat memberikan imbangan. Dengan pilihan ini, kehadiran Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik, lama-kelamaan akan terdesak oleh karena semakin turun kepercayaan negara-negara di kawasan ini dan dianggap sebagai partner yang sukar diandalkan.

Pilihan kedua, yaitu kebijaksanaan yang berlandaskan pada suatu front bersama, juga sukar dapat dilaksanakan secara konsekuen karena Uni Soviet akan merasa terpojok dan karenanya akan menantang front tersebut dengan tindakan-tindakan avonturir. Dari sudut kepentingan ASEAN pilihan ini juga bukan yang terbaik, terutama karena peranan RRC di dalamnya. Dalam jangka panjang peranan RRC masih tidak menentu, dan seperti yangditunjukkan dengan penyerangannya ke Vietnam, ternyata RRC tidak mau membatasi diri dan menghindarkan penggunaan kekerasan. Jadi, kalaupun RRC menyatakan bahwa mereka akan memusatkan perhatiannya pada pembangunan dan modernisasi, tetapi tidak akan segan untuk melakukan tindakan

kekerasan, suatu tindakan yang semula dianggap hampir tidak mungkin karena dengan demikian RRC akan meriskir proses pembangunan dan modernisasinya. Dalam jangka panjang, RRC yang kuat dan modern tetapi mengambil garis politik konfrontasi, akan merupakan ancaman yang besar bagi ASEAN. Dalam jangka pendek dan menengah ini, juga masih terdapat berbagai sumber konflik antara RRC dengan negara-negara tetangganya dalam permasalahan batas-batas wilayah. Apakah dalam penyelesaian persoalan-persoalan ini RRC akan memilih jalan kekerasan bukanlah pertanyaan yang dapat diabaikan. Atas alasan-alasan ini maka masih dapat diragukan apakah RRC dapat diajak dalam front bersama ini.

Bila kebijaksanaan ini akan dilaksanakan, secara implisit hal ini berarti bahwa RRC harus diperkuat secara militer untuk ikut menghadapi Uni Soviet. Berdasarkan penilaian-penilaian di atas, maka pilihan yang mungkin paling tepat bagi Amerika Serikat adalah gabungan dari berbagai pilihan di atas, yaitu kebijaksanaan yang didasarkan atas suatu koalisi dengan negaranegara sahabatnya, khususnya Jepang, Australia, dan New Zealand, dan bersamaan dengan itu mempertahankan keseimbangan di Kawasan Pasifik Barat. Dalam kerangka ini RRC bukan sekutu militer, tetapi hubungan dengan RRC akan bergantung dari sikap Uni Soviet.

Secara lebih terperinci, kerangka kebijaksanaan di atas berarti:

- a. Hubungan seimbang dalam segi tiga Amerika Serikat-Uni Soviet-RRC, yang berarti bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan RRC terbatas pada hubungan ekonomi dan kebudayaan, dan tidak melibatkan hubungan dalam bidang militer;
- b. Hubungan yang erat antara Amerika Serikat dengan Jepang, karena Jepang adalah negara besar yang merupakan teman strategis satu-satunya. Hal ini berarti bahwa kesulitan-kesulitan dalam hubungan ekonomi-perdagangan antara kedua negara harus diatasi, dan bahwa Jepang diberi kemungkinan-kemungkinan untuk ikut berperan dalam

bidang sekuriti kawasan. Memang dalam hal ini masih terdapat berbagai hambatan, tetapi karena tampaknya ada kecenderungan ke arah tersebut dari dalam Jepang sendiri, sebaiknya Amerika Serikat sudah ikut mengarahkannya untuk menghindarkan akibat-akibat yang malahan bertentangan dengan pemikiran di atas. Untuk ini perlu diciptakan mekanisme hubungan yang kukuh yang diisi dengan dialog dan konsultasi yang bersungguh-sungguh, lebih lancar daripada yang sekarang dilakukan;

- c. Hubungan dengan Korea Selatan, di mana kredibilitas Amerika Serikat dapat dipertahankan, tidak saja dilihat dari sudut Korea Selatan tetapi juga oleh negara-negara lainnya. Sebab menurunnya kredibilitas ini akan menimbulkan goncangan-goncangan di pihak teman-teman Amerika Serikat dan menciptakan kesalahpahaman di pihak lawan dengan akibat-akibatnya. Sementara itu melalui RRC mungkin Korea Utara dapat diyakinkan untuk menerima kenyataan adanya Korea Selatan;
- d. Hubungan dengan ASEAN yang mengenal dua dimensi pokok, yaitu hubungan dalam bidang ekonomi dan hubungan dalam bidang sekuriti. Hubungan ekonomi dapat ditingkatkan melalui sektor swasta, tetapi peranan pemerintah dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam memberikan jaminan-jaminan. Dalam bidang sekuriti, khususnya menjaga kelancaran pengaturan penggunaan pangkalan-pangkalan di Pilipina sebagai tanda (simbol) kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara guna membantu menjamin keamanan kawasan ini. Selain itu juga menjamin kelancaran penjualan senjata-senjata ke negaranegara ASEAN;
- e. Hubungan dengan ANZUS (Australia dan New Zealand) serta Pasifik Selatan dipertahankan untuk mencegah Uni Soviet merajalela di daerah ini;
- f. Hubungan yang fleksibel dengan Indocina, khususnya Vietnam. Biarpun untuk sementara normalisasi hubungan dengan Vietnam terhambat oleh beberapa faktor, khususnya oleh penyerbuan Vietnam ke Kamboja, tetapi hubungan itu diperlukan agar Vietnam tidak terisolisasikan samasekali

dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Fleksibilitas ini juga diperlukan agar Vietnam tidak memberikan pangkalan-pangkalan militer kepada Uni Soviet. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak boleh ditutup oleh Amerika Serikat karena cepat atau lambat, Vietnam terpaksa membuka dirinya lagi kepada negara-negara Barat untuk dapat membangun negaranya, khususnya ekonominya;

- g. Mengambil peranan aktif dalam menciptakan lembagalembaga internasional yang dapat mengatasi keteganganketegangan dalam hubungan ekonomi internasional,
 terutama di bidang perdagangan dan dalam hubungan
 antara Utara dan Selatan. Kawasan Pasifik ini merupakan
 wilayah yang berkembang paling dinamis, tetapi justru
 karenanya diperlukan pengaturan-pengaturan agar tidak
 terjadi bentrokan-bentrokan kepentingan. Walaupun dalam
 kerangka hubungan ekonomi Kawasan RRC akan diberi
 peranan, tetapi hal ini tidak akan diterima apabila dilakukan
 dengan merugikan ASEAN;
- h. Hubungan dengan negara-negara berkembang di kawasan harus dilandasi dengan pengertian yang cukup mengenai kondisi negara-negara tersebut. Keadaan dalam negeri negara-negara ini mencerminkan perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, dan karena proses itu sendiri tidak bisa dielakkan bahwa terjadi berbagai gejolak. Dalam keadaan serupa ini Amerika Serikat tidak dapat memaksakan nilai-nilainya untuk diterapkan;
- i. Pengalihan teknologi ke negara-negara berkembang, terutama teknologi yang ada kaitannya dengan persenjataan nuklir, tidak perlu diperketat dengan dalih akan mendorong negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan untuk menjadi negara nuklir, sebab pilihan ini hanya akan diambil apabila komitmen Amerika Serikat tidak dapat diandalkan.

PENUTUP

Selain menilai arah perkembangan dari gejala-gejala yang dapat diamati dewasa ini, beberapa pemikiran dapat diajukan

dalam rangka membangun suatu situasi yang stabil di Kawasan Pasifik Barat dalam tahun 1980-an.

Salahsatu pemikiran, seperti yang diajukan oleh analis Jepang Jiro Tokuyama, adalah menciptakan suatu Masyarakat Asia Pasifik (Asia Pacific Community) yang merupakan suatu kerangka kerja sama ekonomi yang meliputi Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Taiwan, ASEAN, dan mungkin RRC. Tetapi kestabilan kawasan tidak hanya bisa diandalkan pada terwujudnya gagasan ini. Malahan ada kemungkinan gagasan ini tidak mudah dapat direalisasikan karena timbulnya ketegangan-ketegangan yang semakin besar di kawasan ini, misalnya antara RRC dan Uni Soviet, yang dapat mengubah sama sekali situasi di kawasan ini. Dengan demikian landasan-landasan yang sudah mulai tercipta sekarang ini akan hancur kembali. Untuk mencegah hal ini peranan Amerika Serikat sangat menentukan. Dalam hal ini maka secara khusus Amerika Serikat perlu untuk:

- a. Lebih intensif mengadakan konsultasi yang sungguhsungguh dengan teman-temannya;
- Merumuskan suatu kebijaksanaan untuk Asia Pasifik yang komprehensif sifatnya dengan kurun waktu yang agak panjang;
- c. Memperkuat dukungan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan tersebut, yang berarti kepemimpinan dari pihak administrasi dan Kongres.

Kesemuanya itu meminta suatu fleksibilitas hubungan dan fleksibilitas kebijaksanaan yang mampu menanggapi berbagai kemungkinan, terutama karena berbagai ketidakpastian yang sebenarnya sudah dapat dirumuskan.

INTERDEPENDENSI EKONOMI DI ASIA-PASIFIK DALAM TAHUN 1980-AN

Hadi SOESASTRO*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II perdagangan internasional meningkat hampir dua kali lebih cepat daripada pertumbuhan produksi dunia. Artinya, dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi-ekonomi nasional semakin besar bagian yang diperdagangkan secara internasional. Perdagangan internasional, apabila diselenggarakan sesuai dengan dalil-dalil ekonomi, memang dapat diperkirakan akan menjadi semakin intensif dan ekstensif. Salah satu faktor penting yang telah memungkinkan terjadi percepatan pertumbuhan produksi dunia dan sekaligus memperluas arus pertukaran barang dan jasa secara internasional adalah ekspansi arus modal dan investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan internasional. Arus modal melalui jalur ini juga diikuti oleh pengalihan teknologi.

Pola perkembangan seperti di atas membawa interdependensi (kesalingtergantungan) yang semakin besar antara ekonomi-ekonomi nasional. Namun interdependensi ini juga menimbulkan masalah-masalahnya sendiri. Dengan kenyataan interdependensi ini maka dalam merumuskan kebijaksanaan nasional di sesuatu negara semakin perlu diperhitungkan

^{*} Penulis berterimakasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Prof. Panglaykim dan Dr. R.B. Soehartono dalam penyusunan kertas ini.

perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar domain nasionalnya. ¹

Masalah pertama yang dihadapi adalah menyangkut kedaulatan sesuatu negara dalam usahanya untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasionalnya mengingat bertambahnya ''kepekaan'' ekonominya terhadap apa-apa yang terjadi secara eksternal. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa meningkatnya interdependensi ekonomi ini mengurangi kemanjuran kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional. Contoh aktual adalah jalannya perdebatan mengenai kebijaksanaan energi di Amerika Serikat dengan pengaruh langsung terhadap nilai mata-uang dollar, seperti tercermin di pasaran mata-uang asing di London, Frankfurt dan Tokyo. Perubahan-perubahan dalam nilai matauang dollar secara mendadak dalam besaran yang cukup berarti akan segera mempengaruhi perdagangan internasional dan ekonomi-ekonomi nasional yang terlihat dalam interaksi ini.

Semakin peka sesuatu negara terhadap kondisi ekonomi eksternal, semakin berkurang pula peluangnya untuk menyelenggarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter yang bersifat otonom. Dalam hubungan ini di banyak negara dewasa ini otoritas moneternya menghadapi gejala yang disebut ''inflasi yang diimpor'' yang penanganannya seringkali meminta pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya. Namun demikian, masalah ini tidak mutlak harus dianggap membahayakan sejauh dilakukan perhitungan yang tepat dan persiapan yang baik. Secara essensial terdapat perbedaan antara "kepekaan" (sensitivity) dan "kerawanan" (vulnerability). Dalám pengertian kepekaan di atas ada terkandung kemungkinan menyelaraskan kebijaksanaankebijaksanaan, sehingga hasil yang bisa diperoleh sudah dapat diperkirakan sejak semula. Sebaliknya, dalam pengertian kerawanan terdapat aspek kejutan-kejutan atau "surprise" dengan akibat yang sukar diperhitungkan sebelumnya.

Lihat Robert Soloman dan Anne Gault, The Interdependence of Nations: An Agenda for Research, A Report to the National Science Foundation (Washington, D.C.: The Brookings Institution, December 1977)

Masalah kedua menyangkut persoalan cara mengorganisasikan hubungan-hubungan ekonomi internasional sedemikian sehingga sistem hubungan ini sesuai dengan kenyataan interdependensi masa kini. Tema utama kerja sama ekonomi dewasa ini masih tetap akan berpusat pada persoalan bagaimana sesuatu negara dapat mempertahankan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari transaksi ekonomi yang semakin luas dengan negara-negara lainnya dan pada saat yang sama tetap dapat memelihara kebebasan yang diperlukan negara tersebut untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya.

MENGHADAPI KENYATAAN INTERDEPENDENSI

Oleh banyak pemerintah-pemerintah telah disadari bahwa interdependensi ekonomi meminta suatu usaha politik dalam lingkup internasional untuk mengkoordinasikan menyelaraskan, dalam batas-batas tertentu, kebijaksanaan ekonomi nasional. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah-pemerintah ini juga mengetahui bahwa secara politis mereka diminta bertanggungjawab atas kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Biasanya tekanan-tekanan di dalam negeri cukup kuat dan mendorong pemerintah-pemerintah ini untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan (proteksi) yang dapat tampak dengan nyata. Perdagangan merupakan mekanisme yang mudah terlihat effeknya terhadap perusahaan-perusahaan dan bisnis atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu, seperti lembaga-lembaga konsumen atau serikat-serikat buruh. Cara-cara yang lazimnya ditempuh paling dahulu adalah melalui aturan-aturan perdagangan luar negeri, baik berupa hambatan tarif maupun nontarif atau tindakantindakan proteksi lainnya.

Pergeseran-pergeseran yang hakiki telah terjadi sejak permulaan tahun 1970-an ini dalam interaksi antara ekonomi-ekonomi nasional. Konjungtur (business cycles) di negara-negara industri tidak lagi bergerak dengan pola saling mengimbangi sehingga dapat saling membantu menarik sesuatu negara ke luar

dari keadaan resesi, tetapi kini berkecenderungan untuk berjalan secara sinkron. Hal ini memperbesar tekanan-tekanan inflasi. Selain itu, sejak tahun 1971 banyak negara menggantungkan diri kepada penyesuaian-penyesuaian nilai mata-uang (kurs) sebagai instrumen utama untuk mencapai ekuilibrium neraca pembayarannya. Di bawah sistem ini, otoritas-otoritas moneter nasional mendapat peluang untuk menjalankan kebijaksanaankebijaksanaan yang semakin berbeda satu dengan yang lainnya, hal mana secara potensial memperbesar perbedaan tingkattingkat inflasi nasional. Ternyata selama tahun 1970-an ini terlihat akibat-akibat di atas, dan dalam suasana ini semakin besar ketidakpastian moneter dan finansial pada tingkat internasional. 1 Ditambah lagi dengan eskalasi harga minyak bumi, selalu terdapat bahaya resesi. Kenaikan harga minyak bumi dalam tahun 1973 dan 1974 dalam suasana ketidakpastian moneter dan pola konjungtur di atas telah menciptakan resesi dunia yang paling dalam setelah Perang Dunia II.

Dalam situasi memulihkan ekonomi dan mengatasi masalahmasalah penyesuaian neraca pembayaran masalah yang utama menyangkut ''daya tarik'' (pull) yang dapat diciptakan bagi setiap ekonomi melalui peningkatan perdagangannya (ekspor) dengan negara-negara lain.² Negara-negara yang mempunyai hutang luar negeri yang tinggi, untuk membiayai pembangunan atau defisit neraca perdagangannya, juga melihat pertumbuhan ekspornya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kemampuannya membayar kembali hutang-hutang tersebut. Negaranegara yang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi dan tingkat permintaan dalam negeri yang rendah (sluggish domestic demand) juga melihat perdagangan internasional sebagai lokomotif untuk menggerakkan ekonominya kembali.

Namun demikian, dalam situasi ekonomi dunia seperti di atas, justru prospek bagi peningkatan perdagangan internasional

¹ Lihat Rodney T. Smith dan Hadi Soesastro, International Capital Markets in the 1970s (Santa Monica, Calif.: The Rand Corporation, July 1977)

² Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, lihat Harald B. Malmgren, "Impact of Trade Policies on the World Economy", Economic Impact, 2, 1978

menghadapi berbagai ancaman. Ancaman ini timbul dengan meningkatnya nasionalisme ekonomi dan intervensi yang berlebihan oleh pemerintah-pemerintah di sektor eksternal dari ekonominya. Di satu pihak, masing-masing negara berusaha meningkatkan ékspornya, tetapi di pihak lain, negara-negara ini juga berusaha membatasi pasaran dalam negerinya bagi ekspor negara-negara lain. Sokoguru perdagangan internasional yang utama, yaitu sistem nilai tukar mata-uang yang tetap (fixed exchange rate) dan perdagangan bebas (free trade), telah diganti dengan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) dan berbagai bentuk "organized free trade", seperti yang dikenal dengan sebutan "orderly marketing agreements (OMAs)". Kompleksitas dan keragaman bentuk intervensi yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberlakukan di banyak negara telah menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional, khususnya yang menyangkut akses ke pasaran-pasaran luar negeri.

Pemulihan ekonomi dari keadaan resesi dalam pertengahan tahun 1970-an ini terjadi dengan sangat lambat. Penanaman modal di negara-negara industri berada jauh di bawah tingkat yang terjadi pada usaha-usaha pemulihan ekonomi di masa-masa lalu. Inflasi yang berkepanjangan juga telah mengganggu pasaran dunia secara keseluruhan, sementara tingkat pengangguran tetap cenderung untuk meningkat, khususnya di Eropa Barat. Hanya sebagian kecil negara-negara berhasil mengendalikan inflasi, tetapi negara-negara ini malahan menghadapi kenyataan bahwa nilai mata uangnya mengalami apresiasi pada tingkat yang dapat mengancam ekspansi ekonominya.

Jepang termasuk salah satu negara yang menghadapi keadaan di atas. Tetapi dengan strategi ekspornya yang agresif, Jepang masih dapat melanjutkan penetrasinya ke beberapa pasaran yang utama. Biarpun demikian Jepang tidak akan mudah lagi menghadapi hambatan-hambatan dan proteksi perdagangan yang cenderung berkembang, khususnya di negaranegara industri. Perjanjian-perjanjian dalam rangka MTN

(Multilateral Trade Negotiations) pertengahan tahun 1979 ini masih harus diuji kemanjurannya. Selama ini tindakan-tindakan balasan (countervailing measures) yang diambil oleh banyak negara terhadap Jepang ditujukan untuk mengubah strategi Jepang dan agar Jepang membuka ekonominya untuk hasil-hasil industri mereka. Dengan cara ini diharapkan Jepang dapat didorong untuk menjadi suatu "full-fledged trading nation" dan tidak mempertahankan kedudukannya sebagai "exporting country" belaka. Untuk dapat merealisasikan tujuan ini Jepang harus mengadakan penyesuaian struktural dari ekonominya. Pada saat ini sebenarnya Jepang sudah berada dalam proses perubahan struktural tersebut.

Perubahan struktural ini juga perlu dilakukan oleh negaranegara industri lainnya. Amerika Serikat, walaupun menganut falsafah perdagangan bebas, pada saat ini tetap melaksanakan tindakan-tindakan pembatasan dalam bidang perdagangan. Menurut pengamatan, proteksionisme di Amerika Serikat diselenggarakan dalam bentuk terselubung, misalnya dalam membatasi masuknya alat-alat televisi Jepang tidak ditetapkan suatu kuota impor tetapi ditetapkan dengan jalan "orderly marketing agreements". Masalah utama yang dihadapi pemerintah Amerika Serikat adalah struktur ekonominya yang tidak memungkinkan terjadinya koeksistensi antara neraca perdagangan jangka-panjang yang sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima secara politis. 1 Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk impor di Amerika Serikat lebih besar daripada yang terdapat di negara-negara partner dagangnya yang utama. Hal ini berarti bahwa dengan cara memperlambat pertumbuhan ekonomi saja tidak pernah akan dicapai keseimbangan neraca pembayaran. Kekurang-percayaan pasaran mata-uang asing (foreign exchange markets) terhadap kemampuan pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam neraca transaksi berjalannya (current account) mengakibatkan dipercepatnya nilai dollar mengalami kemerosotan.

¹ Lihat J. Alexander Caldwell, The International Economic and Financial Outlook: Perspectives for 1979, Presented to the Foreign Trade Association of Southern California, November 1978

Bersamaan dengan perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional dan dunia finansial seperti diuraikan di atas, tampak telah terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di banyak negara yang selama ini masih terbelakang. Kedudukan bersaing negara-negara berkembang sedang mengalami perubahan dengan perubahan dari titik berat strategi pembangunannya, dari produsen bahan-bahan primer ke arah perdagangan hasil-hasil industri manufacturing. Seketika negara-negara berkembang ini menaiki anak tangga pembangunan maka tidak bisa dihindarkan bahwa mereka menjadi saingan dari industri-industri di negara-negara maju yang sebenarnya telah menjadi semakin rawan.

Pengaturan pola produksi dan perdagangan dunia akan mempengaruhi kemampuan bersaing negara-negara atau sektorsektor tertentu di masing-masing negara. Meningkatnya interdependensi, vang termanifestasikan dalam pengaruh-pengaruh terhadap kemampuan bersaing, diharapkan akan menggerakkan proses perubahan-perubahan struktural secara terus-menerus, khususnya di negara-negara industri. Tetapi lambatnya peningkatan penanaman modal di negara-negara industri mempersulit perubahan struktural ini. Sementara itu pemerintahpemerintah negara-negara tersebut menghadapi tekanan-tekanan yang semakin meningkat untuk melindungi sektor-sektor yang berada dalam kesulitan melalui cara-cara intervensi di sektor eksternal dari ekonominya. Dalam keadaan di mana tingkat pengangguran di negara-negara industri itu sudah cukup tinggi maka semakin sulit diharapkan adanya usaha untuk menghindarkan proteksi perdagangan terhadap ekspor negara-negara berkembang.

Sejauh ini banyak negara berkembang meningkatkan hutang luar negerinya untuk dapat membiayai impor dari negaranegara industri. Selama tahun-tahun terakhir ini tingkat pinjaman yang tinggi oleh negara-negara berkembang ini sebenarnya telah membantu memperlemah resesi dunia. Selain itu pengalaman dalam tahun 1970-an ini juga menunjukkan bahwa negaranegara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekspor yang

tinggi juga merupakan negara-negara yang menjadi pasaran yang semakin besar bagi ekspor hasil-hasil industri negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang meningkatkan interdependensinya dengan negara-negara industri. Tetapi interdependensi ini belum bersifat simetris.

Hubungan yang tidak simetris ini mengambil berbagai macam bentuk. Salah satu contoh hubungan seperti ini adalah hubungan ekonomi dan perdagangan antara Jepang dan ASEAN, yang sering kali dilihat sebagai pola hubungan yang bersifat kliental (client-patron relationship). ¹ Tuntutan negaranegara berkembang untuk menciptakan tata ekonomi internasional yang baru dapat dilihat sebagai usaha negara-negara berkembang untuk menciptakan interdependensi ekonomi dengan negara-negara industri yang bersifat lebih simetris.

PROSPEK DI KAWASAN ASIA-PASIFIK

Dari tinjauan global di atas, Kawasan Asia-Pasifik menduduki tempat yang cukup unik. Sejauh ini, dengan berbagai kesulitan yang terjadi di dunia, Kawasan Asia-Pasifik telah dapat mempertahankan dinamisme yang cukup mengesankan.² Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini telah meletakkan kawasan ini di atas bagian dunia lainnya.

Ulasan data secara singkat di bawah ini menunjukkan bahwa di Kawasan Asia-Pasifik telah terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam pola produksi dan perdagangan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa hasil dari perubahan dan pergeseran ini telah membantu perkembangan di banyak negara berkembang di kawasan ini.

¹ Lihat J. Panglaykim, "Japan-ASEAN Trade Relations: Some Problems and Prospects", dalam Japan-Indonesia Relations in a Global Context (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, October 1978)

Dalam kertas ini Kawasan Asia-Pasifik terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru dalam kelompok negara industri, dan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Pilipina, Muangthai, dan Indonesia dalam kelompok negara berkembang.

PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK 1961-1978

mpor mina-mawasan	and a
1967 1970 1	1974 1977 1978
52,0	44,9
75,3	76,2
48,7	56,4
56,1	47,6
50,1	56,6 56,4 56,9
65,5	55,8
51,6	58,5
81,1	72,4
82,0	70,9
54,0	63,9
74,5	94,2
63,9	55,7 57,5 60,4
59,8	
1967 1967 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9	7 1970 52,0 75,3 75,3 48,7 56,1 50,1 50,1 51,6 81,1 82,0 54,0 74,5 63,9 59,8

b) Urutan berdasarkan tingkat GNP per kepala yang tertinggi (tahun 1977)
 c) Angka-angka perdagangan Singapura tidak termasuk dengan Indonesia

c) Angka-angka perdagangan Singapura tidak termasuk dengan Indonesia Sumber: Diolah dari IMF, Direction of Trade (berbagai nomor penerbitan)

Interaksi ekonomi antara negara-negara tercermin dalam pola hubungan perdagangan, dan pada dasarnya data-data perdagangan ini merupakan manifestasi dari perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Tabel 1 menunjukkan perkembangan perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik selama periode 1961-1978. Kesan utama yang diperoleh dari data ini adalah sebagai berikut:

- perdagangan (ekspor dan impor) intra-kawasan, yaitu antara negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik, telah menjadi semakin intensif selama periode 1961-1978 ini. Artinya, bagi setiap negara di kawasan ini bagian dari keseluruhan ekspor dan impornya dengan dunia yang dilakukan dengan negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik sendiri menjadi semakin besar. Sebagai contoh, pada tahun 1961 ekspor Australia ke negara-negara di kawasan ini adalah 40,3% dari seluruh ekspornya; pada tahun 1978 bagian ini meningkat menjadi 62,5%. Impor Australia dari kawasan ini juga meningkat dari 35,5% pada tahun 1961 menjadi 57% pada tahun 1978 dari keseluruhan impornya.
- pergeseran di atas sangat jelas terjadi dalam periode 1961b) 1970, dan mengalami perubahan dalam periode selanjutnya, khususnya setelah terjadi kenaikan harga minyak bumi pada tahun 1973 dan 1974. Ekspansi perdagangan di kawasan ini agak mengalami pengalihan (diverted) sebagai akibat kenaikan harga minyak bumi, khususnya yang menyangkut negara-negara pengimpor minyak. Sebagai contoh, pada tahun 1970 sekitar 52% impor Amerika Serikat berasal dari kawasan ini (37,4% pada tahun 1961), tetapi menurun menjadi 45,1% pada tahun 1974. Untuk Jepang, impor dari kawasan ini mencapai 56,1% pada tahun 1970 tetapi menurun menjadi 49,2% pada tahun 1974. Hal yang sama juga dialami beberapa negara berkembang di kawasan ini, misalnya impor Korea dari kawasan menurun dari 82% (1970) menjadi 75% (1974); impor Taiwan dari kawasan menurun dari 81,1% (1970) menjadi 69,8% (1974). Untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dengan negaranegara di kawasan, maka ekspor negara-negara ini ke Kawasan Asia-Pasifik juga mengalami penurunan. Misalnya

- ekspor Korea ke kawasan juga menurun dari 85% (1970) menjadi 77,8% (1974); ekspor Taiwan ke kawasan ini menurun dari 80% (1970) menjadi 76,8% (1974). Tabel 2 memberikan data perkembangan perdagangan beberapa negara Asia-Pasifik dengan kelompok negara pengekspor minyak. Tabel ini menerangkan pengalihan arah perdagangan ini sebagai akibat dari impor minyak yang melonjak dengan tiba-tiba pada tahun 1974.
- pergeseran di atas tidak berlaku untuk negara-negara yang c) dapat mencukupi kebutuhan energinya sendiri, baik negara berkembang (Indonesia, Malaysia) maupun negara industri (Kanada, Australia). Tetapi ada juga kemungkinan bahwa pergeseran di atas hanya bersifat temporer. Seperti terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2, pada tahun 1978 telah terjadi peningkatan kembali dalam perdagangan negara-negara pengimpor minyak dengan Kawasan Asia-Pasifik dan penurunan dalam perdagangannya dengan kelompok negara pengekspor minyak. Misalnya, impor Amerika Serikat dari negara-negara pengekspor minyak meningkat dari 3,9% (1970) menjadi 14,9% (1974) dan meningkat lagi menjadi 22,5% pada tahun 1977, tetapi dalam tahun 1978 menurun menjadi 17,7%. Perkembangan yang sama juga terlihat untuk Jepang dan Korea. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik akan meningkat lagi.

Salah satu alasan yang dapat menerangkan mengapa gejala pengalihan perdagangan ini (trade diversion) ke kelompok negara-negara pengekspor minyak ini hanya bersifat temporer adalah kenyataan terbatasnya kapasitas absorpsi sebagian terbesar negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah. Sesedikitnya, dapat dikatakan bahwa kapasitas absorpsi ini lebih tinggi di Kawasan Asia-Pasifik daripada di Timur Tengah. Tampaknya perbedaan kapasitas absorpsi ini mempengaruhi arah perdagangan internasional. Seperti diuraikan sebelumnya, pada saat ini bagi banyak negara ekspor memegang peranan yang penting dalam usaha mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya.

Tabel 2

MINYAK a) 1970-1978 PERDAGANGAN BEBERAPA NEGARA ASIA-PASIFIK DENGAN KELOMPOK NEGARA PENGEKSPOR

Amerika Serikat Jepang Taiwan Korea Pilipina Muangthai		
4,4 5,0 4,6 1,9 0,2 5,1	1970	
6,5 9,7 5,3 3,8 1,0	1974	Eksp
11,2 14,6 8,5 12,4 3,9 12,5	1977	Ekspor b)
11,2 14,4 8,0 11,8 4,0 11,2	1978	
3,9 15,0 4,8 6,5 8,4 5,2	1970	7
14,9 32,7 13,9 16,4 17,6 16,9	1974	li li
22,5 35,3 15,0 21,4 15,2 15,8	1977	Impor b)
17,7 32,0 17,2 17,3 17,3 17,2	1978	

Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Pengekspor Minyak, terdiri dari Algeria, Indonesia, Iran, Irak,

Sumber: Diolah dari 1MF, Direction of Trade (berbagai nomor penerbitan) b) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan dunia Kuwait, Libia, Nigeria, Oman, Qatar, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Venezuela

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN KAWASAN ASIA-PASIFIK a) 1964-1978

(10,0)	(10,9)	(9,5)	(4.8)	(4.9)	(5.2)	sebagai % dari Dunia
244.140	228.946	146.805	27.602	18.958	15.995.	(juta \$) Pengekspor Minyak
(32,3)	(32,1)	(32,7)	(33,3)	(32,0)	(29,8)	dari Dunia Pengekspor Minyak
2.432.300	2.092.700	1.549.499	579.146	387.063	309.439	Dunia (juta \$) Asia-Pasifik sebagai %
2,	2,6	2,2	I,I	1,1	1,3	Indonesia
1,2	1,2	1,1	1,0	. 1,4	1,4	Muangthai
1,1	I,I	1,2	1,2	1,6	1,7	Pilipina
1.7	1,6	1.7	1,6	1.4	: 3	Malaysia
2 C	2,1	2,0	1,5	1,2	0,5	Laiwan
3,2	3,0	2,5	2,00	2,4	23	Hong Kong
2	2,8	2,8	2,1	0,8	:	Singapura
18,9	18,0	16,2	12,8	10,9	10,9	Neg. Berkembang
0	1,0	1,2	1,3	1,5	2,2	Selandia Baru
22	22,7	23,2	19,8	16,7	14,9	Jepang
Lu	4,0	4,6	5,1	5,7	6,5	Australia
12	12,7	14,0	16,6	16,7	15,4	Kanada
41	41,6	40,8	44,5	48,5	50,2	Amerika Serikat
81	82,0	83,8	87,2	89,1	89,1	Neg. Industri
100	100	100	100	100	100	Asia-Pasifik (juta S((%)
784.832	671.003	506.561	192.725	123.809	92.237	
1978	1977	1974	1970	1967	1964	

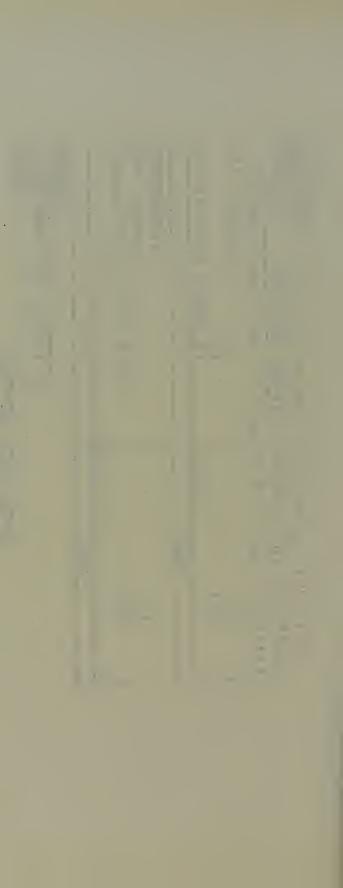
a) Total ekspor dan impor dengan dunia masing-masing negara di Kawasan Asia-Pasifik Sumber: Diolah dari IMF Direction of Trade (berbagai nomor penerbitan)

ANALISA 1979 No.10

RALAT:

1. Halaman 904 (Tabel 3):
Dicetak:

Dicetak: KELOMPOK NEGARA INDONESIA a) 1961-1978 Seharusnya: KELOMPOK NEGARA INDUSTRI a) 1961-1978	Neg. Industri 2. Halaman 906 (Tabel 4): Baris ke-3 dari atas.	Asia-Pasifik (juta \$)	Neg. Industri Seharusnya:	Asia-Pasifik (juta \$((%)	A COLUMN TO THE THE PARTY OF TH
INDONESIA ^{a)} 1961-1978	ris ke-3 dari atas	92.237	89,1	92,237	1964



Tabel 3 menunjukkan perkembangan perdagangan (ekspor dan impor) negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan dunia selama periode 1974-1978. Bagian Kawasan Asia-Pasifik dari keseluruhan perdagangan dunia meningkat dari 29,8% pada tahun 1964 menjadi 33,3% pada tahun 1970, tetapi menurun menjadi 32,7% (1974) dan 32,1% (1977). Dalam tahun 1978 bagian ini bertahan pada tingkat 32,3% dari keseluruhan perdagangan dunia. Walaupun kenaikan harga minyak bumi meningkatkan bagian dari kelompok negara pengekspor minyak dalam perdagangan dunia, dari 4,8% pada tahun 1970 menjadi 10,9% pada tahun 1977, tetapi tampaknya bagian dari Kawasan Asia-Pasifik tidak mengalami penurunan yang berarti. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa peranan yang penting dalam mempertahankan posisi Asia-Pasifik telah dimainkan oleh negara-negara berkembang dalam kawasan ini. Dari keseluruhan perdagangan Kawasan Asia-Pasifik, pada tahun 1964 bagian dari kelompok negará berkembang adalah 10,9%, dan meningkat secara pesat sejak tahun 1970 sehingga mencapai 18,9% pada tahun 1978. Peranan yang utama telah diambil oleh Korea, Taiwan dan Hong Kong.

Meningkatnya peranan kelompok negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini terlihat dari Tabel 4 dan Tabel 5, yaitu distribusi perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik. Tabel 4 menggambarkan perkembangan perdagangan intrakawasan ditinjau dari ekspor dan impor negara-negara ini dengan kelompok negara industri di kawasan. Secara umum dapat dilihat bahwa baik ekspor ke maupun impor dari kelompok negara industri oleh kelompok negara industri itu sendiri telah menurun selama periode 1961-1978. Artinya, kelompok negara berkembang menjadi partner perdagangan yang semakin penting bagi kelompok negara industri di Kawasan Asia-Pasifik ini. Hal ini terlihat dengan jelas dari Tabel 5. Sebagai contoh, pada tahun 1961 ekspor Amerika Serikat ke kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik adalah 15,1% dari seluruh ekspornya ke Kawasan Asia-Pasifik, tetapi pada tahun 1978 telah meningkat menjadi 20,9%. Demikian pula impor Amerika Serikat dari kelompok negara berkembang meningkat dari

DISTRIBUSI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK EKSPOR KE DAN IMPOR DARI KELOMPOK NEGARA INDONESIA a) 1961-1978

				Ekspor b)	3					П	Impor b)			
	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978
Neg. Industri Amerika Serikat	84.9	86.9	85,8	84,9	82,8	80,5	79,1	84,5	85,4	86,7	85,6	79.2	74,6	74,3
Kanada	98,5	98,2	98,9	.98,8	98,6	98,3	98,1	99,0	90,6	98,6	98,1	97,5	96,6	96,6
Australia	84,6	83,6	81,2	83,1	80,2	81,6	77,0	85,9	87,6	89,9	91,2	84,8	81,7	81,6
Jepang	58,6	65,0	63,1	64,4	61,2	60,7	58,6	81,4	77,4	77,4	77,0	64,8	62,4	61,9
Selandia Baru	96,6	94,0	94,7	95,9	86,2	81,2	80,9	92,8	93,0	93,7	94,0	88,3	90,2	89,3
Neg. Berkembang				10.01										
Singapura	58,5		52,6	43,3	53,9	52,6	52,1	79,8	:	67,8	54,7	63,3	60,0	61,6
Hong Kong	54,7	62,6	69,8	81,1	72,3	75,2	73,5	72,9	75,4	77,6	78,1	68,1	67,2	67,3
Taiwan	66,6	73,6	69,2	75,0	78,0	78,3	78,3	92,4	89,4	90,7	87,8	85,1	83,7	86,3
Korea	45,4	79,0	88,8	91,8	89,8	87,5	87,9	91,3	93,7	89,0	87,8	89,2	89,3	90,5
Malaysia	90,6	:	88,8	54,6	55,7	63,8	64,4	37,1	:	82,9	62,6	68,6	68,9	70,3
Pilipina	96,7	96,1	91,8	92,1	95,0	89,7	84,1	88,7	90,9	91,6	89,9	91,0	83,0	81,6
Muangthai	34,0	38,9	53,8	59,0	52,2	52,5	57,6	71,1	80,4	87,2	88,6	88,5	84,5	79,6
Indonesia	87,0	86,9	89,7	72,2	86,5	82,0	83,8	80,5	68,0	58,8	83,8	75,2	68,2	70,8

Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Industri di Kawasan Asia-Pasifik, terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Selandia Baru

b) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik Sumber: Diolah dari IMF, Direction of Trade (berbagai nomor penerbitan)

KELOMPOK NEGARA BERKEMBANG a) 1961-1978 DISTRIBUSI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK EKSPOR KE DAN IMPOR DARI

a) Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Berkembang di Kawasan Asia-Pasifik, terdiri dari Singapura,	Neg. Industri Amerika Serikat Kanada Australia Jepang Selandia Baru Neg. Berkembang Singapura Hong Kong Taiwan Korea Malaysia Pilipina Muangthai Indonesia		
e dan 1m	ikat 15,1 1,5 15,4 41,4 41,4 41,5 45,3 33,4 54,6 9,4 9,4 13,0	1961	
por I		61	
Dari Ke	13,1 1,8 16,4 35,0 6,0 6,0 37,4 26,4 21,0 3,9 61,1	1964	
ompok	14,2 1,1 18,8 36,9 5,3 5,3 47,4 30,2 30,8 111,2 111,2 111,2 10,3	1967	
Negara	15,1 1,2 16,9 35,6 4,1 56,7 18,9 25,0 8,2 45,4 7,9 41,0	1970	Ekspor b)
Berkem	17,2 1,4 19,8 38,8 13,8 13,8 10,2 46,1 27,7 22,0 10,2 44,3 5,0 47,8	1974	9,
bang di	19,5 1,7 18,4 39,3 18,8 47,4 47,4 22,8 21,7 112,5 36,2 10,3	1977	
Kawasa	20,9 1,9 23,0 41,4 19,1 19,1 12,1,3 35,6 15,9 42,4	1978	
n Asia-P	15,5 1,0 14,1 18,6 7,2 20,2 27,1 7,6 8,7 62,9 11,3 28,9	1961	
asifik, t	15,6 1,4 12,4 22,6 7,0 7,0 24,6 10,6 6,3 9,1 19,6 32,0	1964	
erdiri da	13.3 11,4 10,1 22,6 6,3 32,2 32,2 22,4 9,3 111,0 117,1 8,4 41,2	1967	In
ri Singa	14,4 1,9 8,8 23,0 6,0 45,3 21,9 12,2 12,2 11,4 16,1	1970	Impor b)
pura,	20,8 2,5 115,2 35,2 111,7 36,7 31,9 10,8 31,4 9,0 11,5 24,8	1974	
	25,4 3,4 118,3 37,6 9,8 40,0 32,8 116,3 110,7 117,0 15,5 31,8	1977	
	25,7 3,4 18,4 38,1 10,7 10,7 13,7 9,5 29,7 18,4 20,4 29,2	1978	

ভ Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik Hong Kong, Taiwan, Korca, Malaysia, Pilipina, Muangthai, Indonesia

Sumber: Diolah dari IMF, Direction of Trade (berbagai nomor penerbitan)

MATRIKS PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK, 1978

 a) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik Sumber: Diolah dari IMF, Direction of Trade Yearbook 1979 Taiwan Singapura Ekspor Ke a) Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia Norea. Hong Kong Jepang Kanada Impor Dari a) 50,5 19,1 Amerika Serikat 1,1 25,3 37,9 89,6 22,5 0,3 0,5 4,0 1,0 50,4 Kanada 4,2 40,5 0,8 1,5 1,6 1,9 7,4 4,4 8,2 1,2 6,5 22,3 Ţ. Australia 36,5 9,9 4. 4,3 13,7 0,9 2,2 5,2 36,3 26,1 16,6 Jepang 45,5 30,9 35,6 55,5 48,6 40,6 33,8 1,1 34,0 5,8 0,2 0.1 0,7 0,1 1,0 9 0,3 0,7 7,2 Selandia Barn 0,9 0,6 -,4 0,5 0,7 0,3 0,7 1,6 0,9 5,5 13,5 5,2 4,5 3,0 0,2 Singapura 13,1 8,2 6,5 -4 2,0 2,3 3,4 0,3 1,3 3,0 9,4 0,4 2,2 6,0 0,2 Hong Kong 5,3 2,4 2,8 0,6 2,0 4,3 0,8 2,4 1,3 5,0 1,6 Taiwan 12,0 4,3 4,4 6,7 7,3 3,5 1,0 4,5 4 1,0 2,9 1,4 1,5 Korea 2,2 5,0 1,9 1,9 6,7 2,2 = 0,9 9,9 0,3 0,6 0,9 21,4 2,8 Malaysia 2,0 2,2 ... 3,0 0,2 4,9 1,8 2,5 -00 6,0 1,0 2,0 1,2 3,0 Pilipina 0,2 1,5 0,4 0,7 0,9 27 0,9 / 2 0,6 0,4 6,6 3,0 0,2 1,2 Muangthai 4. 0,6 6,5 0,4 4.4 0,6 0,8 2,9 0,2 2,2 0,5 0,0 5,1 0.4 E La 0,2 1,3 Indonesia 0,9

15,5% (1961) menjadi 25,7% (1978). Perkembangan yang sama juga ditunjukkan oleh negara-negara industri lainnya di kawasan ini.

Di antara negara-negara industri di Kawasan Asia-Pasifik peranan Amerika Serikat dan Jepang masih terbesar dan jauh melebihi peranan negara-negara lain. Seperti terlihat dalam Tabel 3, dari keseluruhan perdagangan (ekspor dan impor) di Asia-Pasifik, pada tahun 1978 bagian dari Amerika Serikat adalah 41,6% dan bagian dari Jepang adalah 22,7%. Bagi Amerika Serikat, Kanada masih merupakan sumber impor yang terutama yaitu 40,5% dari keseluruhan impornya dari Kawasan Asia-Pasifik, disusul oleh Jepang sebesar 30,9% Kawasan Asia Timur (Korea, Taiwan, Hong Kong) sebesar 15,9%, ASEAN sebesar 9,9% dan Australia dengan Selandia Baru secara bersama-sama sebesar 2,9% (tahun 1978). Sedangkan bagi Jepang terdapat urutan impor sebagai berikut (tahun 1978): Amerika Serikat (38,3%) ASEAN (25,6%), Australia dan Selandia Baru (15,4%), Asia Timur (12,5%) dan Kanada (8,2%).

Dalam kelompok negara-negara berkembang di kawasan ini terdapat dua pola perkembangan yang berbeda. Negara-negara berkembang yang telah maju dalam industrialisasinya seperti Korea, Taiwan, dan Hong Kong, selama periode 1961-1978 ini secara menyolok meningkatkan ekspornya ke negara-negara industri, tetapi pada saat bersamaan juga telah meningkatkan impornya dari kelompok negara-negara berkembang di kawasan ini. Tabel 4 menunjukkan bahwa ekspor Hong Kong ke kelompok negara industri di Kawasan Asia-Pasifik meningkat dari 54,7% (1961) menjadi 73,5% (1978). Impor Hong Kong dari kelompok negara industri menurun dari 72,9% (1961) menjadi 67,3% (1978). Artinya impor dari kelompok negara berkembang meningkat dari 27,1% (1961) menjadi 32,7% (1978). Kelompok negara berkembang lainnya, yaitu negara-negara ASEAN, hampir semuanya meningkatkan bagian dari ekspor dan impornya dengan kelompok negara berkembang. Ekspor Malaysia ke kelompok negara berkembang di Asia-Pasifik meningkat dari

Lihat Tabel 6

9,4% (1961) menjadi 35,6% (1978) dari seluruh ekspornya ke kawasan ini (Tabel 5). Di antara negara-negara ASEAN perkembangan Muangthai merupakan pengecualian; selama periode 1961-1978 ini baik ekspornya ke maupun impornya dari kelompok negara industri mengalami peningkatan. Perkembangan ini mungkin dapat dimengerti karena dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pada tahun 1961 ekspor Muangthai ke kelompok negara industri (34%) dari keseluruhan ekspornya ke kawasan ini berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, misalnya Pilipina (96,7%), Malaysia (90,6%) dan Indonesia (87%).

Tabel 6 menggambarkan arus pertukangan barang (ekspor dan impor) antara negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik dalam tahun 1978. Seperti disebutkan terdahulu, bagi kawasan ini Amerika Serikat dan Jepang merupakan pasaran yang utama, baik sebagai pasaran bahan-bahan mentah maupun pasaran barang-barang industri manufacturing, baik yang berasal dari kelompok negara industri maupun kelompok negara berkembang. Tetapi matriks perdagangan intra-kawasan ini (Tabel 6) menunjukkan bahwa perkembangan selama periode 1961-1978 ini belum menghasilkan interdependensi yang simetris antara kelompok negara industri dengan kelompok negara berkembang, khususnya ASEAN. Namun demikian terlihat adanya kaitankaitan baru yang memberikan kesan adanya pentahapanpentahapan dalam pola interaksi hubungan ekonomi — perdagangan yang selaras dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Interdependensi ekonomi telah menjadi lebih simetris antara kelompok negara industri dengan kelompok negara berkembang yang maju dalam industrialisasinya (Korea, Taiwan, Hong Kong) dan antara negara-negara ini dengan kelompok negara berkembang lainnya (negara-negara ASEAN). Bagaimana perkembangan selanjutnya masih merupakan tanda tanya, oleh karena seperti diuraikan sebelumnya, interdependensi yang meningkat itu juga mempunyai persoalan-persoalannya tersendiri.

Tahun 1978 dapat dianggap telah merupakan salah satu batu ujian bagi perkembangan ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik ini.

Potensi-potensi ke arah pola hubungan ekonomi yang sehat di kawasan ini ternyata tetap ada biarpun dalam situasi yang penuh kesulitan dalam tahun 1978. Suatu survei oleh harian *The Asian Wall Street Journal* dalam bulan September 1978 beranggapan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini cukup memadai dalam tahun 1978 ini walaupun para perencana ekonomi dihadapi oleh masalah-masalah yang sulit.

Proteksionisme memang merupakan gangguan tetapi bukan merupakan hambatan utama bagi ekspor oleh negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini. Ekspor oleh negara-negara berkembang di kawasan ini meningkat dengan pesat dan merupakan bagian yang besar dari ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan. Selain itu, di sektor industri manufacturing di negara-negara berkembang di kawasan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan "economies of scale" yang secara potensial ada. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pertumbuhan ekspor oleh negara-negara ini masih akan meningkat di masa yang akan datang.

Negara-negara di kawasan ini yang mengalami pertumbuhan ekspor yang paling pesat adalah Taiwan, Korea dan Hong Kong, dan memang negara-negara ini telah menjadi sasaran utama dari negara-negara industri dalam pembatasan-pembatasan impor. Walaupun demikian negara-negara telah dapat mempertahankan tingkat ekspor yang tinggi, terutama karena usaha diversifikasi produk secara terus-menerus. Di balik negara-negara ini terdapat negara-negara yang mulai muncul sebagai eksportir hasil-hasil industri manufacturing (negara-negara ASEAN). Negara-negara ini sedikit demi sedikit akan mengambil alih industri-industri ekspor yang berada di negara-negara berkembang yang sudah maju, yang juga harus naik anak tangga pembangunan. Proses serupa ini dapat disebut sebagai proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) dan sejauh ini telah merupakan sebab utama bahwa pertumbuhan dan dinamika ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik dapat dipertahankan.

Tabel 7 menunjukkan struktur ekspor dan impor negaranegara di Kawasan Asia-Pasifik, untuk tahun 1970 dan tahun

Tabel 7

STRUKTUR EKSPOR DAN IMPOR NEGARA-NEGARA ASIA-PASIFIK

Hasil-hasil Industri Manufacturing Sebagai Bagian Dari Total: a) Ekspor **Impor** Neg. Industri Amerika Serikat Kanada Australia Jepang Selandia Baru Neg Berkembang Singapura Hong Kong Taiwan Korea Malaysia Pilipina Muangthai Indonesia

a) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan dunia Sumber: Diolah dari World Bank, World Development Report 1979

1976. Selama periode yang singkat ini terjadi perkembangan yang cukup menyolok dalam struktur ekspor dan impor di negara-negara Asia-Pasifik, secara khususnya seperti yang ditunjukkan dalam bagian hasil-hasil industri manufacturing dalam ekspor dan impor mereka. Tabel ini menunjukkan bahwa baik dalam komposisi ekspor maupun impor telah terjadi kenaikan bagian dari hasil-hasil industri manufacturing. Hal ini berlaku untuk kelompok negara industri maupun untuk kelompok negara berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perkembangan struktural ekonomi-ekonomi kelompok negara berkembang ke arah industrialisasi memperbesar interaksinya dengan kelompok negara industri, dan bukan memperkecil hubungan ekonomi antara mereka. Industrialisasi di kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik telah mengambil alih industri-industri di kelompok negara maju yang sudah menjadi lapuk dan lapuh, dan karena itu sudah tidak dapat bersaing. Pasaran ini digantikan oleh ekspor dari kelompok negara berkembang. Sebaliknya untuk menyelenggarakan industrialisasi ini negara-negara berkembang meningkatkan impor barangbarang modal dari negara-negara industri. Dengan demikian interaksi ekonomi dua arah ini menjadi semakin intensif dan saling menguntungkan.

Investasi di negara-negara berkembang ini Kawasan Asia-Pasifik ini telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada di bagian lain dari Dunia Ketiga. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) di Kawasan Asia-Pasifik ini. Dari keseluruhan investasi langsung dari Jepang ke luar negeri sebesar US\$ 3 milyar (tahun anggaran 1977), sekitar 21% atau US\$ 640 juta ditujukan ke ASEAN. Dari jumlah penanaman modal Amerika Serikat ke luar negeri sebesar lebih dari US\$ 3 milyar (1978), sekitar 35% ditujukan kepada negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik. Tabel 8 menunjukkan perkembangan investasi, pertumbuhan industri manufacturing, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekspor di negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik. Data-data ini memberikan gambaran yang singkat tentang arah perkembangan ekonomi di kawasan ini seperti diuraikan di atas.

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA-PASIFIK 1960-1977

Investasi Sebagai % PDB Manufacturing Dan Pertumbuhan PDB
1977 1960-1970 1970-1977
1 23
1,37
1.48
1,48 1,48
1.00 1.40 1.40 2.00
1.05 1.48 1.88 2.02
1,00

Prospek selanjutnya dari proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang diuraikan di atas dapat dihambat oleh dua faktor utama, yaitu:

- a) terjadinya lagi instabilitas dalam sistem moneter internasional;
- b) menurunnya pertumbuhan ekonomi (PDB) dan permintaan untuk impor di negara-negara industri.

Ketidakstabilan sistem moneter internasional selama tahuntahun terakhir ini ditandai oleh merosotnya nilai dollar dan meningkatnya nilai yen secara dramatis. Perkembangan-perkembangan nilai mata-uang itu mempengaruhi perdagangan luar negeri, produksi, lapangan kerja, neraca pembayaran, tingkat inflasi, dan daya saing ekspor.

Kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik telah mengalami pengaruh yang besar dari perkembangan nilai mata-uang di atas. Jepang merupakan rekanan utama negaranegara ini untuk barang-barang modal dan barang-barang setengah-jadi yang dibutuhkan oleh industri manufacturing mereka. Sementara itu Amerika Serikat merupakan pasaran ekspor utama bagi hasil-hasil industri manufacturing dari negara-negara berkembang. Dengan demikian, perkembangan nilai mata-uang di atas telah mengakibatkan meningkatnya harga impor dan menurunnya nilai ekspor negara-negara berkembang tersebut. Oleh karena struktur hubungan yang sedemikian ini maka banyak negara di Kawasan Asia-Pasifik ini untuk membiarkan nilai mata-uangnya ikut merosot dengan nilai dollar (depresiasi) untuk mempertahankan daya saing ekspornya. Selaras dengan "cheap yen policy" yang dijalankan Jepang, banyak negara membiarkan mata-uang mereka "undervalued" dengan harapan dapat mempertahankan pertumbuhan ekspornya guna membantu pembangunan struktur industri yang semakin luas. Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Pilipina dan Malaysia mengharapkan dapat mengambil peluang untuk mengambil alih sektor-sektor ekspor di mana Jepang tidak lagi dapat bersaing. Formula serupa ini telah dilakukan beberapa tahun yang lalu di sektor industri tekstil.

Perkembangan di atas menunjukkan bagaimana ekonomiekonomi yang berada pada tahapan pembangunan yang berbeda dapat saling mengisi (bersifat komplementer) dan tidak perlu menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Tampaknya, prospek yang terbaik bagi negara-negara berkembang di kawasan ini untuk mengambil alih peranan Jepang bukan terletak pada sektor industri barang-barang konsumen yang padat karya, tetapi di sektor-sektor industri dasar besi dan baja serta barang-barang alasannya adalah karena perusahaan-Salah satu perusahaan Jepang tampaknya berkecenderungan untuk memindahkan industri manufacturingnya di negara-negara industri yang merupakan pasaran utamanya karena pertimbangan proteksi yang mungkin akan diambil oleh negara-negara industri tersebut.

Dalam keadaan di mana moneter internasional berada dalam ketidakstabilan negara-negara pengekspor bahan-bahan primer merupakan pihak yang paling dirugikan. Negara-negara pengekspor bahan-bahan primer di Asia Tenggara secara langsung merasakan akibat keadaan ini. Memburuknya ''terms-of-trade'' yang diderita negara-negara ASEAN sebagai akibat meningkatnya nilai yen kerapkali tidak dapat diimbangi oleh kenaikan harga komoditi-komoditi mereka.

Kekhawatiran kedua di pihak negara-negara berkembang di kawasan ini menyangkut prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri. Selama tahun-tahun terakhir ini Jepang telah mampu mengelola pertumbuhan PDB yang cukup tinggi. Namun pada saat ini terdapat beberapa persoalan dengan pertumbuhan Jepang, yaitu oleh karena komponen utama pertumbuhan tersebut adalah ekspornya, sementara permintaan dalam negeri dan investasinya tetap lemah (sluggish). Hal ini telah mengakibatkan surplus yang besar dalam neraca perdagangannya, hal mana mengganggu negara-negara lain. Kelemahan investasi di Jepang tampaknya bersifat struktural, terutama

Untuk uraian yang terperinci mengenai hal ini lihat R.B. Soehartono, "World Economy and Japan", dalam Japan-Indonesia Relations in A Global Context (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, October 1978)

sebagai akibat dari kenyataan bahwa Jepang tidak lagi dapat mendasarkan diri pada peningkatan yang luar biasa dalam produksi barang-barang manufacturingnya, khususnya untuk ekspor. Sementara ini Jepang telah menyatakan kesediaan untuk mengurangi surplusnya, tetapi hal ini lebih banyak dilakukan melalui pembelian barang-barang modal berteknologi tinggi dari negara-negara industri (misalnya pesawat terbang) daripada meningkatkan impor hasil-hasil industri manufacturing negara-negara berkembang.

Untuk jangka panjang, Jepang hanya dapat mengatasi masalah neraca pembayarannya melalui usaha penyesuaian-penyesuaian struktural ekonominya. Khususnya dalam keadaan di mana nilai yen tetap tinggi dan investasi dalam negeri yang lemah, maka ekonomi Jepang tampaknya akan bergeser ke arah "ekonomi pengetahuan" (knowledge economy), yaitu jasa-jasa dan aktivitas ekonomi berteknologi tinggi lainnya. Dengan perubahan struktur ekonomi ini maka permintaan untuk impor bahan-bahan mentah dari Asia Tenggara akan menurun. Keadaan ini sebenarnya memberikan peluang kepada negaranegara berkembang yang maju industrinya di kawasan ini untuk mengambil alih jenis-jenis kegiatan yang ditinggalkan oleh perubahan struktural ekonomi Jepang.

Sejak resesi tahun 1975 Amerika Serikat telah memainkan peranan utama sebagai lokomotif untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi beberapa negara. Penurunan dalam pertumbuhan PDB Amerika Serikat juga merupakan ancaman bagi negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik. Dalam keadaan ini juga terdapat bahaya bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan-tindakan proteksi terhadap negara-negara berkembang yang maju industrinya. Hal ini dapat menimbulkan stagnasi dalam proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang melibatkan negara-negara berkembang lainnya di Kawasan Asia-Pasifik ini (ASEAN).

Faktor utama yang telah memungkinkan negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini meningkatkan pertum-

buhan ekonominya adalah akses ke pasaran modal internasional. Kredit perbankan internasional untuk waktu yang akan datang masih akan tersedia untuk negara-negara berkembang di kawasan ini. 1 Walaupun tingkat bunga mengalami peningkatan yang terus-menerus, tetapi "spread" (bunga di atas LIBOR) telah menurun dan jangka waktu pinjaman telah menjadi semakin panjang. Beberapa negara, seperti Indonesia dan hingga beberapa waktu baru-baru ini juga Pilipina, menetapkan batas pinjaman secara komersial. Di negara-negara berkembang ini sektor negara telah memainkan peranan yang penting. Hal ini dimungkinkan oleh karena mudahnya akses ke pasaran modal internasional, dan oleh karena meningkatnya arus bantuan luar negeri secara bilateral maupun multilateral. Beberapa negara telah meningkatkan pengeluaran pemerintah karena meningkatnya pendapatan sehubungan dengan meningkatnya harga ekspor, seperti minyak bumi untuk Indonesia. Tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah dengan tingkat yang dialami dalam tahun-tahun yang lalu ini mungkin tidak dapat diteruskan secara berkepanjangan. Hal ini berarti bahwa sektor swasta di negara-negara ini harus mengambil peranan yang lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan.

PENUTUP

Pada umumnya negara-negara ASEAN masih cukup rawan terhadap perkembangan-perkembangan yang disebutkan di atas. Tetapi perubahan pola perdagangan dan investasi yang sekarang sedang terjadi di Kawasan Asia-Pasifik dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk mengubah kerawanan ekonominya terhadap perkembangan-perkembangan dunia ke arah kepekaan ekonomi yang dapat diatur secara bersama-sama. Negara-negara ASEAN ini perlu mengambil peranan yang lebih besar dalam proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang dibahas sebelumnya. Tetapi dalam persiapan-persiapan ini negara-negara ini juga perlu memperhitungkan bahwa di masa

Lihat ''The Uncontrollable 'Stateless Money' '', Far Eastern Economic Review,
 21 September 1979

yang akan datang ini mereka mungkin akan menghadapi kelangkaan (crowding out) modal internasional yang selama ini telah membiayai pembangunan di negara-negara ini.

Kelangkaan ini mungkin tidak berbentuk kekurangan jumlah modal yang dapat disediakan oleh pasaran modal internasional, tetapi lebih banyak disebabkan oleh tidak tersedianya instrumen pembiayaan yang tepat bagi negara-negara ini untuk melakukan perubahan struktural dari negara-negara pengekspor bahan-bahan mentah menjadi ''full-fledged trading nations''. Demikian pula jenis-jenis usaha yang akan dibangun mungkin meminta modal yang lebih banyak dalam bentuk ''equity capital''. Modal serupa ini harus dapat disediakan oleh ekonomi-ekonomi nasional itu sendiri.

PAPUA NEW GUINEA DAN PROS-PEK PENINGKATAN HUBUNGAN DENGAN INDONESIA*

R. Slamet ROOSMAN

Di Asia ini rupanya terdapat beberapa macam tembok besar. Sebuah di antaranya ialah tembok besar di Tiongkok Utara yang didirikan untuk menghalaukan serangan-serangan dari suku-suku musuh dari Utara. Ada sebuah tembok lagi yang tidak riil namun letaknya lebih dekat dengan Indonesia, berupa perbatasan antara Indonesia dan negara tetangganya di sebelah Timur, yaitu Papua New Guinea. Selain tembok ini yang secara fisik merupakan hutan-belukar yang menutupi sebagian besar kedua daerah perbatasan ini, juga memisahkan kedua bangsa, Indonesia dan Papua New Guinea, dalam suasana saling belum mengerti. Maka yang saya maksudkan dengan tembok ini ialah the "Wall of Ignorance". Ada bermacam-macam faktor yang telah menjadikan tembok ini masih tetap ada, antara lain sejarah dan politik yang sampai sekarang masih sulit ditembus. Dalam majalah Analisa terbitan CSIS bulan Januari 1973 dengan judul "Papua New Guinea: Satu kasus sekitar masalah suatu kemerdekaan" Dr. Hadi Soesastro telah memberikan keterangan mengenai tetangga Indonesia di sebelah Timur ini yang sejak 16 September 1975 telah memperoleh kemerdekaannya Australia. Ada beberapa karangan di dalam surat-surat kabar

Kuliah Umum di CSIS pada 30 Januari 1979, Prof. R. Slamet ROOSMAN adalah dosen pada Universitas Papua Nugini di Port Moresby.

Indonesia yang memberikan gambaran tentang keadaan negara tetangga ini. Ada kedutaan Papua New Guinea yang menyediakan penerangan berupa folders atau buku-buku kecil tentang negaranya. Tetapi, pada umumnya orang di Indonesia tak mengetahui banyak tentang Papua New Guinea. Kalaupun demikian, maka bayangan negara itu selalu dihubunghubungkan dengan keadaan-keadaan di daerah Irian Jaya yang sebelah-menyebelah dengan Papua New Guinea, memang dalam beberapa hal terdapat kesamaan, tetapi dalam hal lain berbeda pula.

Sayang pula bahwa tak banyak orang Indonesia berkunjung ke Papua New Guinea, mungkin karena route perdagangan tidak atau belum menjurus ke sana. Sangat berbeda halnya dengan Singapura, Malaysia, Manila ataupun daerah Australia yang lebih jauh letaknya, tetapi lebih dikenal orang di Indonesia.

Perlu saya terangkan di sini bahwa sejak tahun 1973 saya berada di Port Moresby — ibu kota Papua New Guinea — sewaktu negara itu masih dalam asuhan Australia. Waktu itu perwakilan Indonesia belum ada. Baru dua bulan sesudah saya tiba, maka Bapak Rudjito tiba dengan stafnya pada waktu itu sebagai Kepala Konsulat Jenderal Indonesia. Memang tak mudah bagi perwakilan Indonesia dalam suasana di mana pandangan umum tentang Indonesia sudah merupakan "idée fixe" yang kurang baik yang saya katakan ''idée fixe'' itu ialah bahwa ''image'' daripada Indonesia adalah seperti hantu yang menakutkan. Terutama setelah orang-orang putra daerah Irian, sejak tahun 1963 sewaktu Trikora mulai melarikan diri ke Papua New Guinea dengan membawa cerita-cerita mereka. Sangat ditakutkan kalaukalau tentara Indonesia memasuki wilayah Papua New Guinea juga. Ketakutan ini sampai sekarang masih tetap ada. Pemerintah Australia pada waktu itu dalam kebijaksanaannya mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di Pulau Manus di sebelah Utara. Mereka diberi "permissive residence" dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Lama-kelamaan setelah mereka diperkenankan meninggalkan Manus untuk bekerja di daratan Papua New Guinea, tak bisa dihindarkan bahwa pendapat umum masyarakat setempat menjadi terpengaruh oleh cerita-cerita baik yang benar maupun yang dibesar-besarkan. Tetapi kesemuanya itu tentu tak menguntungkan bagi Indonesia. Satu-satunya surat kabar di PNG yang berbahasa Inggris, yaitu Post Courier, memberikan publikasi daripada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Irian Jaya. Yang menjadi promotor utama dan membela orang-orang pelarian dari Irian Jaya ialah golongan mahasiswa University of Papua New Guinea (UPNG), yang membawakan segala persoalan — dalam suatu Forum di mana semua orang dapat mengeluarkan suaranya mengenai apa yang sedang terjadi. Banyak demonstrasi politik digodog dalam Forum tersebut. Dalam suatu demonstrasi pernah bendera Indonesia diinjakinjak di muka KBRI. Maka sayang benar bahwa kalangan universitas yang selalu bergolak ini tak pernah diapproach oleh KBRI, karena justru UPNG inilah yang menjadi tumpuan kaum cerdik-cendekiawan Papua New Guinea yang akan menentukan arah kemudian hari negaranya. Begitu pula sementara mahasiswa adalah anak-anak orang-orang pelarian dari Irian Jaya. Terhadap isyu-isyu politik internasional terutama soal-soal perbatasan dengan Irian Jaya yang mendapat perhatian besar di kalangan mahasiswa Papua New Guinea. Dengan tidak adanya penerangan yang baik, maka pendapat umum di kalangan mahasiswa Papua New Guinea didasarkan atas kuliah-kuliah sosial politik, berita-berita pers dari dalam dan luar negeri, terutama dari Australia, di antaranya ada yang bersifat sosialis kekiri-kirian. Di antara mahasiswa-mahasiswa Papua New Guinea hampir tak ada seorangpun yang pernah berkunjung ke Indonesia. Jadi bayangan mereka mengenai Indonesia tidak terang. Maka ada baiknya kalau diadakan kontak antara University of Papua New Guinea dengan universitas-universitas Indonesia untuk mendobrak "Wall of Ignorance" tadi. Sebagai negara bekas jajahan Australia yang dengan begitu saja mendapat kemerdekaannya dari Australia, hubungan Papua New Guinea masih sangat erat dan orientasinya masih tetap mengarah ke Selatan. Maka sangat sulit misalnya bagi saya untuk mengalihkan orientasi di kalangan mahasiswa ini ke arah Barat, yaitu ke arah Indonesia, untuk menimbulkan kesadaran dan perhatian terhadap Indonesia.

Kalaupun orientasi umum menjurus ke arah Barat, soal-soal yang mengenainya ialah melulu mengenai soal-soal Irian Jaya yang biasanya mencakup soal pelarian dan pelintasan perbatasan (border crossing), dan OPM yang biasanya diperuncing oleh berita-berita pers dan radio, dan oleh demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Jadi yang dikenal umum di PNG 'apakah Indonesia itu' ialah peneropongan mereka tentang kejadian-kejadian di Irian Jaya. Akhirnya konsep Indonesia senantiasa diasosiasikan dengan Irian Jaya.

Mestinya dalam bidang politik dan diplomasi hal ini berlainan. Sejak Papua New Guinea menjadi merdeka, perwakilan Indonesia ditingkatkan dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar. Dengan mengikuti perkembangan-perkembangan di sana selama lima tahun yang akhir-akhir ini, maka kesan saya ialah bahwa aktivitas hubungan Kementerian Luar Negeri Papua New Guinea dan KBRI di sana terutama mengenai soal-soal Irian Jaya. Belum sampai hubungan-hubungan lain mendapat perhatian. Justru hubungan-hubungan lain ini, hubungan kebudayaan dan pertukaran pelajar misalnya, dapat menetralisasikan dan memperbaiki "image" Indonesia di PNG, dan umum bisa mengetahui "the other side of Indonesia".

Sehubungan dengan ini bantuan teknis Indonesia sebagaimana akhir-akhir ini disebut di surat-surat kabar — hendaknya segera dimulai. Perlu diingatkan di sini bahwa kebijaksanaan pemberian bantuan hendaknya dititikberatkan kepada pengetahuan bagaimana mempermudah cara-cara pertanian dan pertukangan. Begitu pula impor alat-alat pertanian dan pertukangan yang sederhana dapat sekali menolong.

Tak dapat dibayangkan bahwa di ibu kota Port Moresby yang berpenduduk 80.000 orang hanya terdapat seorang tukang jahit dan seorang tukang sepatu. Segala sesuatu tergantung pada impor dari segala penjuru di dunia ini, terutama dari Australia. Misalnya segala makanan kalengan berasal dari Jepang, RRC, Hong Kong dan Jerman; tekstil dari RRC, Singapura dan Australia; pakaian jadi dari Australia dan Amerika; beras dari

Australia; daging dari Australia dan Selandia Baru; sayuran dan buah-buahan Eropa dari Australia.

Yang menyolok ialah barang-barang pakaian batik bikinan Indonesia yang diimpor dari Singapura dan diberi harga-harga beberapa kali lipat mulai bertanyalah kita: apakah belum ada financierings institut di Indonesia yang dapat mengusahakan hubungan langsung dengan Papua New Guinea?

Pernah ada pameran dagang oleh RRC dan Korea Selatan di Port Moresby. Tampak benar bahwa khalayak ramai lebih tertarik oleh obyek pameran yang mempertunjukkan cara-cara pertanian, peternakan, kerajinan tangan dan perindustrian kecil daripada oleh mesin-mesin raksasa yang dipamerkan di luar gedung pameran itu.

Belum lama berselang di PNG ada pikiran untuk mendatangkan petani Indonesia untuk mengajarkan cara-cara menanam padi dan bercocok tanam lainnya. Papua New Guinea menghasilkan padi sendiri, tetapi jauh tidak mencukupi kebutuhannya. Sampai sekarang pikiran ini belum terwujudkan. Umumnya ada kecurigaan terhadap orang Indonesia masuk di Papua New Guinea, apalagi kalau mereka datang berbondongbondong. Kita di Indonesia tahu bahwa di SESKOAD siswasiswa asing, termasuk dari Papua New Guinea, dilatih tiap tahun. Pernah ada berita bahwa seorang perwira ABRI akan mengajar juga pada salah satu institut pendidikan ketentaraan di Lae. Maka langsung hal ini menimbulkan pertentangan keras di pers. Menjadi pertimbangan sekarang, apakah tidak lebih baik mendatangkan siswa-siswa Papua New Guinea untuk mendapat latihan di Indonesia dalam segala bidang sambil menyaksikan kehidupan di sini dengan mata kepala sendiri daripada mengirimkan tim pelatih Indonesia ke sana.

Dalam hal ini Indonesia bersaingan dengan Pilipina yang telah mengirimkan paling sedikit 3.000 warga negaranya ke Papua New Guinea lewat suatu recruiting office di Manila yang kemudian disebar di seluruh Papua New Guinea. Profesi-profesi bangsa Pilipina yang dipekerjakan dengan gaji-gaji yang menguntungkan, meliputi segala bidang profesi-profesi yang

praktis, dari stenotypist sampai ke dokter atau insinyur. Keuntungan bangsa Pilipina ialah bahwa mereka pada umumnya berbahasa Inggris — yang menjadi bahasa resmi di Papua New Guinea dan orang Pilipina kebanyakan beragama Kristen seperti orang Papua New Guinea. Lagi pula Pilipina tak pernah ada isyu-isyu politik dengan Papua New Guinea.

Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa di samping masih banyak tenaga luar negeri dibutuhkan, masih banyak pula pengangguran di Papua New Guinea, terutama di kota-kotanya. Biasanya orang tani yang buta huruf dan tak mempunyai kepandajan istimewa tertarik akan kehidupan kota untuk mencari uang. Ternyata kota tak dapat menampung mereka dan dengan demikian terbitlah persoalan pengangguran di kota-kota. Terutama di ibu kota Port Moresby, kelompok besar penganggur ini menimbulkan persoalan keamanan yang akut seperti kerusuhan-kerusuhan, pencurian, pembobolan rumah dan sebagainya. Pemerintah Papua New Guinea sendiri dalam kebijaksanaan penggunaan tenaga kerja nasional mengadakan policy yang serba ketat. Saya ingat misalnya waktu Bapak Duta Besar Rudjito memerlukan seorang sopir, diperkenankan mendatangkannya dari Indonesia, melainkan harus memakai tenaga lokal.

Persoalan-persoalan dalam negeri lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Papua New Guinea antara lain ialah menyatukan rakyatnya yang berjumlah tiga juta itu dan memberikan identitas kepadanya. Dalam wilayahnya yang luasnya sama dengan luasnya Perancis, tiga juta penduduknya yang berbicara 700 bahasa. Hal ini berarti bahwa ada kira-kira 700 suku pula yang masing-masing mempunyai tradisi serta adat kebiasaan sendiri-sendiri. Sering suku-suku yang berdekatan saling bermusuhan maka tidak jarang perang suku berkecamuk, terutama di pegunungan, yang mempunyai latar belakang perselisihan antar suku yang sudah berlarut-larut.

Taraf perkembangan/kemajuan suku-suku juga berbedabeda; pada umumnya suku-suku di daerah pantai — yang telah berhubungan dengan orang Barat selama 100 tahun — lebih pandai dalam hal menyesuaikan diri dengan perkembangan modern - daripada suku-suku di pegunungan yang merupakan mayoritas daripada rakyat Papua New Guinea. Maka usaha pemerintah untuk meningkatkan rasa pranasional atau kesukuan ini menjadi rasa kebangsaan menghadapi macam-macam gerakan separatis, seperti Papua Besena yang dipimpin oleh Josephine Abaijah atau apa yang terjadi di Bouganville dan dipimpin oleh pendeta Father Momis, yang meskipun diselimuti oleh motivasi-motivasi politik mempunyai under current atau landasan kesukuan juga. Rasa kebangsaan baru mulai tumbuh di kalangan elite, kaum terpelajar yang dididik secara Barat. Tapi di desa-desa tradisi dan rasa kedaerahan masih sangat menguasai kehidupan orang. Maka pemerintah Papua New Guinea yang menyatakan dirinya negara demokrasi mengarahkan politik dalam negerinya ke arah "grass root level politics" (taraf rakyat desa) yang pada hakikatnya ialah menentukan kehendak rakyat dengan musyawarah.

Lebih sukar lagi ialah usaha menentukan identitas Papua New Guinea. Masih sedang dicari-cari apakah ciri-ciri khas bangsa Papua New Guinea. Secara antropologi orang-orang Papua New Guinea tergolong dalam rumpun bangsa Melanesia yang terdapat pula di Irian Jaya, New Hebrides, Republic of the Solomon Islands, New Caledonia dan Fiji, yang mempunyai bentuk fisik sama dan cara-cara hidup yang sama pula, walaupun cara kehidupan mereka ini terdapat di seluruh daerah Pasifik Selatan pula. Maka dari pikiran inilah di Papua New Guinea lahir konsep "the Melanesian way of life" yang formulasinya masih sangat tidak terang. Dalam praktek "the Melanesian way" dipakai untuk memberikan identitas kepada Papua New Guinea, dan terutama di dalam politik konsep ini digunakan untuk menyatakan dirinya solider dengan bangsa Melanesia lainnya atau dalam istilah mereka dengan "Melanesian brothers" mereka. Sering konsep "Melanesian" ini diruncingkan untuk membeda-bedakan misalnya "Melanesian" dengan donesian". Sebetulnya ini adalah istilah-istilah antropologi, yang kemudian diberi isi politik.

Dalam pembentukan pemerintahan mereka yang merupakan suatu perpaduan antara sistem pemerintahan Australia dan sistem adat-istiadat mereka, kita lihat bahwa adat dan tradisi mereka dijunjung tinggi dan dijadikan landasan policies mereka. Hal yang demikian itu dapat kita lihat dalam cara-cara pemerintahan mereka serta penggunaan kesenian mereka. Secara begini mereka percaya bahwa demokrasi mereka diberi landasan yang kuat. Hal itu mungkin juga dimaksud untuk menjaga jangan sampai kaum terpelajar yang menduduki tempat-tempat di pemerintahan terlalu mengasingkan diri dari rakyat banyak.

Dalam hubungan luar negerinya Papua New Guinea menganut "Universalism", seperti dikatakan oleh bekas Menteri Luar Negeri Sir Maori Kiki pada United Nations Assembly pada tanggal 17 September 1976:

"Universalism as practised by Papua New Guinea is not widely understood. It is often confused with 'non-alignment' which it certainly resembles, but differs in many important areas.

Universalism to Papua New Guinea means taking the middle path without veering to either side on questions relating to political ideologies, creeds or Governmental systems. We see it as a balanced policy with which Papua New Guinea will make no enemies. But it does not meant just sitting on the fence. It is an active and positive policy".

Demikianlah pernyataan bekas Menteri Luar Negeri Papua New Guinea, Sir Maori Kiki tentang policy negerinya.

Dalam hal kerja sama regional Perdana Menteri Michael Somare sering menyatakan bahwa negaranya adalah negara Pasifik. Maka Papua New Guinea menjadi anggota dari South Pacific Forum yang bersifat nonpolitik. Papua New Guinea merasa lebih dekat dan senasib dengan negara-negara di Pasifik Selatan daripada dengan Asia Tenggara. Dalam prakteknya secara ekonomis tak banyak dapat diharapkan dari negara-

negara Pasifik Selatan. Kerja sama di antara negara-negara Pasifik Selatan misalnya berupa pernyataan solidaritas mengenai kepentingan-kepentingan yang bersamaan, misalnya menentukan batas laut untuk perikanan dan sikap serentak menentang percobaan-percobaan nuklir di daerah Pasifik.

Mengenai Asia Tenggara, mau tak mau Papua New Guinea akan selalu mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomis sebagaimana terbukti dari banyaknya impor oleh Papua New Guinea dari Asia Tenggara. Apalagi karena berbatasan dengan Indonesia, Papua New Guinea tak mungkin dapat mengasingkan diri dari Asia Tenggara. Maka sering Papua New Guinea menyatakan pula ingin menjadi jembatan atau penghubung Pasifik Selatan dengan Asia Tenggara.

Tentang hubungan dengan Indonesia, Papua New Guinea sekarang telah mengambil sikap yang lebih tegas daripada dua tahun yang lalu mengenai persoalan yang selalu merupakan "duri di mata kedua negara", yaitu soal OPM dan pelarian di Irian Jaya. Dengan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa soal-soal ini belum hilang sama sekali, toh paling tidak terbukalah jalan sekarang untuk "to come to business" dengan masalah-masalah lain yang lebih penting dan lebih urgen daripada soal-soal perbatasan.

KETURUNAN INDONESIA DI KA-WASAN PASIFIK SELATAN

R. Slamet ROOSMAN*

Banyak orang Indonesia tahu bahwa sejumlah keturunan bangsa Indonesia sejak beberapa generasi tinggal di Kawasan Pasifik Selatan, khususnya di Kaledoni Perancis dan Papua Niugini. Akan tetapi kebanyakan tidak mengetahui masyarakat dan sejarah mereka. Inilah tema karangan ini. Secara berturutturut akan dibicarakan masyarakat Ambon di Rabaul, Papua Niugini, dan masyarakat Jawa di Kaledoni Perancis.

MASYARAKAT AMBON DI RABAUL

Mungkin bangsa Papua Niugini (Papua New Guinea, atau PNG diucapkan Pi-En-Ji) — kecuali penduduk Rabaul — tidak mengetahui, bahwa kurang-lebih 150-200 orang keturunan Indonesia — yang telah mencapai generasi ketiga — merupakan masyarakat kecil di Rabaul, ibu kota propinsi East New Britain di PNG. Oleh umum mereka dinamai ''Malays'' (orang Melayu), dan mereka merupakan satu golongan minoritas bangsa campuran (mixed race) — yaitu campuran pribumi dengan non-pribumi — yang hidup di tengah-tengah masyarakat Melanesia, penduduk asli PNG.

R. Slamet ROOSMAN adalah seorang Profesor Indonesia pada Universitas Papua New Guinea di Port Moresby. Karangan ini adalah hasii riset yang dilakukannya di tempat.

Sebelum Perang Pasifik (Perang Dunia Kedua) mereka bertempat tinggal di suatu sektor kota Rabaul yang oleh umum disebut "Malaytown" (Kampung Melayu). Selama Perang Kawasan Niugini — ialah bagian utara dari PNG — diduduki oleh tentara Jepang. Rabaul dijadikan markas pertahannya, maka tak lama kemudian pesawat pembom Sekutu dengan tak henti-hentinya menggempur kota itu yang cepat berubah menjadi kota hantu yang hancur-lebur. Kini hanya bekas-bekas "Malaytown" dengan batas jalan-jalan sekelilingnya masih tampak. Terlihat pula beberapa rumah reyot yang dibangun sehabis perang. Para penghuni "Kampung Melayu" dulu, sekarang tersebar rumahnya di dalam dan sekitar Rabaul. Sementara itu banyak pula yang pindah ke kota-kota PNG lainnya, seperti Lae dan Port Moresby.

Riwayat "Orang Melayu" Rabaul ini mulai sewaktu Jerman menduduki Niugini dari tahun 1880 sampai tahun 1914. Dari tahun 1914 selanjutnya menjadi jajahan (territory) Australia. Sejak Jerman menduduki Niugini, kapal-kapal Jerman yang berlayar dari Eropa ke Niugini harus melalui Hindia Belanda dulu. Rupanya orang-orang Jerman "terpesona" melihat betapa "suksesnya" sistem Cultuurstelsel (Penanaman Tanamantanaman Dagang dengan Paksa) itu, maka praktek Belanda ini hendak mereka terapkan pula di daerah Rabaul — yang hendak mereka sulap menjadi perkebunan raksasa. Hal ini terjadi pada akhir abad kesembilanbelas sewaktu bangsa Jerman memperluas kekuasaannya dengan mendirikan bermacam-macam toko dan perkebunan. Pada waktu itu daerah Rabaul belum banyak penghuninya. Penduduk aslinya - kebanyakan dari suku Tolai - hidup dari berladang dan berburu, semata-mata untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Merekapun kurang menyukai pekerjaan yang teratur, apalagi kalau mereka harus bekerja berjam-jam dengan disiplin yang keras oleh pengusahapengusaha Jerman.

Maka terpaksalah Jerman mendatangkan tenaga buruh dari daerah Pasifik, antara lain Mikronesia dan Polynesia untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Orang Cina di-impor juga. Tapi kemudian orang Cina ini — yang biasa bekerja keras dan hidup berhemat melepaskan diri dari kontraknya, lalu mendirikan business-nya sendiri.

Orang Ambon yang pertama-tama datang ke Rabaul kebanyakan masih bujangan. Mereka ditempatkan lebih dahulu di Kavieng — tidak jauh dari Rabaul — di mana mereka kawin dengan gadis-gadis lokal. Ketika mereka dipindahkan ke Rabaul oleh majikan Jerman, isteri mereka ikut. Orang-orang Ambon dipekerjakan sebagai pegawai di toko atau mandor untuk mengawasi pekerja-pekerja di perkebunan. Karena hidup mereka selamanya dari gaji bulanan, maka hingga sekarang keturunan merekapun masih belum berhasil juga berdiri sendiri, misalnya dengan mendirikan toko sendiri atau usaha swasta lainnya. Maka selanjutnya orang-orang Ambon ini tetap menjadi pegawai gajian saja.

Mungkin orang Jerman dulu suka memilih orang-orang Ambon sebagai personal administrasinya, karena orang-orang Ambon umumnya bisa membaca dan menulis, dan sedikit berbicara bahasa Belanda yang ada miripnya dengan bahasa Jerman.

Pengerahan buruh dari Asia secara besar-besaran — yang terdiri dari orang Melayu dan Cina — mulai pada tahun 1890 setelah kegiatan-kegiatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan Jerman diambil-alih oleh pemerintah kolonial Jerman. Pada tahun 1892 jumlah buruh-impor di Kaiser Wilhelmsland (nama daerah Jerman dulu untuk Niugini sekarang) ialah 1.842 (757 orang Melayu dan 1.085 orang Cina) dibandingkan dengan 895 orang Melanesia yang dipekerjakan di situ. Setelah itu jumlahnya berkurang. Pada tahun 1894 ada 431 orang Melayu dan 519 orang Cina, kemudian angka untuk tahun 1898 adalah 208 Melayu dan 167 Cina. Setelah tahun 1888 orang Melayu kebanyakan datang bersama isterinya. Pada tahun 1896 terdapat 157 wanita di antara 414 orang Melayu. Pada tahun 1914 terdapat 1.609 pekerja-impor di Niugini yang terdiri dari 1.377 orang Cina, 163 orang Melayu, 36 orang Chamorro (dari kepulauan Mariana yang sekarang menjadi United Nations Trust

dengan administrasinya dilakukan oleh Amerika Serikat), 25 orang Polynesia dan 8 orang India.

Di daerah Rabaul dan sekitarnya bangsa Melayu — dengan jumlah 163 orang — merupakan golongan asing yang nomor tiga. Separoh di antaranya berdiam di ''Kampung Melayu'' di kota Rabaul. Menurut perhitungan jiwa di daerah tersebut yang dicatat oleh A.N.M.F. (Australian Naval and Military Expeditionary Forces) pada bulan Pebruari 1917 ''terdapat penduduk bangsa Cina 1.451 orang, tapi tak ada angka yang tersendiri untuk golongan Melayu, karena mungkin mereka ini dimasukkan golongan Cina (Asia) juga''.

Sensus tahun 1966 menunjukkan bahwa dalam daerah perkotaan yang terbesar di PNG ialah Port Moresby, Lae dan Rabaul, proporsi golongan bangsa campuran (mixed race) yang terbesar adalah di Rabaul dengan 41.3 orang setiap 1.000 orang penduduknya, dibandingkan dengan 12.1 di Port Moresby, 10.7 di Lae, dan 1.4 untuk seluruh PNG. Angka Rabaul yang tinggi ini dapat dihubungkan dengan sejarah perkembangan perkebunan oleh bangsa Eropa di daerah ini.

Selama pemerintahan Jerman (1880 — 1914), dan Australia sejak 1914, orang Ambon digolongkan ''orang pribumi yang tidak asli'' (non-indigenous natives). Namun demikian, berbeda dengan penduduk asli Melanesia, orang-orang Ambon diperbolehkan minum minuman keras dengan ijin pengawas tokotoko yang menjual minuman keras, lagi pula mereka dibebaskan dari peraturan hukum yang memperbolehkan hukuman badani (corporal punishment) untuk pelanggaran-pelanggaran ''disiplin kerja''.

Waktu saya berkunjung ke Rabaul pada tahun 1976, Oom Salhuteru, kelahiran Ambon, yang sudah lebih dari 50 tahun bermukim di Rabaul, menceritakan dalam logatnya Ambon kepada saya bahwa "pembatasan-pembatasan hak yang bersifat diskriminasi bangsa memang dilakukan oleh bangsa Jerman, kemudian oleh bangsa Australia".

Antara tahun-tahun 1950 — 1960 golongan non-Eropa dan non-Melanesia mulai mendirikan Club mereka masing-masing, ialah "Traiping Club" oleh golongan Cina yang kemudian disusul oleh "Kambiu Club" oleh golongan "mixed race", dan akhirnya "Ambonese Club". Justru ini terjadi semasa pembatasan minuman keras ditiadakan oleh pemerintah Australia, dan masing-masing golongan di Rabaul telah maju, dan menjadi golongan-golongan yang sudah bisa berdikari. Niat mereka untuk berdiri sendiri timbul karena politik diskriminasi pemerintah Jerman dulu yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Australia. Selain daripada itu usaha demikian timbul pula dari kesadaran golongan-golongan akan identitas mereka masingmasing. Kesadaran ini tumbuh bersamaan dengan naiknya derajat sosial dan ekonomi (status) mereka di kalangan masyarakat setempat.

Club-club tersebut letaknya di daerah pertokoan Rabaul yang biasanya disebut 'chinatown' (Pecinan), dan menjadi tempat kumpul-kumpul habis kerja di mana orang suka omongomong tentang soal-soal sehari-hari. Tahun-tahun belakangan ini club-club hanya melayani anggautanya masing-masing, tetapi serenta orang-orang dari golongan bangsa lain, seperti bangsa Australia, Jerman dan Tolai sama tertarik dan diperbolehkan masuk club-club juga, maka sekarang sering dapat kita lihat segala macam bangsa dengan santai bersama-sama duduk-duduk di Club sambil minum bir.

Larangan minuman keras oleh pemerintah Australia yang dikenakan terutama kepada orang-orang pribumi, rupanya tidak berlaku untuk golongan Ambon yang kabarnya "diperbolehkan memasuki club-club orang putih juga". Waktu saya ada di Rabaul, orang-orang Ambon di sana memperlihatkan kepada saya sehelai potret tua yang sudah kekuning-kuningan warnanya "di mana orang-orang Ambon dulu di Rabaul tampak berpakaian stelan rapi dengan memakai sepatu, dasi dan topi".

Pada tahun 1953 ketika pemerintah Australia memberi kesempatan kepada golongan bangsa campuran (mixed race) dan Cina di Niugini memperoleh kewarganegaraan Australia secara naturalisasi, maka hampir semua orang Ambon minta menjadi warga negara Australia. Sesudah itu terutama, orientasi mereka tertuju kepada Australia: mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah di Australia, dan di sana banyak di antara mereka membeli rumah untuk hari tuanya. Sebelum kemerdekaan Papua Niugini pada tanggal 16 September 1975, orang Ambon mempunyai status politik di bawah bangsa Australia, tapi di atas orang pribumi.

Berbeda dengan golongan "mixed race" lainnya — misalnya di Port Moresby, di mana mereka mudah kawin dengan golongan lain — orang Ambon Rabaul mempunyai rasa ikatan kesukuan yang kuat. Generasi kedua condong kawin dengan seorang dalam golongannya sendiri. Namun sekarang sering terjadi generasi ketiga kawin dengan bangsa Australia juga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan bebasnya bergaul dengan bangsa kulit putih, Cina dan orang asli setempat.

Sementara itu orang Ambon di Rabaul berhasil meninggikan derajat sosialnya setaraf dengan golongan menengah di PNG. Dalam cara hidupnya mereka banyak meniru kehidupan orang Australia. Dapatlah mereka kita lihat berjalan-jalan di kota Rabaul dengan berpakaian secara Barat, atau naik mobil, dan hidup serba cukup di rumahnya dengan tilpun, kulkas dan leding air panas.

Makanan mereka macam-macam: secara Eropa, Asia, ataupun a la Melanesia, yaitu kaukau (ubi jalar atau ubi manis), talas, pisang mentah yang direbus — yang menjadi makanan pokok rakyat Melanesia dan Polynesia. Olah-raga mereka terdiri dari rugby Australia dan sepak bola, ataupun menangkap ikan di laut secara Melanesia dengan melemparkan jala. Hari lepas kerja mereka suka berpiknik di luar kota dengan menyajikan masakan mumu, "masak batu bakar" cara Melanesia dan Polynesia yang terdapat juga di Irian Jaya.

Walaupun mereka mendapat didikan Australia, bahasa mereka sehari-hari tetap "Tok Pisin", Pidgin English. Generasi

kesatu dan beberapa anggauta generasi kedua masih berbicara bahasa Indonesia logat Maluku. Masih ada pertalian batin dengan Ambon pula yang berkali-kali terbukti bilamana ada kapal — yang anak buahnya kebetulan dari Ambon — berlabuh di Rabaul, maka dapat dipastikan pelaut-pelaut Ambon ini akan diundang makan di rumah mereka dan diajak minum-minum bir di "Ambonese Club".

Yang boleh dikatakan sifat Indonesia apa yang masih ada pada mereka terhitunglah kebanggaan mereka untuk disebut "Ambonese" (orang Ambon), dan memakai nama-nama seperti Wattimena, Leimena, Siloy, Tahiya, Latumahina, Salhuteru dan lain sebagainya, menyanyi lagu-lagu Ambon waktu minum bir, dan membuat masakan khas Ambon.

Dua orang Ambon keturunan kedua di Rabaul yang saya kenal baik, lagi fasih berbahasa Indonesia adalah Andy Siegers — yang biasanya mengetuai golongan Ambon di sana, dan rekannya Bob Franciscus. Andy yang mempunyai perusahaan bengkel mobil dan pengepakan/pengangkutan barang di Rabaul telah memilih menjadi warga negara PNG, sedang Bob yang menjadi pegawai perusahaan dagang besar Australia telah lama menjadi warga negara Australia.

Menjelang kemerdekaan PNG maka timbullah rasa kekhawatiran di kalangan bangsa Cina dan "mixed race". Semula diduga "akan timbul permusuhan di kalangan orang Melanesia — penduduk asli PNG — yang ditujukan kepada golongan-golongan non-Melanesia". Syak-wasangka inilah menyebabkan banyak gulung-tikar businessnya, dan pindah ke Australia. Di sana mereka sudah bersiap-siap membeli rumah serta segala macam business.

Ternyatalah kecurigaan mereka tak beralasan, maka kebanyakan mereka balik ke PNG, setelah menyadari bahwa "walaupun mereka mengantongi paspor Australia, akhirnya toh mereka harus mengakui bahwa di Papua New Guinea — di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan — segala sesuatu lebih cocok bagi mereka, dan lebih mudah dipahami daripada di Australia".

MASYARAKAT JAWA DI KALEDONI PERANCIS

Riwayat keturunan bangsa Indonesia yang sekarang bermukim di Nouvelle Caledonie (New Caledonia, atau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi Kaledoni) mulai sekitar pergantian abad ini sewaktu buruh dari Asia diimpor oleh Perancis untuk dipekerjakan pada pertambangan nikel dan perkebunan kopinya di Pasifik Selatan. Maka diadakan persetujuan dengan pemerintah Hindia Belanda dulu untuk mengirimkan pekerja ke Kaledoni atas dasar kontrak-limatahun. Sehabis kontrak mereka harus dipulangkan.

Mereka kebanyakan petani atau buruh tani, pelayan atau pekerja kasar dari Jawa. Rombongan pertama tiba di Noumea pada tahun 1901. Sejak tahun 1911 jumlahnya naik sampai 1.200 orang, lalu pada tahun 1930 meningkat lagi menjadi 7.000 orang, dan akhirnya pada tahun 1939 memuncak hingga 7.735 orang. Selama zaman ''meleset'' (malaise) pada tahun-tahun 1930-1933 banyak di antara mereka dipulangkan. Mulai tahun 1933 buruh dari Indonesia mengalir lagi ke Kaledoni. Kendatipun demikian lebih banyak yang pulang daripada yang datang. Ada kalanya pula kontrak-kontrak lama diperbarui.

Selama Perang Pasifik pengimporan buruh ke Kaledoni menjadi terhenti, dan masyarakat Indonesia yang menjadi terpencil dari dunia luar bertambah secara alamiah dengan 700 jiwa. Bilamana perang berakhir Pemerintah Perancis mengumumkan bahwa semua buruh kontrak di Kaledoni telah dibebaskan dari kontraknya masing-masing. Demikian banyaknya buruh Indonesia yang kembali ke tanah-air, sehingga menimbulkan persoalan kekurangan tenaga buruh. Mereka yang mau tinggal di Kaledoni, diberi kesempatan menjadi warga negara Perancis dengan jalan naturalisasi.

Pada tanggal 16 Juli 1949 kira-kira 500 orang Indonesia dengan kontrak 3 tahun tiba lagi di Noumea — ibu-kota Kaledoni — hal mana meringankan soal kekurangan tenaga buruh. Pemasukan buruh Indonesia dilanjutkan sampai tahun 1965, kemudian Perancis menghentikan transmigrasi bangsa In-

donesia ke Kaledoni sama sekali. Pada tahun 1963 orang Indonesia beserta anak-cucunya di Kaledoni berjumlah 3.536 jiwa, 2.000 di antaranya lahir di Kaledoni, sedang 1.536 kelahiran Indonesia.

Konsulat Indonesia mulai dibuka di Noumea pada 1 Juli 1951. Bapak Suroso Prawirodirdjo yang diangkat pada bulan Juli 1975 sekarang menjabat Konsul RI yang kesembilan di Kaledoni. Pada bulan Oktober 1977 dari 1.850 orang penduduk Kaledoni yang terdaftar di Konsulat sebagai warga negara Indonesia 1.184 adalah pria dan 666 wanita. Banyak di antara mereka termasuk keturunan kedua dan ketiga, sedang lainnya kebanyakan berusia 40 tahun lebih dan lahirnya di Jawa.

Menjelang tahun 1970 Pemerintah Perancis bermufakat dengan Pemerintah Indonesia mengerahkan buruh Indonesia untuk dikirim ke Kaledoni, dan antara bulan Juli 1972 dan April 1971 kurang-lebih 550 orang Indonesia — dengan disponsori oleh CITRA (Compagnie Industrielle de Travaux) — dipekerjakan di Kaledoni. Setiba di Noumea mereka disebarkan di antara beberapa perusahaan Perancis yang beroperasi di Kaledoni. Jumlah pekerja tahun demi tahun turun, dan pada tahun 1974 — dengan terjadinya kelesuan ekonomi (slump) di pasaran nikel — buruh kontrak Indonesia semuanya dipulangkan.

Setelah Perang Pasifik selesai, tidak sedikit pekerja kontrak dahulu yang dibebaskan dari kontraknya, berhasil menjadi pengusaha swasta selaku pemilik toko, restoran, pengangkutan bis kota, kontraktor, tukang listrik dan lain-lainnya. Yang tinggal di pedesaan menjadi petani kecil. Pada umumnya, kebanyakan di antara mereka masih tetap menjadi buruh di pertambangan, pegawai rendahan pada kantor-kantor pemerintahan atau perusahaan-perusahaan di Noumea.

Sewaktu harga nikel masih baik di pasaran dunia, banyak pemuda keturunan Indonesia dari desa-desa mengalir ke Noumea di mana banyak tenaga buruh masih diperlukan. Akan tetapi sewaktu harga nikel mengalami kelesuan — seperti sekarang ini — anak-anak ini tetap bertahan di kota dan segan

pulang ke desanya. Keturunan Indonesia yang berhasil usahanya di Kaledoni, telah dapat meningkatkan kedudukannya dari kuli kontrak menjadi golongan menengah. Di antaranya terdapat seorang keluaran Fakultas Kedokteran Universitas di Perancis ialah Dokter Daryana yang sekarang mempunyai praktek ramai di Noumea.

Banyak di antara orang-orang Indonesia yang menetap di Kaledoni telah menjadi warga negara Perancis. Alasan mengapa tukar kewarganegaraan ialah bahwa sebagai warga negara Perancis mereka mendapat jaminan sosial dan fasilitas-fasilitas lainnya yang melulu diberikan kepada warga negara Perancis. Memang tak mudah menetapkan dengan tepat berapa jumlah keturunan Indonesia sekarang tinggal di Kaledoni, karena di antara orang-orang yang tukar kewarganegaraannya jarang ada yang lapor pada Konsulat RI.

Meskipun bagaimanapun jua mereka masih tetap mempertahankan identitas Indonesianya, misalnya — walaupun mereka sekarang sudah sampai kepada generasi yang kelima — dengan bangga mereka menamakan dirinya "descendants indonésiens" (keturunan Indonesia). Kebanyakan generasi kesatu dan kedua masih berbicara bahasa Jawa, tetapi generasi yang selanjutnya hanya mengerti bahasa Jawa secara pasif. Dalam kehidupan mereka sehari-hari bahasa Perancislah yang dipergunakan. Adat mereka memakai kain-kebaya atau songkok, dan suka makan nasi dengan lauk-pauk Indonesia masih tampak sekali di Noumea, apalagi di daerah-daerah pedesaan di luar Noumea. Adat-istiadat upacara perkawinan Jawa dan kematian secara Islam masih saja dilakukan di Kaledoni. Begitupun sistem gotong-royong masih dipatuhi.

Dengan penemuan sumber-sumber nikel baru di Indonesia belakangan ini — di Irian Jaya (Pulau Gag) dan Sulawesi — maka Jepang yang menjadi pembeli utama nikel Indonesia dan Kaledoni, mengubah siasat pembeliannya. Pada tahun-tahun 1973-1974 harga nikel merosot sekali karena Jepang berhasil menurunkan harga pembeliannya dengan alasan bahwa "persediaannya (stock) telah cukup untuk beberapa tahun yang akan datang ini", yang berakibat nikel Kaledoni menjadi tidak laku dan sejumlah besar tenaga kerja di Kaledoni terpaksa dilepas.

Hingga sekarang ekonomi Kaledoni masih sangat tergantung pada ekspor nikelnya. Seakan-akan prospek ekonominya menjadi suram, dan 'hari-hari bersenang-santai telah lampau' bagi penduduknya. Harga keperluan sehari-hari — yang kebanyakan diimpor dari Perancis, Australia dan Selandia Baru — membumbung tinggi, dan masyarakat Kaledoni — yang beranggapan kemakmuran pulaunya sebagai biasa akan berlangsung terus — sekarang mulai mengeluh, bahwa mereka harus hidup dengan serba kurang hari-hari ini. Untunglah sistem jaminan sosial (social security) — yang diurus baik di Kaledoni — menghindarkan Kaledoni ''sampai terjerumus ke dalam lembah kesengsaraan'' karena depresi nikel, sebagaimana dulunya diperkirakan.

Dari nenek dan orang-tuanya keturunan Indonesia di Kaledoni menyadari bahwa ikut-ikut politik menjadi pantangan, karena dulu ini bisa mengakibatkan mereka dikirim pulang ke Jawa dengan tak ada harapan akan mendapat pekerjaan yang layak. Ketakutan akan terlibat dalam politik sedemikian mendarah-daging dalam jiwa orang-orang Kaledoni ini sehingga mereka tidak mau tahu-menahu tentang soal-soal politik. Sampai Perang Pasifik sudah selesai, usaha politik mereka hanya tertuju kepada mendirikan perkumpulan kematian — yang diketuai oleh seorang pemuka agama Islam — dan membentuk kesebelasan sepak-bola. Rupanya sistem gotong-royonglah satusatunya faktor yang menyatukan mereka, sehingga di kalangan Kaledoni mereka terkenal sebagai "satu golongan yang sadar akan kesukuannya".

Dengan mudahnya mereka bergaul dengan golongangolongan bangsa lainnya seperti bangsa Perancis, Cina, Vietnam, Melanesia (putra daerah Kaledoni), Tahiti dan orang-orang dari Pulau Wallis yang ada banyak di Kaledoni. Bangsa Perancis yang dipekerjakan di Kaledoni banyak yang suka kawin dengan gadisgadis keturunan Indonesia. Sebaliknya — apalagi zaman sekarang — tidak jarang pula pemuda-pemuda keturunan Indonesia di Kaledoni kawin dengan wanita Perancis. Kepemimpinan tidak pernah terdapat di kalangan orang Indonesia Kaledoni. Dahulu amat sulitnya menyatukan mereka, karena mereka kebanyakan buta-huruf dan tak berpendidikan. Lagi pula mereka rata-rata merupakan golongan petani ataupun buruh tani di Jawa yang jatuh miskin. Justru karena mereka sama-sama miskinnya, maka di antara mereka ada perasaan sama-rata dan "tak ada perbedaan tinggi-rendah seperti di Jawa".

Selama Perang Dunia Kedua perhubungan Kaledoni dengan Indonesia terputus, namun demikian orang-orang Indonesia Kaledoni dengan cermatnya mengikuti warta-berita disiarkan oleh Radio Australia mengenai kejadian-kejadian serta perubahan-perubahan politik yang sedang berlangsung di tanahair Indonesia. Setelah kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang di dunia, maka serombongan orang Indonesia Kaledoni berlayar ke Jawa pada tahun 1948 'untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan". Pada waktu itu keadaan di Pulau Jawa kacau-balau, dan tak ada seorangpun yang memperhatikan kontingen pejuang Kaledoni. Mereka menjadi terdampar selama beberapa tahun dengan ikut mengalami kesengsaraan akibat perang melawan Belanda. Maka kemudian banyak di antara mereka — dengan hati kecewa — bertolak kembali ke Kaledoni. Hingga tahun 1973 di daerah pedesaan di luar Noumea — seperti di Kone dan Paita — potret Presiden Soekarno almarhum masih kelihatan di rumah-rumah orang Indonesia Kaledoni. Mengingat mendiang "turun takhta" pada tahun 1966, maka bisa diperkirakan bahwa sampai mereka tidak tahu bahwa sudah ada peralihan zaman di Indonesia, dapatlah kelengahan ini dipersalahkan kepada pihak Konsulat RI Noumea yang kurang memperhatikan masyarakat Indonesia Kaledoni yang tinggal di daerah pedesaan, dan kurang memberikan penerangan bahwa zaman telah berganti. Bukankah waktu itu Pemerintah Orde Baru dengan asyiknya berusaha hendak menghapus segala kenang-kenangan akan zaman Orde Lama?

Tiap tujuh belas Agustus Konsulat RI di Noumea merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama masyarakat keturunan Indonesia di sana dengan nyanyi-nyanyian, pidatopidato dan tari-tarian Indonesia. Terdapatlah pula di Kaledoni beberapa perhimpunan antara lain yang mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia Kaledoni dan memelihara hubungan mereka dengan Konsulat RI. Di antaranya ialah ''Club des jeunes indonésiens'', kemudian ''Amicale islamique indonésiens'' yang berhaluan Islam, dan ''Amicale des niaoulis'' suatu organisasi orang-orang Indonesia Kaledoni keturunan kedua (= niaouli). ''Dutika Handayani'' yang merupakan persatuan Ibu-ibu dari Konsulat RI di Noumea telah memasukkan wanita-wanita Kaledoni keturunan Indonesia sebagai anggautanya, karena demikian banyaknya ibu-ibu Indonesia Kaledoni yang masih ingin memelihara pertaliannya dengan Indonesia.

Maka jelaslah bahwa tugas Konsulat RI di Noumea tidak hanya terbatas kepada hanya memberikan visa ke Indonesia saja, atau — sebagaimana telah terjadi pada masa lampau — membantu Pemerintah Perancis mengerahkan tenaga Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Perancis di Kaledoni. Konsulat RI di Noumea mempunyai tugas yang lebih luas pula, ialah untuk membina masyarakat Indonesia Kaledoni memelihara hubungan dengan tanah nenek-moyangnya berupa tari-tarian, gamelan dan sendratari — sebagaimana mereka inginkan sendiri. Peranan perwakilan RI inilah yang sangat disukai oleh Pemerintah Perancis karena memelihara dan mengembangkan kebudayaan Indonesia di Kaledoni berarti memperkaya kehidupan masyarakat besar di Kaledoni yang merupakan paduan daripada berbagai-bagai bangsa dan budaya.

Hingga kini belum ada orang Indonesia Kaledoni yang memegang peranan penting dalam politik, kecuali Amril Junaedi yang memimpin satu cabang daripada Partai Sosialis Kaledoni di ibu kota Noumea. Partai ini menuntut otonomi dari Perancis, sebaliknya tidak menghendaki sampai Kaledoni lepas dari Perancis. Suara-suara ancaman ekstremis telah terdengar dari pihak kaum radikal Melanesia yang menyatakan bahwa "golongangolongan minoritas di Kaledoni akan diusir serenta Kaledoni menjadi merdeka".

Maka sementara orang Indonesia Kaledoni tetap menyelenggarakan hubungan business dengan Indonesia, sementara itu memelihara pertalian mereka dengan kaum kerabatnya di tanah-air. Tidak sedikit di antara mereka yang telah membeli sawah dan rumah di Jawa — konon kabarnya — "untuk pensiun pada hari tuanya". Generasi kedua dan ketiga kelahiran Kaledoni, warga negara Perancis dan berpendidikan Perancis pula memberikan komentar bahwa "mereka toh akan ke Perancis", kalau apa-apa terjadi kelak. Dan yang tetap berpegang pada kewarganegaraan Indonesia, beranggapan bahwa "selalu akan ada tempat bagi mereka di Indonesia".

Bagaimanapun jua nasib pulau Kaledonia ini di kemudian hari, bolehlah diperkirakan bahwa keturunan bangsa Indonesia — yang sekarang memegang peranan penting dalam segala bidang kehidupan di Kaledoni — selalu akan dibutuhkan kepandaian dan pengalamannya untuk pembangunan Kaledoni. Telah terbukti pula di waktu yang lampau dengan betapa luwesnya mereka dapat menyesuaikan dirinya kepada pasang-surut politik dan ekonomi di Kaledoni.

Maka seyogyanyalah mereka tetap tinggal di Kaledoni saja, karena sebenarnyalah dalam hatinya mereka mengakui dirinya "Caldoche" (orang Kaledoni), karena mereka lahir dan dibesarkan di Kaledoni, barulah kecondongan mereka ditujukan kepada Indonesia ataupun Perancis.